



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN
(RKPD-P)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2020 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- (2) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 7 (tujuh) BAB dengan rincian sebagai berikut:
- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. BAB VII Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUAP), Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2021 dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi Perubahan RKPD 2021.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Tahun 2021 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Gubernur yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Juli 2021
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR
050

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : 2021

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang Dan Dasar Pertimbangan Perubahan	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Maksud Dan Tujuan	I-6
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN II-1	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-1
2.1.1. Capaian Kinerja Makro Daerah tahun 2021	II-2
2.1.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah	II-5
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Evaluasi Kondisi Pembangunan Ekonomi Nusa Tenggara Timur....	III-2
3.1.2. Inflasi.....	III-8
3.1.3. Proyeksi Kondisi Pembangunan Ekonomi Nusa Tenggara Timur....	III-9
3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-10
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021.....	IV-6
4.2.1. Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024	IV-6
4.2.2. Tema Pembangunan 2021	IV-8
4.2.2.1. Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	IV-8
4.2.2.2. Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021...	IV-9
4.2.2.3. Prioritas Lokasi Pembangunan RKPD 2021.....	IV-10
4.2.2.4. Prioritas Daerah RKPD 2021	IV-12
4.3. Inovasi Daerah	IV-30
4.3.1. Inovasi Kolaborasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting.....	IV-30
4.3.1.1. Input.....	IV-30
4.3.1.2. Proses	IV-32
4.3.1.3. Output	IV-33
4.3.1.4. Outcome	IV-33

4.3.2. Inovasi Tanam Jabung Panen Sapi (TJPS)	IV-34
4.3.2.1. Input	IV-34
4.3.2.2. Proses	IV-35
4.3.2.3. Output	IV-37
4.3.2.4. Outcome	IV-37
4.3.3. SI MANDATARIS (Sistem Informasi Data Strategis)	IV-37
4.3.3.1. Input	IV-37
4.3.3.2. Proses	IV-38
4.3.3.3. Output	IV-41
4.3.3.4. Outcome	IV-41
4.4. Strategi Menghadapi Covid 19 dan Badai Siklon Seroja (Siklon Tropis 99S)	IV-42
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1

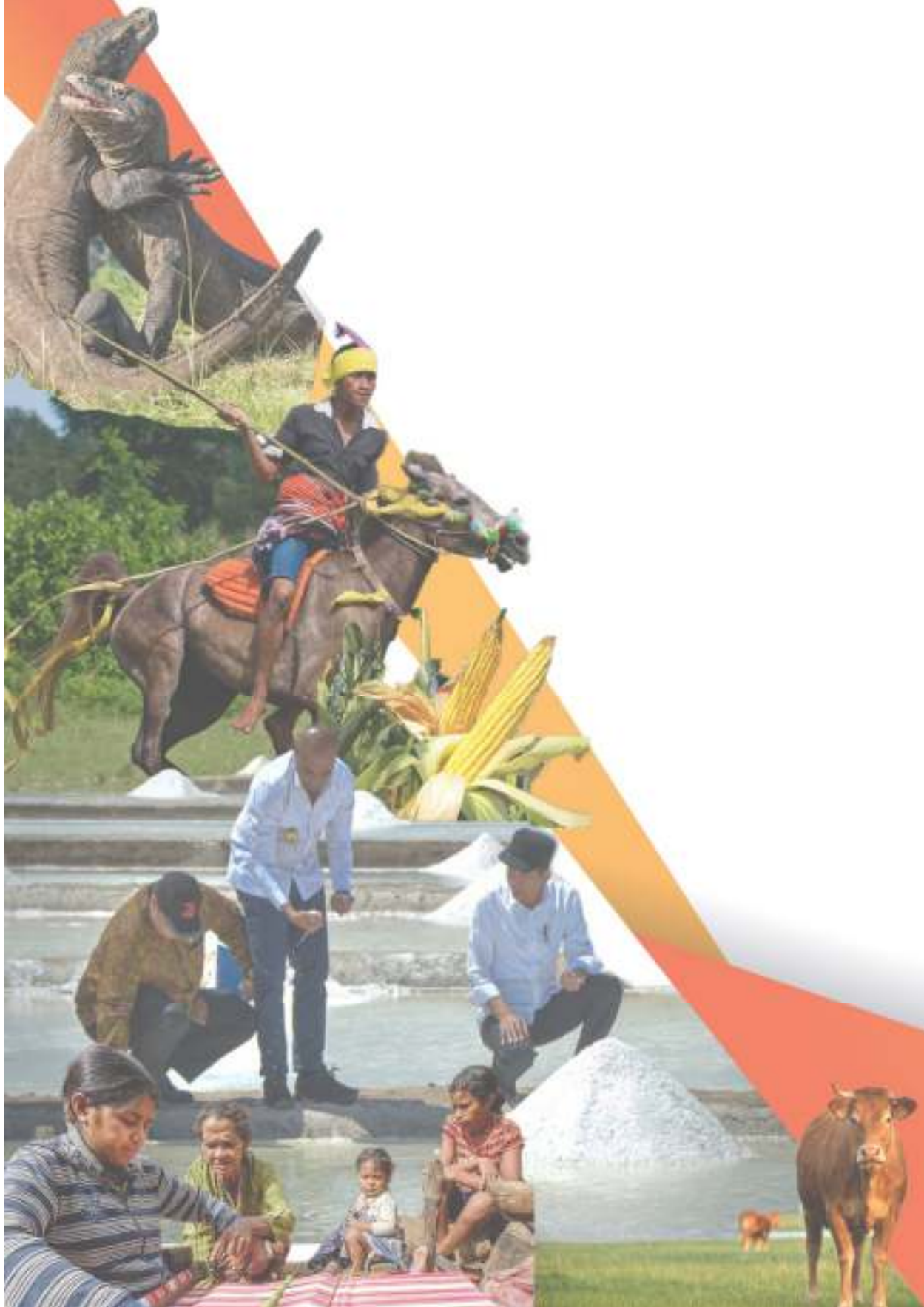
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Makro Daerah Tahun 2018-2020	II-4
Tabel 2.2	Capaian Realisasi Anggaran 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021 Keadaan Triwulan II	II-10
Tabel 2.3	Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.....	II-12
Tabel 3.1	Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	III-11
Tabel 3.2	Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Sesuai RKPD Induk Tahun 2021)	III-13
Tabel 4.1	Target Indikator Kinerja Utama RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023	IV-1
Tabel 4.2	Target Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021	IV-3
Tabel 4.3	Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan untuk Tahun 2021 (yang sudah disesuaikan dengan kondisi 2021)	IV-4
Tabel 4.4	Indikator Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-8
Tabel 4.5	Lokasi Prioritas sesuai Strategi Pertumbuhan dan Pemerataan	IV-11
Tabel 5.1	Struktur Perubahan APBD Dalam RKPD Perubahan Tahun 2021.....	V-2
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021	VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya	I-6
Gambar 3.1	Outlook Perekonomian Nusa Tenggara Timur	III-3
Gambar 4.1	Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional.....	IV-7
Gambar 4.2	Arah Kebijakan sebagai Pedoman penentuan Tema RKPD	IV-9
Gambar 4.3	Peta Sebaran Stunting per kabupaten/kota.....	IV-11
Gambar 4.4	Peta Kemiskinan per Kabupaten/Kota	IV-12

BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan.

Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD,

serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020 dan tahun 2021 sampai dengan kondisi bulan April 2021 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan di atas.

Penyusunan RKPD Perubahan dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

Tahun 2021 ini terjadi kondisi yang sama dengan tahun sebelumnya, sejak triwulan I Tahun 2020, negara-negara di dunia termasuk Indonesia merasakan dampak pandemi *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga cukup besar dengan terganggunya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya

angka-angka pengangguran, kemiskinan dan inflasi serta meningkatnya kasus kematian akibat *Covid-19*, yang berakibat pada pemusatan penggunaan dana untuk menunjang sistem kesehatan daerah yang pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan akumulasi secara nasional.

Dampak yang langsung dirasakan juga adalah harus dilakukannya *refocusing* dan penyesuaian kembali berbagai target indikator kinerja program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan pada RKPD Induk tahun 2021. Hal ini akan yang akan ditampung dalam RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, RKPD Tahun 2021 termasuk RKPD Perubahan Tahun 2021 terdiri memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. Prioritas pembangunan daerah; dan
- c. Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Perubahan Tahun 2021 yang telah disusun ini disinkronkan dengan kebijakan nasional dan juga Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD Induk Tahun 2021 yang diakomodir didalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, serta melakukan penyesuaian dengan adanya *refocusing* akibat pandemic *Covid-19* sekaligus mensinergikannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan kabupaten/kota.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

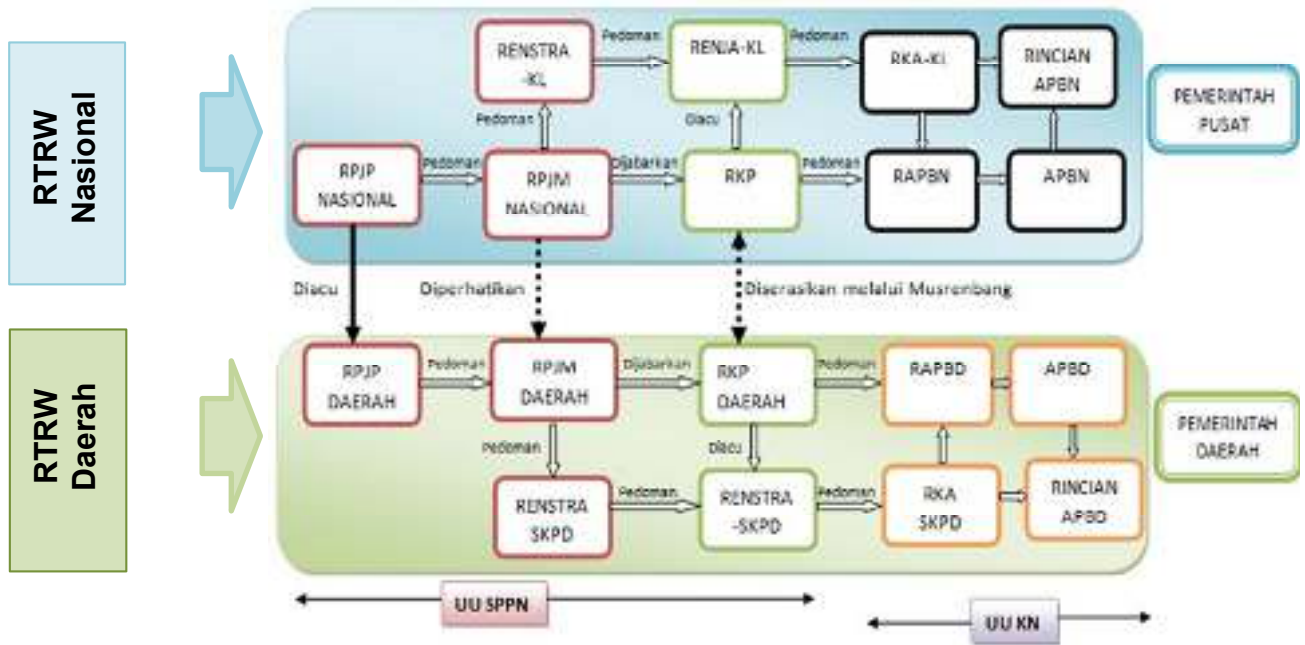
- Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya



Dalam konteks pembangunan berdimensi kewilayahan, dokumen perencanaan yang bersifat spasial dipadukan dengan dokumen yang bersifat a-spasial. Dengan demikian, RKPD Perubahan Tahun 2021 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030. Tentu saja dengan tetap menjaga keserasian terhadap RTRW Nasional, RTR Kawasan Strategis Nasional, RTR Kawasan Strategis Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD Perubahan adalah dokumen perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Perubahan yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan dimaksudkan untuk merumuskan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah, menetapkan program dan kegiatan

prioritas menurut sumber pendanaannya yang bersumber dari dana APBD Perubahan Provinsi NTT.

Tujuan kegiatan Penyusunan RKPD Perubahan ini adalah:

1. Untuk meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antar kebijakan dengan pelaksanaan;
2. Untuk menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
4. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun KUPA dan PPAS-P Tahun 2021.

1.5. Sistematika Penulisan

RKPD Perubahan Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Perubahan serta sistematika dokumen RKPD Perubahan.

Bab II. Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan.

Bab ini menguraikan tentang kondisi umum kondisi daerah, khususnya terkait evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah (seperti indikator makro ekonomi, IPM), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Tahun kondisi triwulan II TA. 2021.

Bab III. Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dengan perincian sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun

rencana sebagai perkiraan maju pendapatan daerah; tantangan dan prospek perekonomian daerah (tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana); arah kebijakan ekonomi daerah; analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah (pendapatan, belanja dan pembiayaan).

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini berisi uraian tentang prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun berjalan dan capaian-capaian kinerja RPJMD, identifikasi permasalahan daerah dan rancangan kerangka ekonomi daerah.

Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini menguraikan secara rinci program dan kegiatan pokok RKPD Perubahan Tahun 2021 lengkap dengan instansi pelaksana/PD, indikator capaian masing-masing program serta pagu indikatifnya. Bab ini menampilkan tabel yang menjabarkan Urusan Pemerintahan Daerah, PD pelaksana, Program dan pagu indikatif program pada RKPD Perubahan Tahun 2021.

Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat tentang indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2021

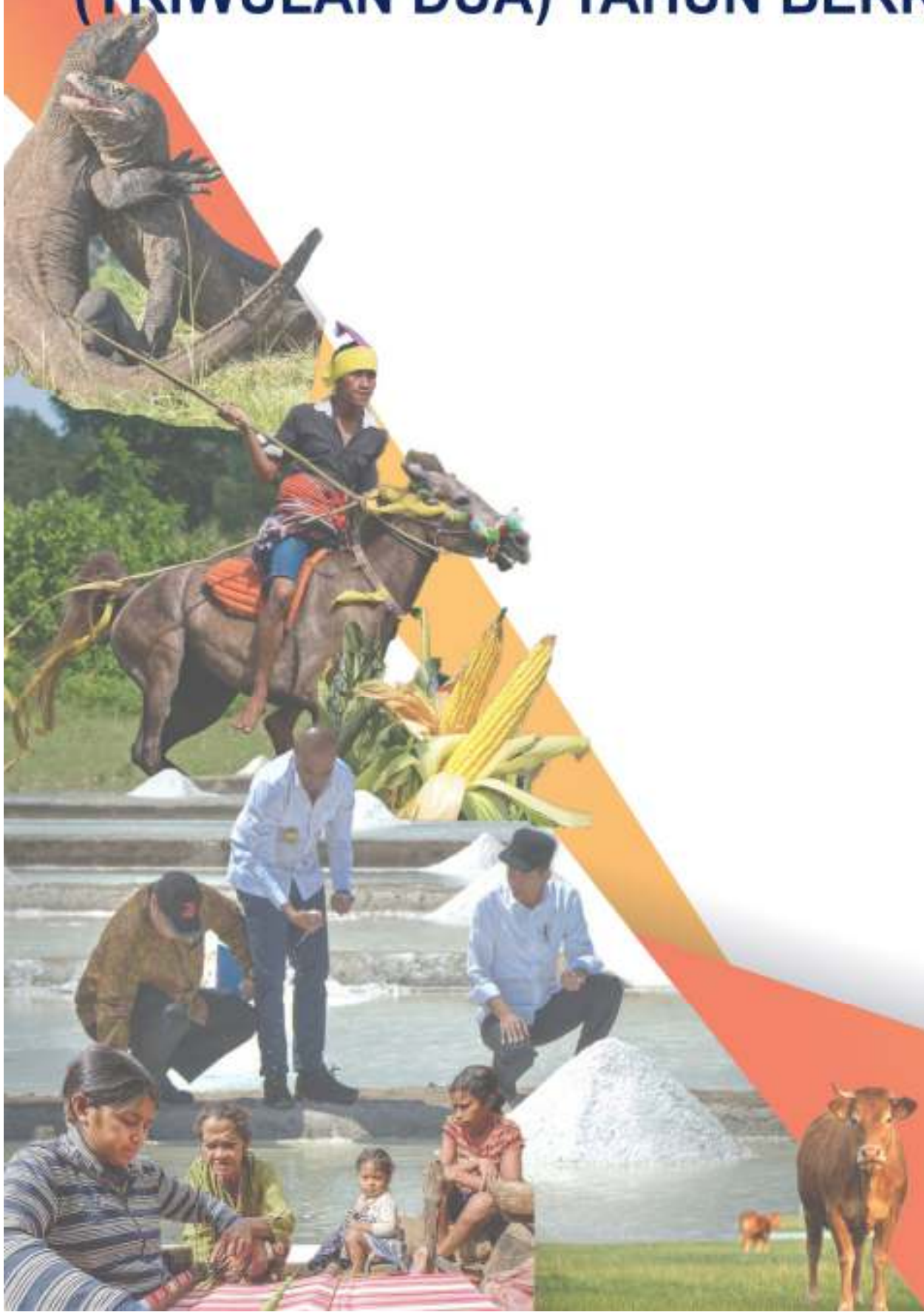
Bab VII. Penutup

Bab ini menguraikan tentang arahan Gubernur, penegasan dalam menerapkan RKPD Perubahan Tahun 2021, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RKPD Perubahan Tahun 2021 sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2021.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II

(TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 telah memasuki triwulan II, yang sekaligus juga merupakan tahun kedua didalam pelaksanaan pada masa pandemi *Covid-19* yang melanda. Beberapa kebijakan yang dilakukan selama Pandemi *Covid-19* adalah :

1. Implementasi kebijakan *physical distancing* dan pembatasan aktivitas di luar rumah (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro/PPKM) dan Pelaksanaan Vaksinasi untuk menuju terbentuknya *herd immunity* sehingga dapat memulihkan aktivitas masyarakat.
2. Penutupan PLBN mulai 20 Maret 2020 sesuai Instruksi Gubernur NTT Nomor BU.443/02/BPP/2020 tentang Pembatasan Akses Bagi WNI dan WNA Pelintas Batas di PLBN Terpadu dan Pos Lintas Batas di Wilayah Provinsi NTT tanggal 16 Maret 2020 dan SE Satgas Penanganan *Covid-19* Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Covid-19*.
3. Implementasi kebijakan penutupan destinasi wisata dan penundaan even yang melibatkan banyak orang sejak Maret 2020.
4. Menurunnya kunjungan wisatawan.
5. Melarang restoran/rumah makan memberikan layanan di tempat.
6. Kebijakan pelayanan moda transportasi laut dan udara mengangkut penumpang (kecuali kriteria tertentu) serta pelayanan angkutan darat yang mengutamakan penerapan protokol *Covid* secara ketat.
7. Menurunnya ekspor dan impor barang salah satunya melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi yang menyatakan bahwa Sumber Daya Material Konstruksi (SDMK) dan Sumber Daya Peralatan Konstruksi (SDPK) harus mengoptimalkan produk dalam negeri.

8. Pemotongan Dana Transfer dari Pusat.
9. Menurunnya PAD.
10. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memprioritaskan sementara pengadaan barang dan jasa / tender proyek TA. 2021 untuk mendukung anggaran penanganan *Covid 19*.

Semua kebijakan ini akan berdampak pada pelambatan kinerja ekonomi, yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat.

Hal-hal inilah yang selanjutnya menyebabkan harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap target-target indikator yang telah ditetapkan, karena semua input (anggaran) yang telah dialokasikan telah dilakukan *refocusing* untuk penanganan *Covid 19*.

RKPD Perubahan 2021 ini menyesuaikan kembali berbagai program kegiatan beserta anggaran yang disediakan untuk mencapai berbagai indikator dan target yang telah ditetapkan, dengan didasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2021.

2.1.1 Capaian Kinerja Makro Daerah tahun 2021

Pembangunan Daerah Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk mencapai Visi “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi , yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*).
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2021 disusun dengan mempedomani RPJMD 2018-2023 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2019 serta memperhatikan RKP 2021.

Mempedomani arah kebijakan RPJMD 2018-2023, maka RKPD 2021 menetapkan tema “*Pemulihan Ekonomi melalui Sektor*

Pariwisata dan Pertanian serta Memperkuat Sistem Kesehatan Daerah”.

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2021 sesuai RKPD diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD 2018-2023, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows programme*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPJMD.

Pendekatan penyusunan RKPD 2021, secara proses dilakukan melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2021 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistik mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan. Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kegiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah.

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2021 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Daerah (PD). Prioritas Daerah kemudian disinergikan dalam 34 Proyek Prioritas Strategis (*Major Project/MP*).

Tujuh prioritas daerah untuk tahun 2021, yaitu :

1. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting;
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
3. Lingkungan hidup, Perubahan Iklim & Kerentanan Bencana;

4. Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata;
5. Pemantapan Infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi;
6. Peningkatan Aksesibilitas & Kualitas Layanan Bidang Pendidikan & Kesehatan; dan
7. Reformasi Birokrasi.

Tujuh prioritas daerah dimaksud selanjutnya secara operasional akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah sehingga indikator makro pembangunan untuk tahun 2020 dapat dicapai.

Pencapaian indikator makro daerah secara umum menunjukkan hasil yang baik, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Makro Daerah Tahun 2018-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			
			2018	2019	2020	2021 TW.I*
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	5,24	-0,83	0,12
2	Angka kemiskinan	%	21,03	20,62	21,21	20,99
3	Inflasi	%	3,07	0,67	0,78	0,63
4	IPM	poin	64,39	65,23	65,19	65,19
5	Usia Harapan Hidup	tahun	66,38	66,85	67,01	67,01
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,30	7,55	7,63	7,63
7	TPT	%	3,01	3,35	4,28	3,38
8	Indeks Gini	poin	0,351	0,356	0,356	0,346

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2021

*) Berita Resmi Statistik NTT Kondisi sampai dengan Juli 2021

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2021 tumbuh 0,12% (y.o.y), lebih rendah dibandingkan Triwulan IV Tahun 2020 yang mencapai 5,49%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi ke level -0,83%, sangat menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,11% dan di tahun 2019 yaitu 5,24%. Pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2020 yang mengalami kontraksi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mengalami kontraksi hingga -2,07%. Tingginya

tingkat kontraksi pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi *Covid 19*.

Angka kemiskinan menurun dari 21,03% keadaan September 2018 menjadi 20,62% keadaan September 2019 dan mengalami kenaikan menjadi 21,21% pada September tahun 2020, kemudian pada kondisi Maret 2021 turun menjadi 20,99% atau sebesar 0,22% poin terhadap kondisi September 2020.

Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan dari 64,39 poin pada tahun 2018 menjadi 65,23 poin pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 65,19 poin. Capaian komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan, yaitu usia harapan hidup dari 66,38 tahun pada 2018 menjadi 66,85 pada tahun 2019 dan 67,01 pada tahun 2020. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,30 tahun pada 2018 menjadi 7,55 tahun pada 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 7,63 tahun.

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang menunjukkan jumlah angkatan kerja, dimana mengalami peningkatan dari 3,01 pada tahun 2018 menjadi 3,35 pada tahun 2019 dan 4,28 persen pada tahun 2020, kemudian pada kondisi Februari 2021 mengalami penurunan sebesar 0,90 % poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Terdapat 308,04 ribu orang (7,84% penduduk usia kerja) yang terdampak *Covid 19*.

Indeks Gini mengalami sedikit peningkatan tahun 2018 sebesar 0,351 menjadi 0,356 pada tahun 2019 dan 2020 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat kota dan desa relatif tidak berbeda signifikan. Pada Maret 2021 Indeks Gini sebesar 0,346 mengalami penurunan 0,010 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2020.

2.1.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan kondisi bulan Juni 2021 maka dapat disimpulkan bahwa kondisi Provinsi Nusa

Tenggara Timur khususnya dan Indonesia umumnya masih belum lepas dari cengkeraman pandemi *Covid 19*. Karena sejak tahun 2020, negara-negara di dunia termasuk Indonesia merasakan dampak pandemi *Covid 19*. Pandemi *Covid-19* telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga cukup besar dengan terganggunya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan akumulasi secara nasional.

Hal ini diperparah lagi dengan bencana dahsyat yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur akibat dilanda badai siklon Seroja (Siklon Tropis 99S) yang memporak-porandakan beberapa wilayah Kabupaten/Kota yang menimbulkan kerugian materi serta korban jiwa yang terjadi pada awal bulan April 2021.

Dampak yang langsung dirasakan juga adalah harus dilakukannya *refocusing* dan penyesuaian kembali berbagai target indikator kinerja program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan pada RKPD Induk tahun 2021. Hal ini akan yang akan ditampung dalam RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. RKPD Perubahan Tahun 2021 yang telah disusun ini disinkronkan dengan kebijakan nasional dan juga kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD Induk Tahun 2021 yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2021, serta melakukan penyesuaian dengan adanya *refocussing* akibat pandemic *Covid 19* sekaligus menyinergikannya.

Pencapaian pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun 2021 diketahui dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, apakah target yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan dengan target yang telah ditetapkan, kemudian bila ada permasalahan dapat diantisipasi dan diambil tindakan sedini mungkin.

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021, maka Bappelitbangda Provinsi NTT telah melakukan penyampaian Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD. Sedangkan penyampaian laporan dilakukan secara offline maupun melalui Aplikasi *E-monev performance* dengan Link URL : <http://apps.bappelitbangda.nttprov.go.id/e-kinerja>.

Penyampaian laporan baik secara online maupun offline telah melalui pelatihan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya maupun dengan penjelasan cara pengisian Format Evaluasi menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, pada lampiran surat yang dikirimkan oleh Bappelitbangda kepada seluruh PD.

Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan dari seluruh PD lingkup pemerintah Provinsi NTT dilakukan terhadap 39 PD yang menyampaikan laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) PD melalui Aplikasi *E-monev performance* (Kondisi Laporan yang disampaikan ke Bappelitbangda Provinsi NTT s/d tanggal 31 Juni 2021).

Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, terdapat berbagai Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 5 Misi Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Keseluruhan Program Pembangunan Daerah, dijabarkan dalam RKPD 2021 secara lebih konkret menurut 5 (lima) misi

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut:

1. Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive*) yakni melibatkan semua pihak (*shareholders*) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

2. Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)

NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

3. Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar

mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

5. Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT.

Pencapaian Program Pembangunan diatas, diukur dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan pada RKPD Provinsi Tahun 2021 menurut 5 Misi Pembangunan Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh 39 PD, yaitu :

- MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil terdiri dari 63 kegiatan dan dilaksakan oleh 15 Perangkat Daerah;
- MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*) terdiri dari 7 kegiatan oleh 15 Perangkat Daerah
- MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan terdiri dari 10 kegiatan oleh 4 Perangkat Daerah
- MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terdiri dari 23 kegiatan oleh 5 Perangkat Daerah
- MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdiri dari 31 kegiatan oleh 15 Perangkat Daerah

Terdapat 15 PD yang melaksanakan program/kegiatan untuk pelaksanaan lebih dari satu Misi yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas

PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Berikut ini disampaikan Tingkat Capaian Realisasi Anggaran perprogram yang dilaksanakan oleh 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021 Keadaan Triwulan II:

Tabel 2.2
Capaian Realisasi Anggaran
39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021
Keadaan Triwulan II

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Biro Administrasi Pimpinan	5.099.928.660	1.314.114.950	25,77%
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.807.724.531.517	814.753.080.970	29,02%
3	Dinas Kesehatan	194.853.968.230	33.376.000.945	17,13%
4	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	279.053.296.621	89.113.697.678	31,93%
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.516.293.696.094	0	0,00%
6	Satuan Polisi Pamong Praja	16.403.217.311	8.292.670.636	50,56%
7	Dinas Sosial	29.653.689.757	6.185.237.182	20,86%
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.358.531.820	571.686.152	5,52%
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99.103.075.888	0	0,00%
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	46.189.931.598	11.761.348.681	25,46%
11	Dinas Perhubungan	38.293.163.362	13.605.483.297	35,53%
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.837.226.124	0	0,00%
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	36.053.649.381	10.041.732.855	27,85%
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.591.465.717	4.292.288.134	37,03%
15	Dinas	23.600.960.384	7.420.683.558	31,44%

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Kepemudaan dan Olahraga			
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	19.247.626.847	6.445.978.297	33,49%
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	230.588.894.910	20.317.249.304	8,81%
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	32.666.978.063	6.193.591.841	18,96%
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	184.682.319.797	25.398.805.233	13,75%
20	Dinas Peternakan	145.190.043.492	4.860.569.781	3,35%
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18.445.913.728	6.702.187.612	36,33%
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.600.489.081	5.503.481.378	23,32%
23	Inspektorat Daerah	26.140.596.261	0	0,00%
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	31.601.735.270	7.126.232.127	22,55%
25	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	126.056.586.960	34.377.788.429	27,27%
26	Badan Keuangan Daerah	970.287.776.152	123.532.427.751	12,73%
27	Badan Kepegawaian Daerah	20.180.775.519	10.692.865.680	52,99%
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	37.433.978.628	11.689.237.936	31,23%
29	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	6.057.625.100	1.569.786.342	25,91%
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.970.156.082	900.899.339	15,09%
31	Biro Umum	108.502.358.049	43.605.332.263	40,19%
32	Biro Hukum	2.229.178.620	1.078.201.480	48,37%
33	Biro Organisasi	2.203.615.852	581.740.917	26,40%
34	Biro Pemerintahan	2.188.025.260	932.911.493	42,64%
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.591.680.714	0	0,00%
36	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	131.192.353.647	48.325.239.712	36,84%
37	Biro Ekonomi Dan Administrasi Pembangunan	1.902.441.459	551.478.890	28,99%
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.022.288.207	803.193.020	10,01%
39	Badan	11.318.178.139	3.217.459.613	28,43%

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Penanggulangan Bencana Daerah			
	Total	7.281.411.948.301	1.365.134.683.476	18,75%

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian anggaran dari 39 Perangkat Daerah pada Triwulan II ini rata-rata masih di kisaran **21,36%** dengan predikat Sangat Rendah (SR). Sedangkan total realisasi anggaran baru sebesar Rp. **1.365.134.683.476** atau **18,75%** dari total anggaran sebesar Rp. **7.281.411.948.301**. Berapa hal yang menjadi penyebabnya adalah adanya refocussing anggaran dan masih terdapat 5 (lima) PD tidak melaporkan realisasi capaian anggaran sampai dengan laporan ini diturunkan. PD yang belum melaporkan realisasi capaian anggaran APBD sampai dengan Triwulan II, adalah :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT
3. Inspektorat Daerah Provinsi NTT
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT

Tabel 2.3
Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI (ST)
76% ≤ 90%	TINGGI (T)
66% ≤ 75%	SEDANG (S)
51% ≤ 65%	RENDAH (R)
≤ 50%	SANGAT RENDAH (SR)

Skala Intensitas kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja yang telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2) Hasil Sedang

Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal

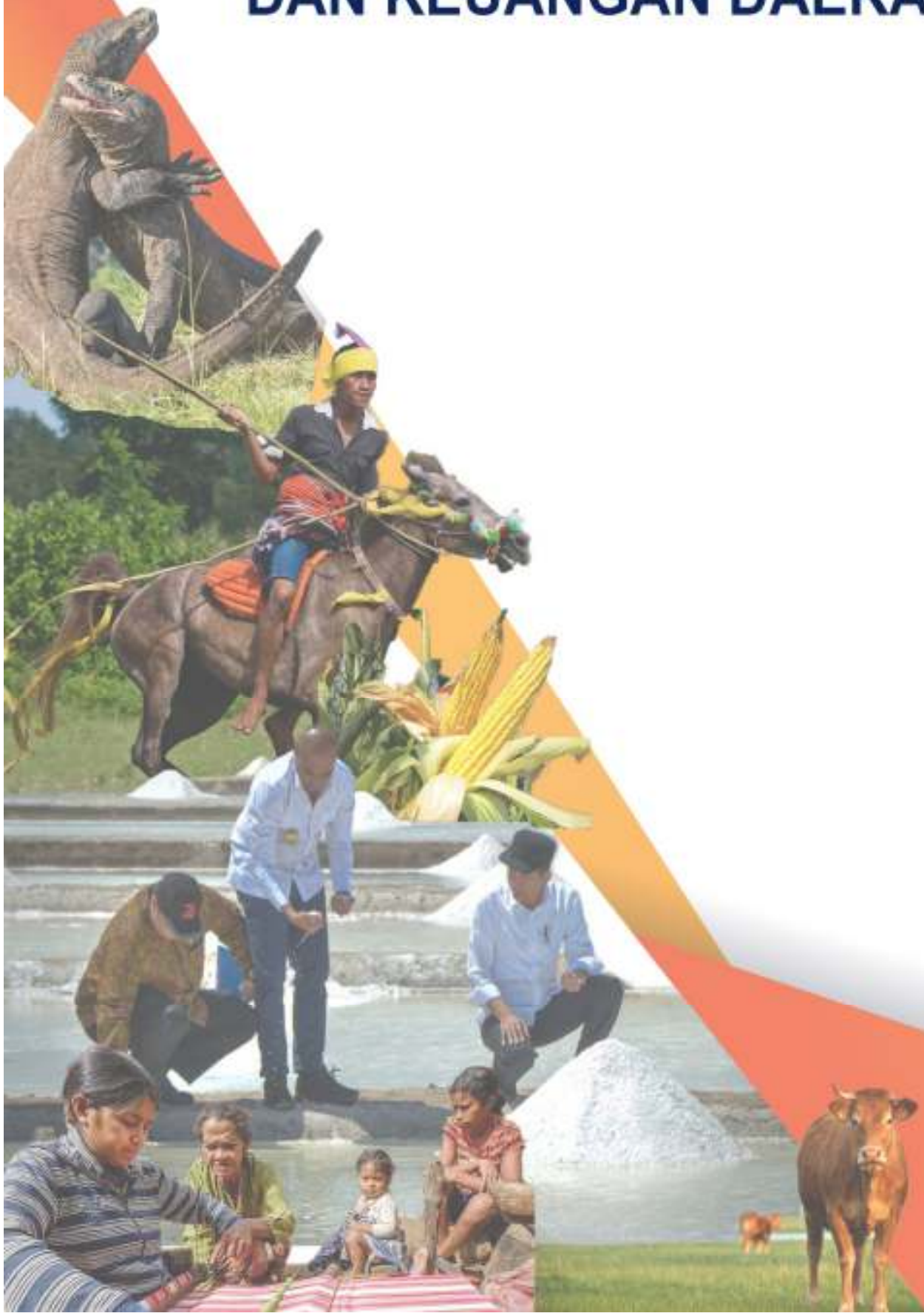
3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah.

Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI

DAN KEUANGAN DAERAH



3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rumusan rencana Kebijakan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 merupakan implementasi tahun ketiga dari RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023, dan dengan memperhatikan arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari RKP Tahun 2021.

Dalam RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, arah pembangunan tahun 2021 adalah “Perubahan Struktur Ekonomi menuju pada Industri dan Jasa berbasis Pertanian”. Prioritas Pembangunan daerah pada tahun rencana 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sinergitas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lintas Pemangku Kepentingan
2. Peningkatan perencanaan sumber daya air untuk kebutuhan pertanian dan air bersih
3. Peningkatan industri pertanian, perikanan dan peternakan
4. Interkoneksi jaringan distribusi produk daerah dan jaringan pariwisata *Ring of Beauty*

Secara umum arahan ekonomi daerah Nusa Tenggara Timur di tahun rencana dipusatkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan dan cepat tumbuh yang dimotori sektor pariwisata daerah sebagai *Prime mover*.

Dengan memperhatikan proses perencanaan dengan pola pendekatan THIS untuk NTT Bangkit melalui upaya strategis ekonomi hijau antara lain:

- a. Pengembangan pariwisata sebagai *prime mover* ekonomi (*ring of beauty*) dengan pengembangan wilayah 4 (empat) Destinasi Wisata yaitu Kelaba Maja (Sabu Raijua), Wae Rebo (Manggarai Timur), Fatunausus (TTS), dan Hasan Maubesi (Malaka).
- b. Fokus pertumbuhan 7 (tujuh) destinasi wisata pada tahun 2019.

Sedangkan, pendekatan THIS untuk NTT Sejahtera, yang hendak dicapai adalah menurunkan penduduk miskin menjadi 21% dengan basis data terpadu *by name by address* melalui langkah nyata yaitu:

- a. Kemiskinan dan Stunting, difokuskan pada 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
- b. Lokasi Desa Prioritas/Model terdiri dari 344 Desa model di 22 Kabupaten/Kota.

Pada saat yang sama pengembangan industri pertanian, perikanan dan peternakan melalui Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) di dorong untuk tumbuh agar dapat memberi nilai tambah pada komoditi pangan daerah dan memberi daya dorong terhadap upaya pemerintah membuka lapangan kerja baru dan menekan angka pengangguran. Pada gilirannya diharapkan pendapatan masyarakat akan tumbuh dan konsumsi rumah tangga meningkat dan memberi stimulus bagi berkembangnya makin banyak usaha-usaha produktif masyarakat.

Namun demikian, Pandemi *Covid 19* menyebabkan berbagai rencana yang telah ditetapkan tersebut harus disesuaikan kembali, karena berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah, sebagaimana telah diuraikan di bab sebelumnya mengakibatkan menurunkan kinerja perekonomian terutama pada sektor swasta yang lebih banyak menunggu sambil melihat perkembangan ke depan. Hal ini berakibat pada realisasi investasi terutama investasi swasta menurun, perdagangan melemah, produksi barang dan jasa menurun, pasar nasional maupun internasional lesu.

3.1.1 Evaluasi Kondisi Pembangunan Ekonomi Nusa Tenggara Timur.

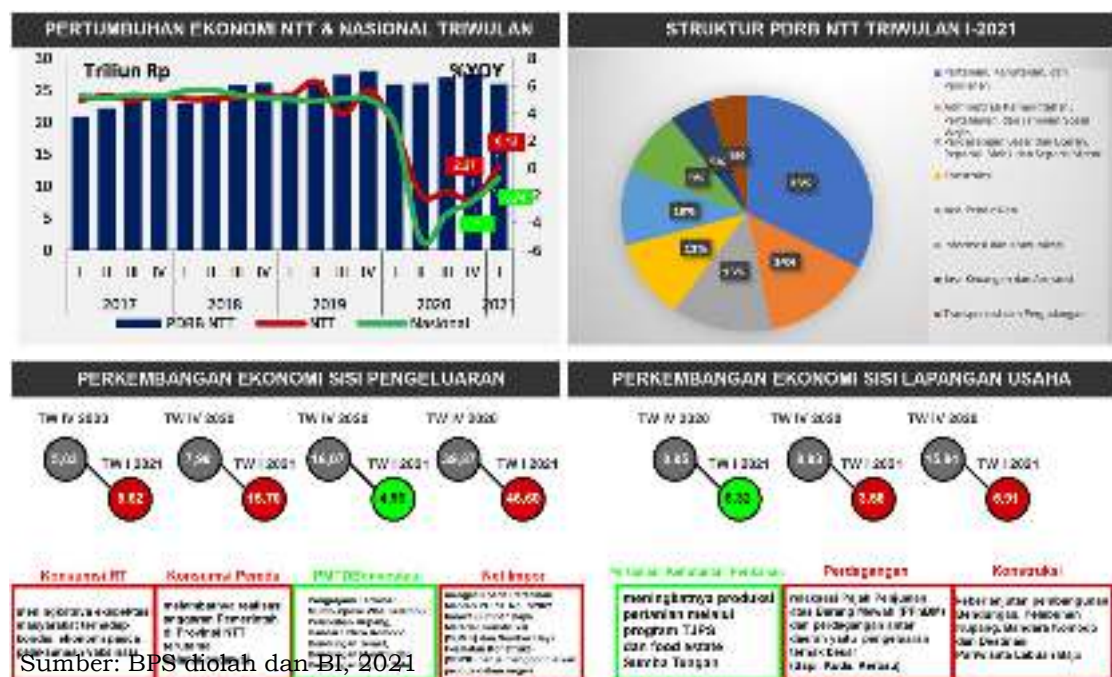
Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan I 2021 tumbuh 0,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,27% (y.o.y) dan juga lebih rendah dari pencapaian nasional.

Vaksinasi yang telah dimulai sejak awal tahun mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha. Dari sisi pengeluaran, pemulihan bersumber dari investasi dan konsumsi swasta. Dari sisi Lapangan Usaha, perbaikan ekonomi terutama bersumber dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan sektor utama. Kinerja perekonomian NTT pada triwulan II 2021 diperkirakan terus melanjutkan tren pemulihan. Upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* melalui vaksinasi serta

momen Hari Besar Keagamaan berpotensi semakin mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha serta meningkatkan mobilitas.

Sedikit menggembarakan bahwa pada triwulan I 2021 ini, beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan ekonomi positif sedangkan pada sisi pengeluaran pertumbuhan negatif (kontraksi) terjadi pada semua komponen pengeluaran.

Gambar 3.1
Outlook Perekonomian Nusa Tenggara Timur



Pertumbuhan positif dan negatif ini mempengaruhi kinerja perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat dilihat dari sisi pengeluaran dan sisi lapangan usaha sebagai berikut:

1. Perkembangan ekonomi dari sisi pengeluaran antara lain:
 - a. Untuk konsumsi pada triwulan I 2021, kinerja konsumsi Provinsi NTT secara agregat (rumah tangga, pemerintah, dan Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) terkontraksi sebesar 5,62% (y.o.y) lebih dalam dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang terkontraksi 5,03% (y.o.y). Dimana, perbaikan kinerja konsumsi Rumah Tangga didorong oleh meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi pasca pelaksanaan vaksinasi. Selain itu juga, membaiknya konsumsi rumah tangga juga

- terkonfirmasi dari peningkatan konsumsi listrik serta pengeluaran masyarakat di Provinsi NTT.
- b. Pada sisi Konsumsi pemerintah pada triwulan I 2021 berkontraksi sebesar 15,74% (y.o.y), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan IV 2020 sebesar 7,99% (y.o.y). Menurunnya kinerja konsumsi pemerintah akibat melambatnya realisasi anggaran Pemerintah di Provinsi NTT (APBN, APBD Provinsi NTT dan APBD 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT) di triwulan I 2021 terutama belanja pegawai dengan realisasi belanja pegawai hanya 8,12% dari total anggaran. Akan tetapi, kinerja konsumsi Provinsi NTT pada triwulan II 2021 diperkirakan membaik terutama bersumber dari konsumsi rumah tangga seiring meningkatnya optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi pasca vaksinasi dan pelaksanaan Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baik berupa perlindungan sosial (PKH, Kartu Sembako BST, BLT dana desa, kartu prakerja) dan program padat karya diharapkan mampu menopang daya beli masyarakat di triwulan II 2021.
 - c. Kinerja ekonomi Provinsi NTT triwulan II 2021 berpotensi tertahan akibat badai Seroja dan berlanjutnya PPKM di beberapa Kabupaten/Kota. Badai siklon tropis Seroja pada April 2021 melanda 21 Kabupaten/Kota di NTT, sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur termasuk perumahan warga. Diperkirakan sebanyak 65,935 rumah mengalami kerusakan dan korban jiwa sebanyak 181 orang. Timbulnya korban jiwa dan kerusakan aset berpotensi menurunkan daya beli masyarakat akibat kehilangan sumber pendapatan atau penurunan nilai kekayaan. Sementara itu, berlanjutnya PPKM berpotensi menahan mobilitas masyarakat untuk meningkatkan konsumsi.
 - d. Pada sisi Investasi, pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB/investasi) pada triwulan I 2021 berkontraksi 4,96% (y.o.y), membaik dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang berkontraksi 16,07% (y.o.y). Perbaikan kontraksi kinerja investasi didorong

oleh meningkatnya realisasi belanja modal baik APBN dan APBD di Provinsi NTT untuk pengerjaan Proyek Strategis Nasional antara lain Terminal Multipurpose Wae Kelambu (Labuan Bajo), Pelabuhan Kupang (Kota Kupang), Bandar Udara Komodo (Labuan Bajo), Bendungan Temef (Timor Tengah Selatan), Bendungan Manikin (Kabupaten Kupang), dan Bendungan Napun Gete (Sikka). Membaiknya investasi juga tercermin dari realisasi pengadaan semen di Provinsi NTT yang menunjukkan perbaikan dari -28,78% (y.o.y) pada triwulan IV 2020 menjadi -2,98% (y.o.y) pada triwulan I 2021.

- e. Meningkatnya realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi NTT sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong sektor strategis seperti pertanian dan peternakan, serta pengembangan infrastruktur melalui pengembangan potensi baru sebagai sumber pendapatan daerah. Secara spasial, realisasi PMDN terbesar terdapat di Kabupaten Sumba Timur yang mencapai Rp186,7 miliar (32%).
- f. Dari sisi Ekspor dan Impor, pada triwulan I 2021, ekspor luar negeri Provinsi NTT berkontraksi 43,80% (y.o.y), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan IV 2020 dengan kontraksi sebesar 32,73% (y.o.y). Hal ini disebabkan oleh penurunan ekspor ke negara India dan Timor Leste. Komoditas ekspor utama Provinsi NTT didominasi kelompok buah-buahan, terutama mete dengan pangsa 36,94%. Pembatasan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) baik melalui PLBN dan penutupan sementara kunjungan WNA ke Indonesia juga mempengaruhi kontraksi ekspor luar negeri Provinsi NTT di sektor jasa pariwisata. Pada triwulan I 2021, jumlah kedatangan wisman Provinsi NTT berkontraksi 99,85% (y.o.y), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang mencapai 99,79% (y.o.y). Sedangkan, impor luar negeri Provinsi NTT pada triwulan I 2021 masih berkontraksi sebesar

46,60% (y.o.y) dibandingkan Triwulan IV 2020 sebesar 39,87% (y.o.y).

2. Perkembangan ekonomi dari sisi Lapangan Usaha antara lain:

- a. Kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan I 2021 mencapai 8,32% (y.o.y), dan merupakan kinerja tertinggi selama lima tahun terakhir jika dibandingkan dengan Triwulan IV 2020 hanya sebesar 0,95%. Tingginya kinerja sektor ini dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi pada masa tanam Oktober 2020 – Maret 2021 di tengah upaya Pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian melalui program TJPS dan *food estate* Sumba Tengah dimana realisasi luas tanam periode Oktober – Desember 2020 komoditas padi dan jagung tumbuh masing-masing sebesar 51% (y.o.y) dan 74,8% (y.o.y). Tingginya realisasi tanam tersebut didorong oleh program TJPS Pemerintah Provinsi NTT (realisasi 9.573 Ha) dan program *food estate* di Sumba Tengah (5.000 ha). Luas panen tanaman padi pada triwulan laporan sebesar 63,5% (y.o.y), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2020 sebesar 16,8% (y.o.y). Perbaikan kinerja pertanian sejalan dengan NTP triwulan I 2021 khususnya sub sektor tanaman pangan padi-palawija dan hortikultura yang mengalami kenaikan sehingga masing-masing menjadi 95,65 dan 100,22.

Walupun demikian, bencana Siklon Tropis Seroja (Siklon Tropis 99S) berpotensi menahan kinerja sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan lebih tinggi. Pasca-badai, kerusakan lahan sub sektor tanaman bahan makanan mencapai 23,5 ribu Ha padi dan 13,96 ribu Ha jagung yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Badai tersebut juga menyebabkan kerusakan infrastruktur pertanian dan jaringan irigasi di Provinsi NTT. Pada sub sektor peternakan terdapat 45,1 ribu ekor ternak hilang (terdiri dari 14 ribu ternak besar dan 31,1 ribu ternak kecil). Sedangkan di sub sektor perikanan, sebanyak 602 kapal mengalami kerusakan berat (537 unit memiliki kapasitas 1-10GT

dan 65 unit memiliki kapasitas 10-30 GT) dan kerusakan rumput laut.

- b. Pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tercatat tumbuh membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan kontraksi sebesar 3,58% pada Triwulan I 2021 jika dibandingkan dengan Triwulan IV 2020 dengan kontraksi sebesar 8,93%. Kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang berlaku mulai 1 Maret 2021, secara bertahap meningkatkan permintaan kendaraan bermotor. Pertumbuhan ektor ini dipicu juga oleh perdagangan antar daerah yaitu pengeluaran ternak besar (Sapi, Kuda, Kerbau) pada triwulan I sebesar 40% (y.o.y), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2020 sebesar 31% (y.o.y).
- c. Kinerja Lapangan Usaha Konstruksi pada triwulan I 2021 terkontraksi sebesar 5,91% (y.o.y), lebih baik jika dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang terkontraksi 15,84% (y.o.y). Hal ini dipengaruhi oleh keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada triwulan I 2021 antara lain Bendungan Temef (Kab. Timor Tengah Selatan), Bendungan Manikin (Kab. Kupang), Pelabuhan Kupang (Kota Kupang), Multipurpose Labuan Bajo (Kab. Manggarai Barat), Bandara Komodo (Kab. Manggarai Barat), dan juga Bendungan Napun Gete (Kab. Sikka) yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Februari 2021. Di samping itu, proyek pengembangan Destinasi Super Prioritas Pariwisata Labuan Bajo baik infrastruktur (jalan, bandara Komodo, pelabuhan multipurpose, pengolahan air) serta penataan kawasan wisata menjadi faktor pendorong sektor konstruksi secara keseluruhan.

Pada triwulan II 2021, akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT diprakirakan terus berlanjut seiring meningkatnya optimisme pelaku usaha dan masyarakat. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh konsumsi RT, investasi dan konsumsi Pemerintah. Meningkatnya konsumsi RT seiring meningkatnya optimisme pada momen Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada bulan Mei 2021 dan

vaksinasi yang terus berlanjut. Meningkatnya investasi sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Program Strategis Nasional (PSN) berupa jalan dan bendungan, serta pengembangan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo. Dari sisi LU, pertumbuhan diperkirakan bersumber dari LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Jasa Pendidikan, dan LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Akan tetapi, badai siklon tropis Seroja yang melanda Provinsi NTT serta berlanjutnya pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Kupang dan Sumba Timur berpotensi menahan kinerja perekonomian Provinsi NTT.

3.1.2 Inflasi

Inflasi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 sangat rendah sebesar 0,63% jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu 4,92% pada tahun 2015, menjadi 2,48% pada tahun 2016, lalu menjadi 2,00% pada tahun 2017, dan selanjutnya tahun 2018 menjadi 3,07% dan Tahun 2020 sebesar sebesar 0,78%.

Faktor inflasi disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada 7 (tujuh) dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran di Nusa Tenggara Timur. Selain itu juga terdapat *upside* dan *downside* factor penyebab inflasi sebagai berikut:

- *Upside Factors*, dipengaruhi oleh : a) kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok dengan rerata tertimbang sebesar 35% dimulai pada Bulan Januari 2020. Hal ini disebabkan cukai rokok tahun sebelumnya tidak mengalami kenaikan, dan b) resiko inflasi komoditas kelompok bahan makanan yang disebabkan, antara lain karena terganggunya produktivitas pertanian karena faktor musim, gelombang tinggi yang menghambat penangkapan ikan, serta terganggunya distribusi komoditas bahan makanan yang diperoleh dari luar Nusa Tenggara Timur.
- *Downside Factors*, dipengaruhi oleh : a) Pandemi *Covid 19* menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat, yang berakibat pada berkurangnya daya beli masyarakat. Implementasi kebijakan *physical distancing* dan pembatasan

aktivitas masyarakat di luar rumah (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro/PPKM); b). Badai Siklon Seroja (Siklon Tropis 99S) pada awal April 2021 berpotensi meningkatkan tekanan inflasi pada tahun 2021 disebabkan oleh kerusakan lahan pertanian, kematian binatang ternak, kerusakan kapal tangkap, dan kerusakan pabrik bahan makanan seperti tahu dan tempe.

3.1.3 Proyeksi Kondisi Pembangunan Ekonomi Nusa Tenggara Timur.

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2021 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0.83% (y.o.y). Kinerja Perekonomian Provinsi NTT pada tahun 2021 ditopang oleh peningkatan investasi, perbaikan kinerja konsumsi masyarakat, serta percepatan peran fiskal sebagai *countercyclical*. Dari sisi Lapangan Usaha pertumbuhan diperkirakan didorong oleh Lapangan Usaha utama kecuali Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang sedikit tertahan akibat dampak dampak badai siklon Seroja.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kinerja pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur pada semester kedua tahun 2021 ini sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dihadapi akibat *Covid 19*. Perlambatan ekonomi yang terjadi pada triwulan I 2021, akan tetapi pada triwulan II 2021 sampai pada triwulan IV 2021 akan membaik seiring meningkatnya optimisme pelaku usaha dan masyarakat dengan diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru dan pelonggaran *phicycal distancing* serta vaksinasi untuk menekan penyebaran *Covid-19* menuju terbentuknya *herd immunity* sehingga dapat memulihkan aktivitas masyarakat.

Asumsi pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur bergerak lambat ditengah mewabahnya pandemic *Covid-19* yang berdampak signifikan bagi tingkat konsumsi masyarakat dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional NTT maupun Nasional. Berkurangnya aktifitas produksi masyarakat akan mengurangi nilai tambah produksi, serta menurunkan daya beli

masyarakat. Sektor ekonomi yang diperkirakan terdampak adalah sektor pertanian industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi, konsumsi rumah tangga, investasi, konstruksi, net impor, serta akomodasi dan makan. Selain itu adanya kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian Pembelanjaan Dana Alokasi Khusus, Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA. 2021 yang difokuskan untuk penanganan covid-19, akan mengurangi belanja pemerintah untuk pembentukan modal Bruto dan pengeluaran untuk Perubahan Inventori baru. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 diproyeksikan meningkat berada pada kisaran 3,18% – 4,18%, sedangkan inflasi diperkirakan sebesar 2,1% – 3,1%.

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2020 (*Covid 19*), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, dan refocusing anggaran sesuai dengan Permenkeu No.17/PMK.07/2021 dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* dan migrasi ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maka Perubahan RKPD Tahun 2021 dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;
2. Adanya upaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal;
 - b. penurunan Pendapatan Asli Daerah sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau

- c. perkembangan tingkat pandemi *Covid-19* di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;
3. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan/penanganan *Covid-19*, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah;
4. Perubahan RKPD menampung berbagai kebijakan yang dilakukan sebagai dampak penanganan pandemi *Covid-19* dan menampung catatan hasil pertanggung jawaban keuangan TA. 2020;
5. Pembangunan infrastruktur jalan provinsi melalui mekanisme pinjaman daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman serta melalui persetujuan DPRD Provinsi NTT;
6. Penambahan kegiatan dilakukan secara selektif untuk hal yang penting dan berdampak pada optimalisasi pencapaian indikator dan target RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023;

Dengan demikian, Struktur Anggaran RKPD Perubahan Tahun 2021 sebagaimana terlihat berikut.

Tabel 3.1
Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.033.518.433.142	2.033.518.433.142	0
4.1.01	Pajak Daerah	1.533.442.229.906	1.533.442.229.906	0
4.1.02	Retribusi Daerah	205.774.614.333	205.774.614.333	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	94.348.316.130	94.348.316.130	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	199.953.272.773	199.953.272.773	0
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	4.182.128.447.000	4.124.996.650.000	(57.131.797.000)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.182.128.447.000	4.124.996.650.000	(57.131.797.000)
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	67.994.937.400	82.077.237.400	14.082.300.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	67.994.937.400	82.077.237.400	14.082.300.000
	Jumlah Pendapatan	6.283.641.817.542	6.240.592.320.542	(43.049.497.000)
5	BELANJA			
5,1	BELANJA OPERASI	5.013.582.925.198	4.935.694.405.732	(77.888.519.466)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.561.997.607.953	1.550.276.186.249	(11.721.421.704)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.551.161.659.889	1.418.435.134.207	(132.726.525.682)
5.1.03	Belanja Bunga	39.307.557.170	64.502.620.245	25.195.063.075
5.1.05	Belanja Hibah	1.808.722.980.430	1.870.651.364.220	61.928.383.790
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	52.393.119.756	31.829.100.811	(20.564.018.945)
5,2	BELANJA MODAL	1.858.994.304.311	1.952.079.857.154	93.085.552.843
5.2.01	Belanja Modal Tanah	850.000.000	2.390.000.000	1.540.000.000

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.261.685.911	171.796.588.776	71.534.902.865
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	428.790.271.942	297.728.297.077	(131.061.974.865)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.319.044.795.090	1.467.835.710.485	148.790.915.395
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.782.551.368	12.329.260.816	3.546.709.448
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.265.000.000	0	(1.265.000.000)
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	68.123.915.460	204.664.498.781	136.540.583.321
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	68.123.915.460	204.664.498.781	136.540.583.321
5,4	BELANJA TRANSFER	644.228.590.760	568.307.875.062	(75.920.715.698)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	611.228.590.760	537.307.875.062	(73.920.715.698)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	33.000.000.000	31.000.000.000	(2.000.000.000)
	Jumlah Belanja	7.584.929.735.729	7.660.746.636.729	75.816.901.000
	Total Surplus/(Defisit)	(1.301.287.918.187)	(1.420.154.316.187)	(118.866.398.000)
6	PEMBIAYAAN			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.711.064.158.187	1.765.154.316.187	54.090.158.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.593.947.937	67.795.985.937	(40.797.962.000)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.594.888.120.000	1.689.776.240.000	94.888.120.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.582.090.250	7.582.090.250	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.711.064.158.187	1.765.154.316.187	54.090.158.000
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	409.776.240.000	345.000.000.000	(64.776.240.000)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	145.000.000.000	145.000.000.000	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	264.776.240.000	200.000.000.000	(64.776.240.000)
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	409.776.240.000	345.000.000.000	(64.776.240.000)
	Pembiayaan Netto	1.301.287.918.187	1.420.154.316.187	118.866.398.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	7.994.705.975.729	8.005.746.636.729	11.040.661.000

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Prov. NTT, 2021

Sedangkan bila dilihat dari RKPD Induk Tahun 2021, maka struktur anggaran sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2. Dimana, anggaran total Belanja Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2021 adalah sebesar Rp7,994 triliun, tumbuh 19,52% (y.o.y) dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Sejalan dengan rencana penyelesaian berbagai proyek-proyek infrastruktur Pemerintah Provinsi NTT yang sempat tertunda di tahun sebelumnya. Rencana Pemerintah Provinsi NTT dalam mendapatkan pinjaman sebesar Rp1,5 triliun dari PT. SMI untuk proyek infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi juga turut menjadi faktor meningkatnya anggaran Total Belanja secara keseluruhan.

Tabel 3.2

Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Sesuai RKPD Induk Tahun 2021)

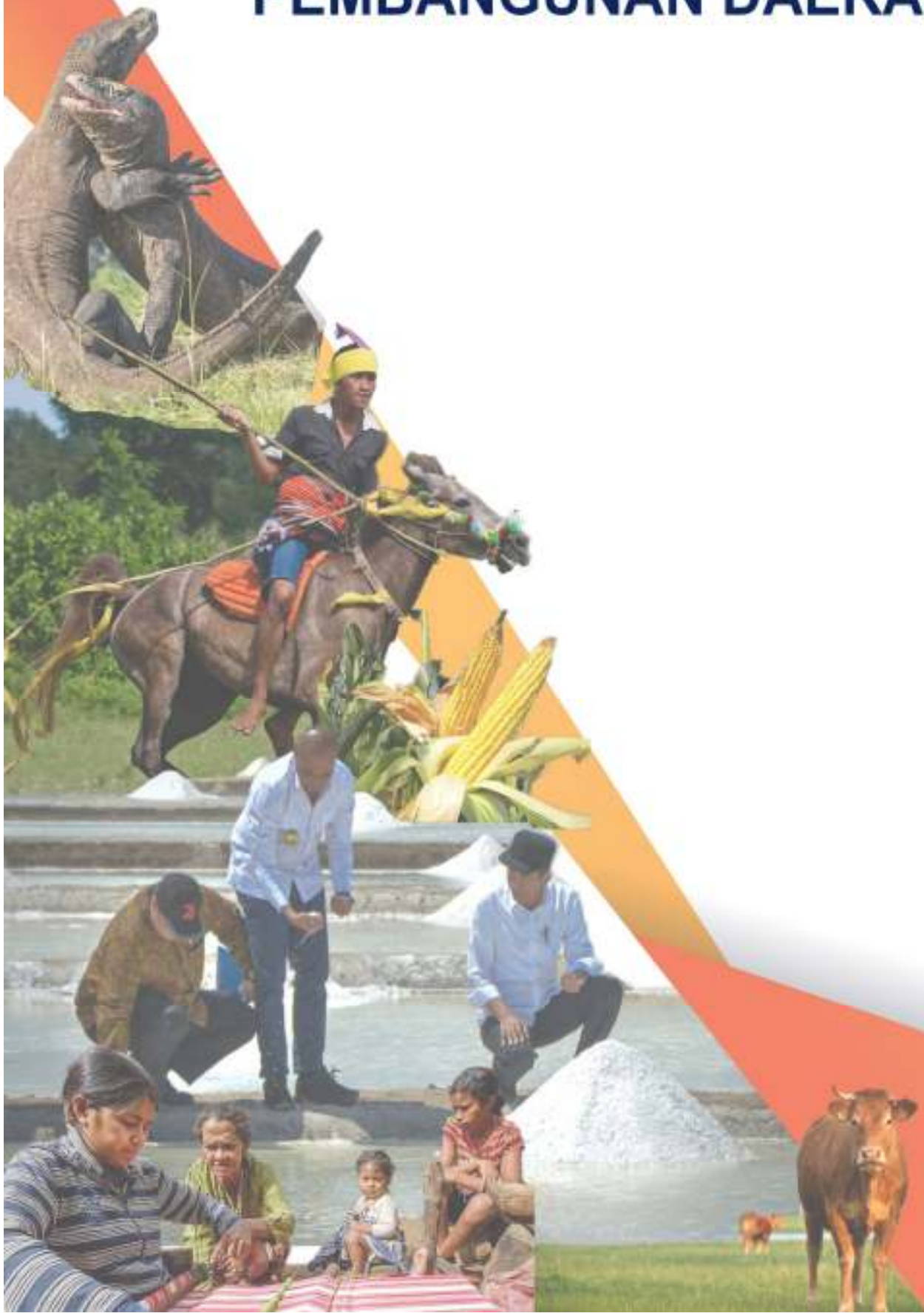
Kode	Uraian	RKPD		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.033.518.433.142	2.033.518.433.142	0
4.1.01	Pajak Daerah	1.533.442.229.906	1.533.442.229.906	0
4.1.02	Retribusi Daerah	205.774.614.333	205.774.614.333	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	94.348.316.130	94.348.316.130	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	199.953.272.773	199.953.272.773	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.182.128.447.000	4.124.996.650.000	(57.131.797.000)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.182.128.447.000	4.124.996.650.000	(57.131.797.000)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	67.994.937.400	82.077.237.400	14.082.300.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	67.994.937.400	82.077.237.400	14.082.300.000
	Jumlah Pendapatan	6.283.641.817.542	6.240.592.320.542	(43.049.497.000)
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	5.013.582.925.198	4.935.694.405.732	(77.888.519.466)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.561.997.607.953	1.550.276.186.249	(11.721.421.704)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.551.161.659.889	1.418.435.134.207	(132.726.525.682)
5.1.03	Belanja Bunga	39.307.557.170	64.502.620.245	25.195.063.075
5.1.05	Belanja Hibah	1.808.722.980.430	1.870.651.364.220	61.928.383.790
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	52.393.119.756	31.829.100.811	(20.564.018.945)
5.2	BELANJA MODAL	1.858.994.304.311	1.952.079.857.154	93.085.552.843
5.2.01	Belanja Modal Tanah	850.000.000	2.390.000.000	1.540.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.261.685.911	171.796.588.776	71.534.902.865
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	428.790.271.942	297.728.297.077	(131.061.974.865)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.319.044.795.090	1.467.835.710.485	148.790.915.395
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.782.551.368	12.329.260.816	3.546.709.448
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.265.000.000	0	(1.265.000.000)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	68.123.915.460	204.664.498.781	136.540.583.321
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	68.123.915.460	204.664.498.781	136.540.583.321
5.4	BELANJA TRANSFER	644.228.590.760	568.307.875.062	(75.920.715.698)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	611.228.590.760	537.307.875.062	(73.920.715.698)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	33.000.000.000	31.000.000.000	(2.000.000.000)
	Jumlah Belanja	7.584.929.735.729	7.660.746.636.729	75.816.901.000
	Total Surplus/(Defisit)	(1.301.287.918.187)	(1.420.154.316.187)	(118.866.398.000)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.711.064.158.187	1.765.154.316.187	54.090.158.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.593.947.937	67.795.985.937	(40.797.962.000)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.594.888.120.000	1.689.776.240.000	94.888.120.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.582.090.250	7.582.090.250	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.711.064.158.187	1.765.154.316.187	54.090.158.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	409.776.240.000	345.000.000.000	(64.776.240.000)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	145.000.000.000	145.000.000.000	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	264.776.240.000	200.000.000.000	(64.776.240.000)
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	409.776.240.000	345.000.000.000	(64.776.240.000)
	Pembiayaan Netto	1.301.287.918.187	1.420.154.316.187	118.866.398.000

Kode	Uraian	RKPD		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	7.994.705.975.729	8.005.746.636.729	11.040.661.000

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT dan Bappelitbangda Prov. NTT

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah **“Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Arahan RPJPD untuk periode keempat 2018-2023 kemudian dijabarkan ke dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dalam visi **“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**. Dimana pembangunan Tahun 2021 merupakan tahun ke tiga. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*).
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mencapai visi dan misi, maka ditetapkan indikator dan target RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Indikator Kinerja Utama RPJMD Perubahan Provinsi NTT
Tahun 2018-2023

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil					
Pertumbuhan PDRB (%)	5,20	5,87	6,33 - 6,90	6,7 - 7,3	6,7 - 7,3
Inflasi (%)	0,67	3-3,4	3-3,2	3 - 3,2	3 - 3,2
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	20,62	21 - 19,63	19,35 - 16,15	15 - 12	15 - 12
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	19,5	20 - 23	23 - 25	25 - 27	25 - 27

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,35	3,2 -2,6	2,5 – 1,9	1,9 – 1,5	1,9 – 1,5
% PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	23,90	25,31	30,12	39,74	39,74
Indeks Gini (Poin)	0,355	0,35 - 0,34	0,34-0,33	0,34-0,32	0,34-0,32
Indeks Pembangunan Gender (Poin)	92,72	94	95	95	95
Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty)					
Persentase Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)	2	4	6	8	8
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2,71	4	4	4	4
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.065.378	1.278.453	1.534.144	1.534.144
Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan					
Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	85	90	100	100	100
Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	0,390	9,08	45,60	74,81	74,81
Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	70	75.02	76.74	78.46	78.46
Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	13.974,00	15.498	9.238	9.238	47.948
Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	75	80	85	85
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	62,5	67	69	75	75
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2)	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang	41,7	72,73	85,70	100	100
Indeks Resiko Bencana (Poin)	147	140	138	135	135
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia					
Angka Melek Huruf (%)	95,76	96,56	98,47	100	100
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,55	8,25	8,65	9,5	9,5
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,15	14,2	14,6	15	15
Usia Harapan Hidup (Tahun)	66,85	68,1	68,8	69	69
Prevelensi Stunting (%)	27,9	21,8	16,7	10 – 12	10 – 12
Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	40	60	70	80	80
Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik					
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	60,37	65	69	71	71
Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	B	A	A	A	A

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,1	2,3	2,5	2,7	2,7
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	44,41	50	60	75	75
Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	75	85	90	90	90
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,32	82,40	82,50	83	83

Sumber : RPJMD-P Provinsi NTT Tahun 2018-2023

Untuk mencapai visi, misi, sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, maka setiap tahunnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran tahunan. Tujuan dan sasaran tahunan ini sinkron dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target nasional dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2021 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2
Target Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021

INDIKATOR	Satuan	Capaian 2020	RPJMD Perubahan	TARGET 2021	
				RKPD INDUK	RKPD PERUBAHAN
Pertumbuhan Ekonomi	(%)	(2,27)	5,87 - 6,50	5,01 - 6,13	3,18-4,18
PDRB per Kapita	(Rp juta)	-	20-23	20-23	20-23
Indeks Pembangunan Manusia	(Poin)	65,19	65.54 - 67,00	66,33	66,33
Penduduk di bawah Garis Kemiskinan	(%)	21,21	21-19,63	21	19-20
Inflasi	(%)	0,28	3-3,4	3	2,1 - 3,1
Prevelensi Stunting	(%)	-	21,8	21,8	21,8
Indeks Gini	(Poin)	0,356	0,35 - 0,34	0,34	0,34
Indeks Pembangunan Gender	(Poin)	-	94	94	94
Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	4,28	3,2 -2,6	5	5
Rasio PAD	(%)	-	25,31	25,31	25,31
Emisi Gas Rumah Kaca	(tCO ₂ ^{eq})	-	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kebutuhan Investasi	(Rp Triliun)	-	63,91	63,91	34,19
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah	(poin)	-	65	65	65

Sumber : RPJMD-P Provinsi NTT Tahun 2018-2023 (data di update)

Pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4.3 menunjukkan keselarasan misi, tujuan dan sasaran per misi sesuai amanat RPJMD Perubahan untuk tahun 2021.

Tabel 4.3
Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan untuk Tahun 2021
(yang sudah disesuaikan dengan kondisi 2021)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2021
MISI IMEJUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN ADIL			
1.1 Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera	1.1.1 Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	3,18-4,18
		Inflasi (%)	2,1 – 3,1
		PDRB per Kapita (Rp. Juta)	20-23
	1.1.2 Berkurangnya Kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	19-20
		Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin)	1,05
		Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin)	4,02
		1.1.3 Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)		69,58
	Produktivitas Total Daerah (Rp. Juta)		46,583
	1.2 Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	1.2.1 Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	% PAD terhadap Pendapatan daerah (%)
1.2.2 Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional			Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)
		1.2.3 Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat	Rasio Ketergantungan (%)
1.2.4 Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan		Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Skor)	67
1.3 Mewujudkan NTT yang berkeadilan Sosial	1.3.1 Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah	Indeks Gini (Poin)	0,35 - 0,34
		1.3.2 Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (Poin)
	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)		70,76
	Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani (%)	75	
Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani (%)	75		
MISI IIMEMBANGUN NTT SEBAGAI SALAH SATU GERBANG DAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (RING OF BEAUTY NTT)			
2.1 Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	2.1.1 Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i>) dengan Pola Pendekatan Kawasan	Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	0,76
		Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB (%)	2,23
		Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (%)	12,12
	2.1.2 Meningkatnya <i>Sumbangan</i> Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata (%)	4
		Lama Tinggal Wisatawan (hari)	4
		Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.165.378

MISI II MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN			
3.1 Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	3.1.1 Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	90
		Dwelling Time Pelabuhan (hari)	4
		Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	9,08
	3.1.2 Tersedianya infrastruktur Pengariran yang mendukung peningkatan produksi Pertanian	Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	75.02
3.2 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	3.2.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak	Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	15.498
		Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak (%)	83
		Persentase Rumah tangga menurut Sanitasi Layak (%)	77
	3.2.2 Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi	Rasio Elektrifikasi (%)	75
3.3 Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (<i>sustainability</i>) lingkungan hidup dalam pembangunan	3.3.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	67
	3.3.2 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO ₂ e)	17.248.829
	3.3.3 Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang (%)	72,73
	3.3.4 Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara	Kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (%)	80
	3.3.1 Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (Poin)	140
MISI IV MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			
4.1 Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	4.1.1 Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Angka Melek Huruf (%)	96,56
		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,25
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,2
		4.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	Usia Harapan Hidup (tahun)
		Prevelensi Stunting (%)	21,8
	4.1.3 Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	60
MISI V MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
5.1 Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	5.1.1 Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	65
		Opini BPK (Opini)	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	A
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,3
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	50
		Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	85
	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,40	

Sumber : RPJMD-P Prov. NTT Tahun 2018-2023, Bab V (data di update)

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

4.2.1 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup

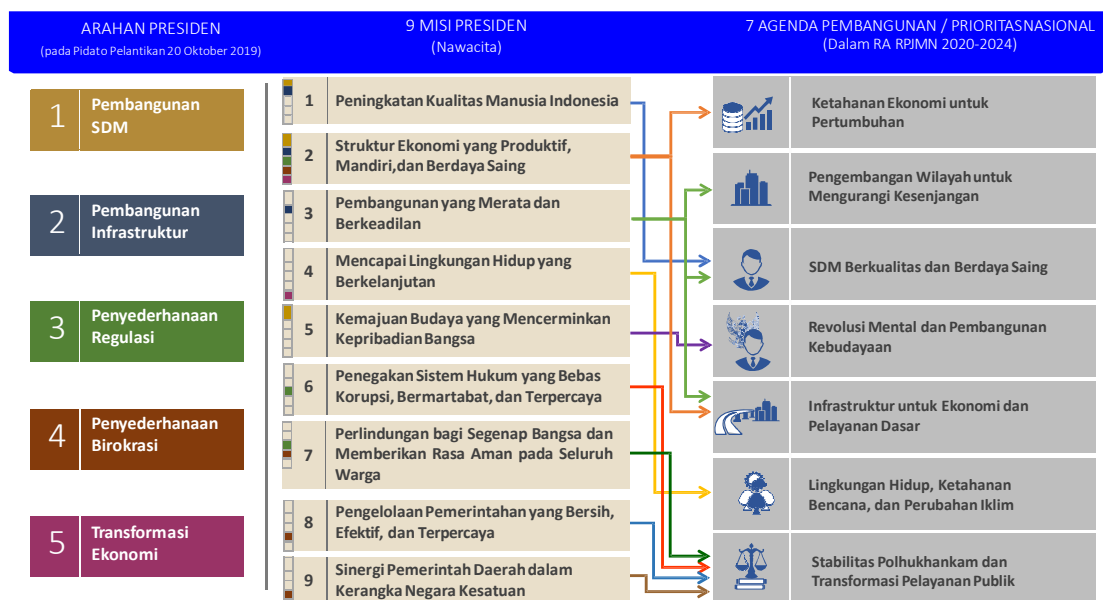
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/prioritas Nasional terlihat pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1
Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional



*) Narasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dapat diunduh di <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/re/>

Target Makro Pembangunan pada akhir periode RPJMN 2020-2024 direncanakan sebagaimana terlihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Indikator Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024

Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Target 2021 untuk NTT
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,7 – 6,0	6,50
Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	6,0 – 7,0	17,35
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	3,6 – 4,3	2,70
Gini Rasio	Indeks	0,360 – 0,374	
IPM	Nilai	75,54	
Penurunan Emisi GRK	Persen	27,3	

4.2.2. Tema Pembangunan 2021

4.2.2.1 Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2021

RKP 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2020-2024, yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Karena itu tema pembangunan RKP 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020.

Pandemi *Covid 19* yang terjadi membawa dampak yang signifikan, tidak saja pada aspek kesehatan, namun pada semua aspek baik sosial maupun ekonomi masyarakat. Hal ini mempengaruhi kebijakan dan fokus pembangunan nasional, termasuk indikator dan target pembangunan nasional yang nantinya akan dijabarkan sampai ke daerah.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata dan investasi; reformasi system kesehatan nasional, reformasi system perlindungan sosial dan reformasi system ketahanan bencana. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut,

maka ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) untuk tahun 2021, yaitu :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.2.2.2 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021

Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2021 disusun dengan mempedomani RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 dan hasil evaluasi pembangunann tahun 2020 serta memperhatikan RKP 2021.

Gambar 4.2
Arah Kebijakan sebagai Pedoman penentuan Tema RKPD



Mempedomani arah kebijakan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, maka RKPD 2021 menetapkan tema **“Pemulihan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan Pertanian serta Memperkuat Sistem Kesehatan Daerah”**.

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2021 sesuai RKPD diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows programme*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPJMD Perubahan Tahun 2018 - 2023.

Pendekatan penyusunan RKPD 2021, secara proses dilakukan melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2021 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistik mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan. Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kegiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antarwilayah.

4.2.2.3 Prioritas Lokasi Pembangunan RKPD 2021

Dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran secara THIS aspek spasial lokasi pembangunan merupakan komponen penting dalam mewujudkan pembangunan yang efisien, efektif serta berdaya guna dan berhasil guna. Penetapan lokasi pembangunan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2030, dengan memperhatikan data dan capaian pembangunan

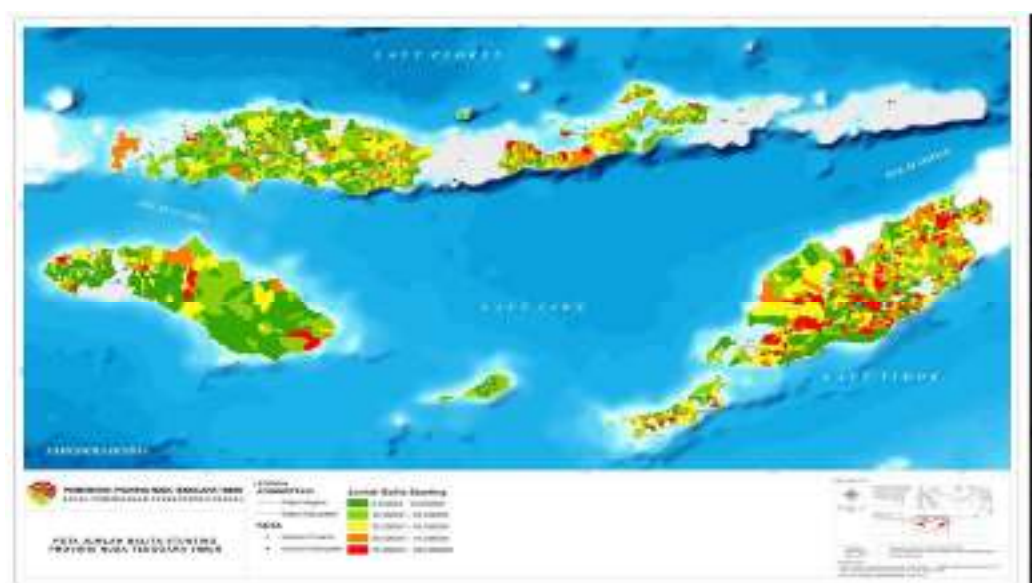
masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2021.

Terdapat dua strategi pengembangan kewilayahan pada RKPD 2021, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan. Dari 2 (dua) strategi ini, telah ditetapkan prioritas lokasi pembangunan, yaitu berdasarkan pertumbuhan, adalah lokasi yang disepakati antara provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terkait dengan pengembangan pariwisata ataupun pusat produksi untuk pertumbuhan wilayah, Selain itu juga telah ditetapkan lokasi yang disepakati antara provinsi dan kabupaten/kota untuk pemerataan, hal ini lebih dikaitkan dengan layanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

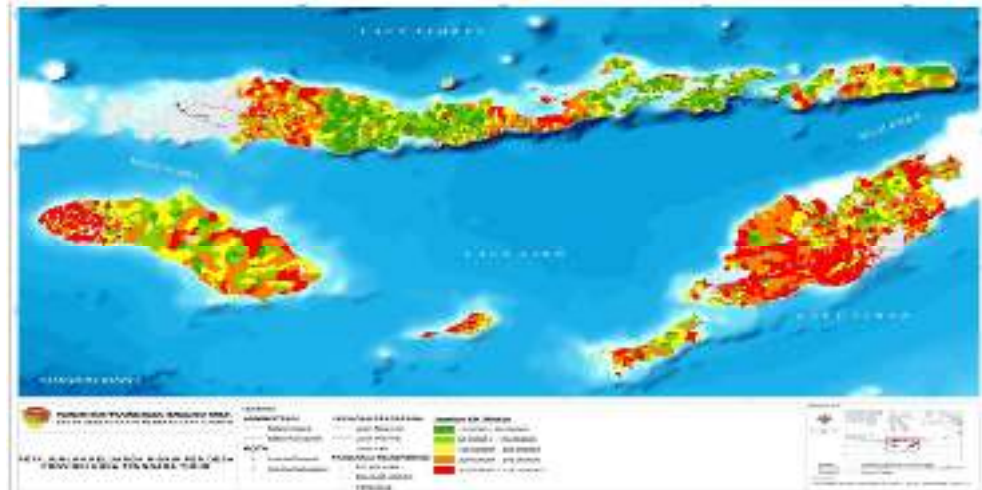
Tabel 4.5
Lokasi Prioritas sesuai Strategi Pertumbuhan dan Pemerataan

No	Pengembangan Wilayah Fokus Pertumbuhan DESTINASI WISATA 2021	No.	Pengembangan Wilayah Fokus Pemerataan, untuk PENURUNAN KEMISKINAN DAN ERADIKASI STUNTING
Lanjutan pembangunan pada 7 Destinasi yang dibangun 2019		Difokuskan pada 344 desa prioritas / desa model (terlampir)	
1.	Liman, Semau		Prioritas kabupaten dilakukan pada 4 kabupaten dengan angka kemiskinan dan stunting terbesar, yaitu : Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sumba Barat Daya
2.	Wolwar, Alor		
3.	Fatumnasi, TTS		
4.	Mulut Seribu, Rote Ndao		
5.	Praimadita, Sumba Timur		
6.	Lamalera, Lembata		
7.	Koanara, Sikka		

Gambar 4.3
Peta Sebaran Stunting per kabupaten/kota



Gambar 4.4
Peta Kemiskinan per Kabupaten/Kota



4.2.2.4 Prioritas Daerah RKPD 2021

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2021 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Daerah (PD). Prioritas Daerah kemudian disinergikan dalam 34 Proyek Prioritas Strategis (*Major Project/MP*).

Tujuh prioritas daerah untuk tahun 2021, yaitu :

1. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting.
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat.
3. Lingkungan hidup, Perubahan Iklim & Kerentanan Bencana.
4. Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata.
5. Pemantapan Infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi.
6. Peningkatan Aksesibilitas & Kualitas Layanan Bidang Pendidikan & Kesehatan.
7. Reformasi Birokrasi.

Prioritas daerah dimaksud selanjutnya dijabarkan dalam 34 (tiga puluh empat) Proyek Prioritas Strategis (*major project*), yang terdiri dari:

1. PD 1 : Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting, dijabarkan dalam 5 (lima) *major project*, yaitu:

- a. Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
 - b. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
 - c. Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Berkualitas
 - d. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak
 - e. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar
2. PD 2 : Peningkatan Pendapatan Masyarakat, dijabarkan dalam 5 (lima) major project, yaitu:
- a. Peningkatan Nilai Tambah dan Ekspor Produk Pertanian (Marungga)
 - b. Pengembangan Industri Garam Daerah
 - c. Peningkatan Produksi bibit dan benih Pertanian, Peternakan dan Perikanan
 - d. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja
 - e. Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah
3. PD 3 : Lingkungan hidup, Perubahan Iklim & Kerentanan Bencana, dijabarkan dalam 5(lima) major project, yaitu:
- a. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - b. Pemanfaatan dan optimalisasi Hutan Produksi
 - c. Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu
 - d. Pelestarian hutan dan Lingkungan Pesisir
 - e. Pengurangan emisi rumah kaca
4. PD 4 : Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata, dijabarkan dalam 5 (lima) *major project*, yaitu:
- a. Peningkatan kelembagaan dan SDM pariwisata berbasis masyarakat (*Comunity Based*)
 - b. Pengembangan Jaringan Informasi Pariwisata (TIC) yang terintegrasi dengan digital literasi dan promosi wisata
 - c. Percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata
 - d. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kinerja industri Kreatif

- e. Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata
- 5. PD 5 : Pemantapan Infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi, dijabarkan dalam 4 (empat) *major project*, yaitu :
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Energi baru terbarukan
 - b. Peningkatan Akses dan Kualitas jalan jembatan, prasarana dan sarana transportasi
 - c. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air
 - d. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
- 6. PD 6 : Peningkatan Aksesibilitas & Kualitas Layanan Bidang Pendidikan & Kesehatan, dijabarkan dalam 5 (lima) *major project*, yaitu :
 - a. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan
 - b. Pemuda NTT yang berkapasitas dan berkapabilitas
 - c. Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan
 - d. Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan
 - e. Fasilitas Khusus Kesehatan Daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan
- 7. PD 7 : Reformasi Birokrasi, dijabarkan dalam 5 (lima) *major project*, yaitu :
 - a. Perangkat Daerah yang *right sizing*
 - b. Penerapan e-Government & Data Terpadu
 - c. Penerapan Sistem manajemen Kinerja
 - d. Penataan dan pemutahiran Produk Hukum Daerah
 - e. Peningkatan Pelayanan publik yang berkualitas
 - f. SI MANDATARIS (Sistem Informasi Data Strategis)

Penjabaran masing-masing major project sebagaimana terlihat berikut:

PRIORITAS DAERAH 1 : PERCEPATAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DAN ERADIKASI STUNTING

Latar Belakang	a. Angka Kemiskinan NTT masih tinggi yaitu 20,62% (Sept 2019), Kondisi pencapaian Tahun 2020 adalah 21,21% dan pada Triwulan I-2021 menjadi 20,99%. b. 30,8% balita di NTT stunting (Agustus 2019)	
Indikator dan Target pada Akhir Periode RPJMD Perubahan	a. Angka Kemiskinan menjadi 12% - 8% b. Balita Stunting 20%	
Tahun Rencana	2021	
Indikator dan target pada Tahun Rencana	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan : <ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya angka kemiskinan sebesar 3,27% dari 20,62% menjadi 17,35% • Menurunnya persentase balita stunting di NTT menjadi 29% 	
Major Project 1	Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	
Aktivitas Utama & indikator output	Aktivitas Utama	Output
	a) Pemberian bantuan sembako bagi keluarga fakir miskin sejumlah 10.320 KK di 344 Desa Prioritas; 22 Kabupaten/kota b) Pemetaan kondisi fakir miskin di Perdesaan, Perkotaan, Kepulauan dan Perbatasan antar Negara pada seluruh desa dan kelurahan 2 kali dalam setahun c) Peningkatan kapasitas perlindungan dan jaminan Sosial melalui Taruna Siaga Bencana sejumlah 103 orang	a) 10.320 KK pada 344 Desa Prioritas di 22 Kabupaten/kota menerima bantuan sembako b) Tersedianya data kondisi fakir miskin di Perdesaan, Perkotaan, Kepulauan dan Perbatasan antar Negara pada seluruh desa dan kelurahan 2 kali dalam setahun c) Tersedianya insentif bagi 103 Taruna Siaga Bencana Provinsi NTT
Pelaksana	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten/kota	
Major Project 2	Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	
Aktivitas Utama & indikator output	Aktivitas Utama	Output
	a) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat di 12.040 KK pada 344 Desa b) Pemberian PMT berbasis sumber daya lokal bagi 6.880 rumah tangga dengan 1000 HPK kerja sama dengan Dukungan PKK Provinsi NTT (Pokja-Pokja) dan Bantuan Sarana Prasarana Binaan TP-PKK di 344 Desa c) Pelatihan Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perempuan dalam penyediaan pangan bekerja sama dengan Bumdes di 344 Desa; 22 Kab/kota	a) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat di 12.040 KK pada 344 Desa (nabati, hewani, dan protein) b) Terlaksananya Pemberian PMT bagi balita pada 6.880 rumah tangga dengan 1000 HPK berbasis sumber daya lokal di 344 desa c) Tersedianya Unit Usaha Penyediaan Pangan pada 344 Desa Prioritas (nabati, hewani, dan protein) d) Selama 12 bulan 688 orang kader posyandu pada 344 desa menerima insentif

	d) Pemberian insentif bagi kader posyandu e) Pengadaan Sarana Tumbuh Kembang Anak di Posyandu	e) Tersedianya sarana tumbuh kembang anak pada 344 posyandu di 22 kab/kota
Pelaksana	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PMD dan PKK, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan	
Major Project 3	Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Berkualitas	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	a) Pemberian beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang berprestasi	a) Tersedianya beasiswa bagi anak kurang mampu yang berprestasi
Pelaksana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Major Proyek 4	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman layak	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	a) Penyediaan Sumur Bor sebagai sumber air bersih bagi 172 Desa Prioritas di 22 Kab/Kota	a) Tersedianya 172 Sumur Bor sebagai sumber air bersih bagi 172 Desa Prioritas di 22 Kab/Kota
	b) Pemberian bantuan instalasi listrik gratis bagi KK miskin di 344 desa di NTT	b) Terpasangnya instalasi listrik gratis bagi KK Miskin di 344 desa di NTT
	c) Penyediaan energi listrik (EBT) bagi masyarakat miskin di 344 desa di NTT	c) Tersedianya energy listrik (EBT) bagi masyarakat miskin di 344 desa di NTT
	d) Pembangunan Penampung air kumunal 1000 unit Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat	d) Tersedianya 1000 unit penampung air komunal bagi masyarakat miskin di 344 desa di NTT
	e) Pembangunan Rumah Layak Huni bagi KK Miskin di 344 desa di NTT	e) Terbangunnya 4000 unit rumah layak huni di 344 desa di NTT
Pelaksana	Dinas PUPR, Dinas ESDM, Dinas Koperasi dan Nakertrans	
Major Proyek 5	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Pemenuhan SPM Urusan Wajib pelayanan dasar	100 %
Pelaksana	Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib pelayanan dasar	

PRIORITAS DAERAH 2 : PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT

Latar Belakang	<p>a. Angka pertumbuhan ekonomi di NTT 5,20%, walaupun lebih tinggi dari nasional 5,02% tetapi masih di bawah target RPJMD untuk tahun 2019, yaitu 5,87%. Akan tetapi akibat Pandemi Covid19, kondisi pertumbuhan ekonomi melamban dengan kondisi 0,12% pada Triwulan I 2021, diharapkan akan bertumbuh menjadi 3,18% – 4,18 %.</p> <p>b. PDRB per kapita NTT baru mencapai Rp 19,59 juta, sedangkan PDB perkapita Indonesia sudah mencapai Rp 59,32 juta tahun 2019</p>	
Indikator dan Target pada Akhir Periode RPJMD Perubahan	<p>a. Pertumbuhan ekonomi 10,09%</p> <p>b. PDRB per kapita Rp 25 juta</p>	
Tahun Rencana	2021	
Indikator dan target pada Tahun Rencana	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi sebesar 1,30%. Dari angka 5,20% menjadi 6,50%. Akan tetapi akibat Pandemi Covid 19, kondisi pertumbuhan ekonomi melamban dengan kondisi 0,12% pada Triwulan I 2021, diharapkan akan bertumbuh menjadi 3,18%-4,18 %. • PDRB per kapita menjadi Rp 18 – Rp 20 juta 	
Major Project 1	Peningkatan Nilai Tambah dan Ekspor Produk Pertanian (Marungga)	
Strategi & indicator output	Aktivitas Utama	Output
	<p>a) Pengembangan tanaman marungga seluas 1000 Ha di Besipae</p> <p>b) Sertifikasi lahan organik pengembangan marungga</p> <p>c) Peningkatan nilai tambah dan ekspor produk marungga lewat pengolahan marungga :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bimtek pengolahan aneka produk dari kelor bagi 40 IKM di 4 kabupaten - Fasilitasi legalitas usaha dan legalitas produk kelor 	<p>a) Bertambahnya luas area penanaman marungga 1000 ha di Besipae</p> <p>b) Tersertifikasinya 1 Lahan pengembangan Marungga di Besipae</p> <p>c) - Terlatihnya 40 IKM dalam hal pengolahan kelor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk-produk kelor terfasilitasi untuk mendapatkan legalitas produk
Pelaksana	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan perdagangan	
Major Project 2	Pengembangan Industri Garam Daerah	
	Aktivitas Utama	Output
	<p>a) Pengembangan kelompok industri garam</p> <p>b) penggunaan luas lahan garam teknologi geomembran</p>	<p>a) 106 kelompok industri garam</p> <p>b) Lahan garam teknologi geomembrane yang digunakan 106 ha</p>
Pelaksana	Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DKPM dan Pelayanan Satu Pintu	
Major Project 3	Peningkatan Produksi bibit dan benih Pertanian, Peternakan dan Perikanan	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	<p>a) Peningkatan produktifitas tanaman pangan khususnya padi dan jagung di seluruh lahan potensial 1000 ha melalui :</p>	<p>a) – Tersedianya benih jagung di penangkar seluas 325 ha dan sumber benih jagung 33 ha</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - perbanyak benih jagung dipenangkar seluas 325 Ha dan sumber benih jagung seluas 33 ha - perbanyak benih padi dipenangkar seluas 198 Ha dan sumber benih padi di Balai seluas 55 ha - perbanyak benih kedelai dipenangkar seluas 33 Ha <p>b) Pengembangan populasi ternak besar (sapi & kerbau) di Timor dan Sumba, ternak kambing dan babi di Flores & Timor serta unggas di seluruh wilayah NTT, melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sapi dan Kerbau di Timor dan Sumba - pengadaan ternak babi di instaslasi 130 ekor - pengadaan ternak kambing PE di instaslasi 100 ekor - pengadaan ternak ayam di instaslasi 500 ekor <p>c) Budidaya kerapu dan kakap putih 1 juta ekor di Mulut seribu, Teluk Kelambu dan Hasan Maubesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya benih padi di penangkar seluas 198 ha dan sumber benih padi di Balai seluas 55 ha - Tersedianya benih kedelai di penangkar seluas 33 ha <p>b) - Tersedianya 20 ekor Sapi Bali dan 20 ekor Sapi Ongole di Instalasi, 20 ekor kerbau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya 130 ekor ternak babi, 100 ekor kambing PE dan 500 ekor ayam di instalasi <p>c) Produksi 1 juta benih ikan kerapu dan kakap putih di Mulut seribu, Teluk Kelambu dan Hasan Maubesi</p>
Major Project 4	Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	<ul style="list-style-type: none"> a) Pelatihan pemagangan tenaga kerja dalam negeri dan wira usaha baru b) Fasilitasi sarana pelaku UMKM di 11 destinasi wisata prioritas dan desa model PKK c) Pelatihan teknis UMKM, KOPERASI dan BUMDES di 11 destinasi wisata prioritas d) Pengembangan system informasi tenaga kerja e) Optimalisasi pelatihan pada UPT balai pelatihan ketenaga kerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedia tenaga terlatih pada tiga sektor usaha b) Tersedia pelaku UMKM baru pada sector ekonomi dan jasa dalam mendukung pengembangan destinasi wisata dan 150 desa pilot project PKK c) Terbentuk pengelolaan BUMDES dan KOPERASI sebagai kelambagaan ekonomi yang menjalankan pengembangan 11 lokasi Destinasi Pariwisata prioritas d) Terbentuk aplikasi ketenaga kerjaan yang bias diakses oleh seluruh masyarakat di 22 kab/kota e) Penyediaan sarana pelatihan dan kompetensi instruktur
Pelaksana	Dinas Koperasi dan Nakertrans	
Major Project 5	Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	<ul style="list-style-type: none"> a. Inovasi daerah melalui penelitian dan pengembangan b. Penilaian inovasi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a. TersedianyaInovasi daerah yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah b. Keikutsertaan pada lomba inovasi daerah
Pelaksana	Bappelitbangda, Biro Organisasi, perangkat daerah lainnya yang melaksanakan inovasi daerah	

PRIORITAS DAERAH 3 : LINGKUNGAN HIDUP, PERUBAHAN IKLIM & KERENTANAN BENCANA

Latar Belakang	a. Indeks kualitas lingkungan hidup, NTT 2018 yang terdiri dari IKA 58,09 (kurang baik), IKU dan IKTL NTT dalam kategori sedang b. NTT merupakan daerah rawan bencana c. Perubahan iklim mulai sangat terasa	
Indikator dan Target pada Akhir Periode RPJMD Perubahan	Indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 75	
Tahun Rencana	2021	
Indikator dan target pada Tahun Rencana	Indeks kualitas lingkungan hidup 67	
Major Project 1	Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	24 kampung iklim diusulkan
Pelaksana	Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Major Project 2	Pemanfaatn dan optimalisasi Hutan Produksi	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan kawasan hutan di 22 kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> - Luas tanaman hasil hutan bukan kayu 200 hektar - Spesies pendukung HHBK sebanyak 5 Unit - Luas hutan tanaman endemik lokal 5.000 hektar
Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Major Project 3	Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Penyusunan kebijakan, koordinasi, dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan ekosistemnya melalui kegiatan vegetatif dan civil teknis	<ul style="list-style-type: none"> - pembuatan hutan dan penanaman tanaman cendana sebanyak 2.500.000 batang - berkurangnya luasan lahan kritis 5,5 juta hektar
Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Major Project 4	Pelestarian hutan dan Lingkungan Pesisir	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pelestarian LH b) Pelibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan pesisir c) Pemantauan indeks lingkungan hidup daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a) Hutan dan lahan yang direhabilitasi secara vegetatif seluas 600 ha b) jumlah pengurangan timbulan sampah di daerah sebanyak 16,4 juta ton

	d) Pengembangan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah sebagai area pemijahan ikan dan pelestarian terumbu karang di Alor, Lembata, Sikka dan Flotim	c) Tersedianya data dan informasi kerusakan mangrove di 22 kab/kota dan penyusunan dokumen IKLH terhadap 63 indeks d) - Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (kawasan) Alor, Lembata, Sikka, Flotim - Peningkatan produksi ikan di kawasan konservasi perairan sebesar 15 % - rosentase Peningkatan kegiatan wisata bahari ramah lingkungan di kawasan konservasi perairan sebesar 20 %
Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan	
Major Project 5	Pengurangan emisi rumah kaca	
Strategi & indikator output	inventarisasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca di 22 kab/kota	- Tersedianya 1 dokumen : data Baeline emisi gas rumah kaca - Tersedianya 1 dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca - Tersedianya 1 dokumen kaji ulang rencana aksi daerah (RAD)

PRIORITAS DAERAH 4 : PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INDUSTRI PARIWISATA

Latar Belakang	a. Tingkat kunjungan wisatawan tahun 2019 mencapai 1.176.772 Orang b. Rata-rata lama tinggal wisatawan baru mencapai 2,62 hari	
Indikator dan Target pada Akhir Periode RPJMD Perubahan	a. Tingkat kunjungan wisatawan harus mencapai 1.534.144 orang b. Rata – rata lama tinggal wisatawan mencapai 4 hari	
Tahun Rencana	2021	
Indikator dan target pada Tahun Rencana	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kunjungan wisatawan harus 1.065.378 orang • Rata – rata lama tinggal wisatawan 4 hari • Memperhatikan kondisi pandemic Covid19 diimbangi dengan Vaksinasi menuju terbentuknya <i>herd immunity</i> 	
Major Project 1	Peningkatan kelembagaan dan SDM pariwisata berbasis masyarakat(Comunity Based Tourism)	
Aktivitas Utamai & Output	Aktivitas Utama	Output
	a) Peningkatan UKM baru di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) b) Penguatan kapasitas pengelola wisata di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) c) Peningkatan perananan Bumdes sebagai penggerak ekonomi desa di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) d) Meningkatkan wisata bahari ramah lingkungan pada kawasan konservasi perairan di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) e) Penataan dan pembinaan kelembagaan semua jenis perpustakaan (termasuk perpustakaan umum di daerah pariwisata estate).	a) Jumlah UKM baru di 7 lokasi tahun 2019 bertambah b) Pengelola Usaha Pariwisata dan Pokdarwis di 7 lokasi tahun 2019 mendapat pelatihan/bimtek c) Terbangunnya usaha wisata bahari ramah lingkungan pada kawasan konservasi perairan di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera)
Pelaksana	Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Koperasi dan Nakertrans, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	

Major Project 2	Percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	<ul style="list-style-type: none"> a) Lanjutan Penataan 5A di 7 (Tujuh) destinasi Wisata Tahun 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) b) Peningkatan pelayanan kesehatan di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) 	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya 5A di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita), seperti jalan, listrik, air, penginapan, restoran, atraksi, dll. b) Tersedianya fasilitas kesehatan (puskesmas / pustu di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita)
Pelaksana	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas ESDM, Dinas Kesehatan, Para Pelaku Usaha Wisata	
Major Project 3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kinerja Industri Kreatif	
Strategi & indicator output	<ul style="list-style-type: none"> a) Penguatan industri kreatif di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) b) Pengembangan ekowisata dan arboratoriuma di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) c) Peningkatan Produksi Tanama pangan di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) d) Pengembangan ketrampilan tenaga kerja lokal di bidang pariwisata dalam mengelola industri-industri kreatif sesuai potensi lokal di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) e) Peningkatan populasi peternakan di Pariwisata Estatee 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) 	<ul style="list-style-type: none"> a) Usaha industri kreatif pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) di latih b) Terbangunnya ekowisata dan arboratoriuma di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) c) Meningkatkan Produksi Tanama Pangan di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) d) Tenaga kerja lokal di bidang pariwisata dalam mengelola industri-industri kreatif sesuai potensi lokal di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita) e) Meningkatkan populasi peternakan di Pariwisata Estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Prai Madita)
	Pelaksana	Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perindag

Major Project 4	Pengembangan Jaringan Informasi Pariwisata/ Tourism Information Center (TIC) yang terintegrasi dengan digital literasi dan promosi wisata	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	a) Digital literasi obyek wisata (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) b) Tourism Information Centre (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende)	a) Tersedianya informasi kepariwisataan dalam bentuk digital yang mudah diakses oleh wisatawan tentang 7 destinasi pariwisata estate (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) b) Tersedianya pusat informasi pariwisata di 7 destinasi pariwisata estate (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende)
Pelaksana	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
Major Project 5	Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	a) Pengembangan pasar pariwisata (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) b) Publikasi promosi pariwisata (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) c) Survey kecenderungan wisatawan (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) d) Pameran potensi pariwisata dan ekonomi kreatif	a) Terjalin kerjasama dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan b) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke 7 destinasi pariwisata estate c) Tersedianya data tentang minat dan kecenderungan wisatawan terhadap 7 destinasi pariwisata estate. d) Tersedianya jaringan kerjasama kepariwisataan dan ekonomi kreatif di NTT
Pelaksana	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

PRIORITAS DAERAH 5 : PERCEPATAN PENYELESAIAN INFRASTRUKTUR (JALAN, JEMBATAN, AIR, ENERGI, TRANSPORTASI)

Latar Belakang	a. Perentase jalan Provinsi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2019 1.594,47 km b. Daerah Irigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2019 35.586,36 Ha c. Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 12.773 unit	
Indikator dan Target pada Akhir Periode RPJMD Perubahan	a. Perentase jalan Provinsi dalam kondisi baik 2.650 km b. Daerah Irigasi dalam kondisi baik 3.600 ha c. Jumlah rumah tidak layak huni 76.990 unit	
Tahun Rencana	2021	
Indikator dan target pada Tahun Rencana	<ul style="list-style-type: none"> • Perentase jalan Provinsi dalam kondisi baik 339 km • Daerah Irigasi dalam kondisi baik 3.600 ha • Jumlah rumah tidak layak huni 228.990 unit 	
Major Project 1	Pemenuhan Kebutuhan Energi Baru Terbarukan (EBT)	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Pembangunan Energi Listrik (EBT) di 4 destinasi wisata baru dan 7 destinasi yang telah dibangun Tahun 2019	Tersedianya energi listrik (EBT) di 4 destinasi wisata baru dan 7 destinasi yang telah dibangun Tahun 2019
Pelaksana	Dinas ESDM	
Major Project 2	Peningkatan Akses dan Kualitas jalan jembatan , prasarana dan sarana transportasi	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	a) Pengadaan petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata, pengaman jalan dan rambu keselamatan b) Pembangunan Jalan dan Jembatan (dari berbagai sumber dana, termasuk melalui pinjaman daerah) c) Penanganan pelabuhan, termasuk mengkoordinasikan perluasan ASDP Sumba Timur d) persiapan / fasilitasi pembangunan Bandar Udara Sabu Raijua e) Mempersiapkan FS dan DED di P. Rinca	a) Tersedianya petunjuk arah, pengaman jalan dan rambu keselamatan di destinasi wisata b) Jalan provinsi dalam kondisi baik 339 km c) Tersedianya kepehaman tentang perluasan ASDP Sumba Timur d) Tersedianya perencanaan untuk pembangunan Bandar Udara Sabu Raijua e) Tersedianya FS dan DED di Pulau Rinca
Pelaksana	Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan	
Major Project 3	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber daya Air	
Aktivitas Utama dan Output	Aktivitas Utama	Output
	a) Pembangunan sumber daya air dan Irigasi b) Pengelolaan Operasi Sumber Daya Air dan Irigasi	a) Terbangunnya embung kecil b) Tersedianya data AKNOP Embung Kecil

Pelaksana	Dinas PUPR	
Major Project 4	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	
Aktivitas Utama dan Output	Aktivitas Utama	Output
	a) Penataan dan pemanfaatan Lingkungan dan Kehutanan b) Pembinaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan c) Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Dan Kehutanan d) Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan e) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial	a) Indeks kualitas air , Indeks kualitas udara b) Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi c) Jumlah hutan arboretum (khusus spesies flora dan fauna endemik) d) Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi e) Luas hutan dengan tanaman endemik lokal
Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

PRIORITAS DAERAH 6 : Peningkatan Aksesibilitas & Kualitas Layanan Bidang Pendidikan & Kesehatan

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> a. Rata-rata lama sekolah b. Angka Melek Huruf c. Angka kematian Ibu d. Angka kematian Bayi e. Angka kematian Balita 	
Indikator dan Target pada Akhir Periode RPJMD Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Rata-rata lama sekolah b. Angka Melek Huruf c. Angka kematian Ibu d. Angka kematian Bayi e. Angka kematian Balita 	
Tahun Rencana	2021	
Indikator dan target pada Tahun Rencana	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata lama sekolah 8,25 Tahun • Angka Melek Huruf 94,56 poin • Angka kematian Ibu 0 Kasus • Angka kematian Bayi 0 Kasus • Angka kematian Balita 0 Kasus 	
Major Project 1	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembinaan Pendidikan Menengah Melalui rehab ruang kelas, pembangunan sekolah dan ruang kelas b) Pelaksanaan pendidikan khusus dan layanan khusus (Luar Biasa) c) Pembinaan Ketenagaan d) Manajemen Pengelolaan BOS 	<ul style="list-style-type: none"> a) Jumlah ruang kelas yang direhab, jumlah kelas/sekolah yang dibangun b) Terlaksananya pelayanan pendidikan khusus dan layanan khusus (luar biasa) bagi anak berkebutuhan khusus c) Terlayaninya tenaga pendidikan dan kependidikan d) Pengelolaan Dana Bos yang akuntabel
Pelaksana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Major Project 2	Pemuda NTT yang berkapasitas dan berkapabilitas	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan Kepemudaan b) Pemberdayaan pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> a) Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan bantuan permodalan bagi Kelompok pemuda dalam berwirausaha b) Pelatihan Peningkatan Krestifitas pemuda dibidang seni kriya (kerajinan, anyaman, dan ukiran)
Pelaksana	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

Major Project 3	Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan	
Aktivitas Utama & Output	a) Peningkatan layanan dan pembinaan perpustakaan	a) Jumlah bahan bacaan, b) Penyediaan akses layanan perpustakaan sekolah, desa dan digital
Pelaksana	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Major Project 4	Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan	
Aktivitas Utama & Output	a) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit b) Peningkatan Kesehatan Masyarakat c) Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan d) Peningkatan Kualitas Manajemen Kesehatan	a) Persentase Penduduk Mengalami Gangguan Kesehatan b) Persentase Balita Stunting c) Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk d) Standar Operasional (SOP) Prosedur yang Disusun dan Dijalankan
Pelaksana	Dinas Kesehatan	
Major Project 5	Fasilitas Khusus Kesehatan Daerah terpencil , perbatasan dan kepulauan	
Aktivitas Utama & Output	a) Pelayanan Kesehatan	a) Penyediaan fasilitas kesehatan terapung dan Flying Health Care
Pelaksana	Dinas Kesehatan	

PRIORITAS DAERAH 7 : Reformasi Birokrasi

Latar Belakang	a. Peringkat LPPD b. Indeks Reformasi Birokrasi saat ini 60,37 c. Nilai Akuntabilitas Kinerja saat ini 63,43	a. Indeks Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) b. Opini BPK tahun 2018 : WTP (2019 sedang dalam pemeriksaan) c. Indeks kepuasan pelayanan publik (8 PD = 82,81) d. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik
Indikator dan Target pada Akhir Periode RPJMD Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Peringkat LPPD 18 – 20 • Indeks Reformasi Birokrasi • Nilai Akuntabilitas Kinerja CC 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks SPBE 2,3 • Opini BPK WTP • Indeks kepuasan pelayanan public • Tingkat Keterbukaan Informasi Publik
Tahun Rencana	2021	
Indikator dan target pada Tahun Rencana	<ul style="list-style-type: none"> • Peringkat LPPD 18 – 20 • Indeks Reformasi birokrasi • Nilai Akuntabilitas Kinerja A 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks SPBE 2,3 • Opini BPK WTP • Indeks kepuasan pelayanan publik
Major Project 1	Perangkat Daerah yang <i>right sizing</i>	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	a) Menyusun instrumen penilaian kinerja individu yang terukur dan mencerminkan pencapaian kinerja b) Menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan Business process dan Standar Operating Procedure c) Rekrutmen pejabat melalui mekanisme assessment centre, seleksi terbuka dan manajemen talent pool	a) Tersedianya instrumen penilaian kinerja individu yang terukur dan mencerminkan pencapaian kinerja b) Tersedia Business Process dan SOP serta hasil evaluasi terhadap Business Process dan SOP d) Terlaksananya rekrutmen pejabat melalui mekanisme assessment centre, seleksi terbuka dan manajemen talent pool
Pelaksana	Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi	
Major Project 2	Penerapan e- Government & Data Terpadu	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Pengelolaan E-Gov Terintegrasi	a) Penerapan e-Government b) Terwujudnya Smart City
Pelaksana	Dinas Kominfo	
Major Project 3	Penerapan Sistem manajemen Kinerja	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	a) mengidentifikasi indikator mutu dalam pelayanan, memonitor indikator tersebut dan mengukur hasil dari indikator mutu tersebut yang tentunya mengarah pada outcome, serta selalu	a) Tersedianya data / laporan indikator mutu b) Diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

	berfokus dalam rangka peningkatan proses, sehingga tingkat mutu dari hasil yang dicapai b) Membuat rencana penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah	
Pelaksana	Inspektorat, Biro Organisasi	
Major Project 4	Penataan dan pemutahiran Produk Hukum Daerah	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Verifikasi dan evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Produk Hukum Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah dan Permasalahan Daerah	Produk hokum daerah diverifikasi dan dievaluasi
Pelaksana	Biro Hukum	
Major Project 5	Peningkatan Pelayanan publik yang berkualitas	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	a) Sosialisasi pemanfaatan Aplikasi Pengaduan Masyarakat b) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah	a) Aplikasi pengaduan masyarakat dikenal dan dapat digunakan oleh masyarakat b) Meningkatnya kesesuaian program-program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah lewat restrukturisasi program dan kegiatan daerah
Pelaksana	Satuan Polisi Pamong Praja	
Major Project 6	SI MANDATARIS (Sistem Informasi Data Strategis)	
Aktivitas Utama & Indikator Output	Aktivitas Utama	Output
	a) Data potensi desa (PODES) dan sensus b) Kompilasi database penerima program bantuan dari berbagai Lembaga	a) Menghasilkan berbagai data strategis dari dan hingga level desa/kelurahan → Prioritas utama Database Penduduk Miskin “By Name By Address” dengan data klasifikasi/tipologi sampai level desa/kelurahan’ yang menggunakan sistem Sumber pemuktahiran data strategis yang “real time”. b) Terbangunnya Aplikasi SI-MANDATARIS -Single Database - Kemiskinan (Data Terpusat dan Terpadu) yang dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem yang lain sehingga data kemiskinan dan juga data-data strategis lainnya menjadi sinkron dan konsisten.
Pelaksana	Bappelitbangda, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Tenaga Pendamping Professional Desa) dan BPS	

4.3 Inovasi Daerah

Keberhasilan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), maupun yang sifatnya tahunan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung pula oleh inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan maupun dalam program pembangunan daerah. Sampai dengan Tahun 2020 ada beberapa inovasi program pembangunan di provinsi NTT yang dilaksanakan terutama dalam mendukung penanganan masalah kemiskinan dan stunting serta masalah pengembangan pertanian terpadu lahan kering.

4.3.1 Inovasi Kolaborasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting

4.3.1.1 Input

a. Regulasi

- ❖ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, khususnya Prioritas Pembangunan Menurunkan Angka Kemiskinan dan Stunting di NTT.
- ❖ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Provinsi NTT Tahun 2018-2023.
- ❖ Keputusan Gubernur Nomor Nusa Tenggara Timur Nomor 285/KEP/HK/2019 tentang Tim Teknis Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

- ❖ Keputusan Gubernur Nomor 63/KEP/HK/2020 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTT Tahun 2020.
- ❖ Keputusan Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT Nomor BP4D.050.13/PEMSOS/173/2019 tentang Tim Kelompok Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Provinsi NTT Tahun 2019.

b. Anggaran

Dukungan anggaran dilakukan secara kolaboratif melalui pengalokasian APBD pada masing-masing Perangkat Daerah tingkat Provinsi yang terkait dan keterpaduan dukungan anggaran APBD dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas penanganan kemiskinan dan stunting.

c. Sumberdaya Manusia

Pemetaan secara berjenjang peran/tugas sumberdaya manusia pada Perangkat Daerah tingkat Provinsi yang terkait dengan penanganan kemiskinan dan stunting, lembaga keagamaan sampai dengan tenaga lapangan pendamping PKH, pendamping Lokal Desa, Kader Posyandu, pendamping Pustu dan Puskesmas, penyuluh pertanian dan perangkat Desa, searah dengan pemetaan tugas dari masing-masing Perangkat Daerah/Lembaga.

d. Institusi

Pemetaan dan optimalisasi peran dari 10 Perangkat Daerah/Lembaga Pemerintah (Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas Pertanian dan KP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas P dan K, Dinas P3A, Dinas Kependudukan, BPOM dan BKKBN) serta Lembaga Keagamaan yang terkait dengan penanganan kemiskinan dan stunting sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

4.3.1.2 Proses

- a. Kolaborasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting dilakukan dalam dua dimensi yaitu (1) kolaborasi penanganan bersama masalah kemiskinan dan masalah stunting, (2) kolaborasi antara Pemerintah Daerah melalui beberapa Perangkat Daerah dengan Lembaga Keagamaan.
- b. Fokus kolaborasi intervensi penurunan kemiskinan dan stunting pada (1) penurunan TFR/Total Fertility Rate, (2) optimalisasi perlindungan sosial (PKH, Rastra/Sembako, JKN, KIP) sampai tingkat desa, (3) penyediaan kebutuhan dasar rumah, sanitasi dan air bersih, (4) pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan berbasis ketahanan pangan masyarakat.
- c. Lokus kolaborasi pada tingkat desa/kelurahan meliputi 344 Desa prioritas penanganan kemiskinan dan stunting di NTT.
- d. Proses yang dilakukan meliputi :
 - ❖ Identifikasi dan pemetaan peran/tugas dari Perangkat Daerah dan Lembaga Terkait.
 - ❖ Verifikasi dan penetapan sasaran penerima manfaat.
 - ❖ Penetapan skema jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi di lokasi prioritas.
 - ❖ Pengalokasian dan operasional dukungan anggaran/kegiatan pada Perangkat Daerah.
 - ❖ Pengawasan pelaksanaan kegiatan jaminan sosial (PKH, RASTRA/SEMBAKO, PBI, JKN,KIP) ditingkat Desa.
 - ❖ Penyiapan dan operasional skema intervensi jaminan sosial kolaborasi provinsi dan kabupaten/kota.
 - ❖ Penyiapan dan operasional skema intervensi gizi dan kelompok rentan stunting kolaborasi provinsi dan kabupaten/kota.
 - ❖ Kolaborasi pendampingan dan pembinaan oleh Dinas Sosial (pendamping PKH), Dinas PMD (pendamping lokal desa dan kader posyandu),

Dinas Kesehatan (Pendamping Pustu dan Peskesmas) dan Dinas Pertanian (pendamping penyuluh pertanian) bersama dengan lembaga keagamaan dan perangkat Desa.

- ❖ Monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dari Desa sampai ke tingkat Provinsi.
- e. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kolaborasi penanganan kemiskinan dan stunting antara lain :
 - ❖ Koordinasi operasional antara Perangkat Daerah dan secara berjenjang masih belum berjalan dengan baik.
 - ❖ Pendampingan dan pembinaan dilapangan masih belum fokus pada intervensi penanganan yang terpadu.
 - ❖ Masih terbatasnya dukungan TIK dalam inovasi kolaborasi penanganan kemiskinan dan stunting.

4.3.1.3 Output

- a. Pemetaan peran/tugas Perangkat Daerah dan Lembaga terkait dalam kolaborasi penanganan kemiskinan dan stunting.
- b. Lokasi (Desa) Prioritas Model Penanganan Kemiskinan dan Stunting.
- c. Data penduduk miskin dan rentan stunting sebagai sasaran (nama dan alamat).
- d. Skema kolaborasi provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan kemiskinan dan stunting.

4.3.1.4 Outcome

- a. Meningkatnya peran dari masing-masing perangkat daerah serta dukungan dari lembaga keagamaan dan lembaga terkait lainnya.
- b. Meningkatnya lokasi prioritas dari 144 Desa menjadi 344 Desa Model penanganan.
- c. Meningkatnya pelayanan jaminan sosial dan intervensi pada masyarakat miskin dan rentan stunting.

4.3.2 Inovasi Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS)

4.3.2.1 Input

a. Regulasi

- ❖ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, dengan salah satu prioritas pembangunannya adalah Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui optimalisasi pertanian terintegrasi di lahan kering.
- ❖ Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Nomor 521.1/TPH/4206.G/VI/2019 tentang Penetapan Kelompokkani Pelaksana Kegiatan Pertanian Terintegrasi Pengembangan Jagung Model Tanam Jagung panen Ternak pada Lahan Kering di Provinsi NTT Tahun 2019.
- ❖ Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Nomor 521.1/TPH/653/II/2020 tentang Penetapan Tim Tenaga Ahli dan Honor Tim Tenaga Ahli Tingkat Provinsi Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Penanaman Jagung dengan Pola Integrasi (Pertanian dan Peternakan) Provinsi NTT Tahun 2020.

b. Anggaran

Dukungan APBD Provinsi NTT yang dialokasikan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

c. Sumberdaya Manusia

Aparat/ASN pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT yang terorganisir dalam

Kelompok Kerja (Pokja) untuk penanganan manajemen TJPS, Petugas/Aparat pendamping dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi NTT untuk teknologinya dan Penyuluh Pertanian sebagai pendamping lapangan.

d. Institusi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT sebagai Pengerak utama/manajemen TJPS, didukung oleh BPTP Provinsi NTT sebagai basis model dan teknologi, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Kelompoktani sebagai sasaran/pelaksana TJPS serta kelembagaan pendukung bisnis jagung dan sapi.

e. Teknologi

Penerapan TJPS dilakukan melalui kolaborasi beberapa komponen teknologi yaitu teknologi budidaya jagung, teknologi pemeliharaan ternak sapi, teknologi budidaya tanaman pakan ternak, teknologi ransum pakan sapi, yang didukung dengan manajemen TJPS dan penguatan petani dalam manajemen dan penguasaan teknologi.

f. Sarana prasarana

Lahan dan Sarana produksi pertanian (benih bersertifikat, pemupukan berimbang dan obat-obatan) merupakan sarana utama yang dibutuhkan, disamping sarana prasarana yang mendukung penanganan panen, pasca panen dan pemasaran.

4.3.2.2 Proses

- a. Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) merupakan tagline manajemen usahatani untuk memberi semangat kepada petani NTT agar dengan menanam jagung bisa memanen sapi dalam jangka waktu yang sangat cepat.
- b. Model pengelolaan TJPS adalah petani menanam jagung dan memproduksi pipilan jagung antara 4-5 ton/rumah tangga petani.

- c. Selanjutnya hasil jagung yang diperoleh, petani dan petugas lapangan membuat komitmen bahwa hasil jagung yang diperoleh dijual setelah menyisihkan untuk kebutuhan pangan (*food security*) sebanyak 1 ton dan sisanya 3-4 ton dijual.
- d. Hasil penjualan 3-4 ton jagung pipilan kering digunakan untuk membeli sapi sebagai sebagai upaya untuk petani miliki sapi (petani memiliki sapi melalui usahatani jagung).
- e. Secara teknis integrasi jagung-sapi adalah usahatani berbasis 2 komoditas, dimana setelah jagung dipanen bijinya, limbahnya dapat digunakan sebagai pakan sapi dan selanjutnya kotoran sapi yang dihasilkan dapat diolah menjadi pupuk organik yang dapat digunakan pada lahan jagung.
- f. Pengembangan usaha dalam skala kawasan dan skala ekonomi (minimal petani lahan usahatani jagung 1 ha dan belum memiliki sapi).
- g. Proses yang dilakukan meliputi :
- ❖ Penyiapan dukungan anggaran dan Pedoman Pelaksana.
 - ❖ Kordinasi teknis dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pelaksana melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 - ❖ Identifikasi dan pemetaan Calon Pelaksana (kelompok-tani-petani) dan Calon Lokasi (CPCL).
 - ❖ Penyiapan lahan dan sarana produksi pertanian.
 - ❖ Pelatihan/penyiapan Kelompok-tani-petani dalam penguasaan teknologi TJPS.
 - ❖ Distribusi sarana produksi dan penanaman jagung.
 - ❖ Pendampingan dan penyuluhan.
 - ❖ Pemupukan berimbang, pengendalian hama/penyakit, panen dan pasca panen.
 - ❖ Pemasaran jagung pipilan secara kolektif/skala usaha (3-4 ton/RT) dan pembelian sapi.
 - ❖ Lanjut pola usahatani jagung yang dipadukan dengan usaha ternak sapi.

h. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan TJPS antara lain :

- ❖ Intensitas dan distribusi curah hujan yang tidak menentu sehingga ada lahan yang gagal tanam dan gagal panen.
- ❖ Kelompok tani/petani pelaksana masih didominasi kelas kemampuan pemula, sehingga mempengaruhi proses adopsi teknologi.
- ❖ Lahan usaha tani TJPS yang tersebar sangat mempengaruhi proses pengumpulan hasil, pasca panen dan pemasaran.
- ❖ Intensitas pendampingan dan penyuluhan masih terbatas karena lahan TJPS yang tersebar.

4.3.2.3 Output

- a. Terlaksananya TJPS di 7 Kabupaten dan 70 Desa.
- b. Realisasi tanam TJPS seluas 2.400 ha.

4.3.2.4 Outcome

- a. Meningkatnya produktivitas jagung menjadi 4-5 ton/ha.
- b. Meningkatnya penerapan teknologi budidaya jagung, teknologi pemeliharaan ternak sapi, teknologi budidaya tanaman pakan ternak, teknologi ransum pakan sapi.
- c. Meningkatnya populasi dan usaha ternak sapi.

4.3.3 SI MANDATARIS (Sistem Informasi Data Strategis)

4.3.3.1 Input

- a. Regulasi
 - ❖ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023,

khususnya Prioritas Pembangunan Daerah Reformasi Birokrasi.

b. Anggaran

Dukungan APBD Provinsi NTT yang dianggarkan melalui Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2021.

c. Sumber Daya Manusia

Secara umum sumber daya yang dibutuhkan adalah kolaborasi unsur ASN, Statistik dan Tenaga Pendamping Profesional Desa serta tenaga IT dan administrator baik di lapangan maupun yang membackup data server.

d. Institusi

Bappelitbangda Provinsi NTT sebagai motor penggerak utama yang berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi NTT sebagai penyedia Master Data Survey dan Analisis Statistika. Selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di dukung oleh Tenaga Pendamping Profesional Desa sebagai penggerak utama survey yang akan dilakukan kepada masyarakat.

e. Teknologi

Pada Tahap I Aplikasi SI MANDATARIS masih berbasis web/web-base yang dikelola menggunakan server khusus SI MANDATARIS.

f. Sarana Prasarana

Untuk kebutuhan penyediaan data dibutuhkan Penyediaan Infrastruktur, topologi sisytem dan Kelembagaan yang melibatkan Sumber Daya Manusia untuk mengelolanya.

4.3.3.2 Proses

- a. Langkah awal SI MANDATARIS di tahun 2021 diawali oleh data potensi desa (PODES) dan Sensus yang dilakukan oleh BPS melalui Tenaga Pendamping Profesional Desa serta kompilasi database penerima program bantuan dari berbagai Lembaga (untuk kepentingan pembangunan prioritas berupa database penduduk miskin “*by name by address*”).

- b. Pilot Project SI MANDATARIS pada 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota se Provinsi NTT antara lain: Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. Malaka, Kab. Manggarai Timur dan Kab. Manggarai Barat.
- c. Cara kerja Infrastruktur, Topologi System dan Kelembagaan sebagai berikut :



- ❖ Technical Support dilakukan untuk proses implementasi SIMANDATARIS. Kelengkapan yang dibutuhkan antara lain mempersiapkan Buku 1 (Pedoman Kepala Bps, Bappelitbangda, Diskominfo, Dinas Terkait (Provinsi), Buku 2 (Pedoman Pemeriksaan, Pelengkapan Dan Pemantauan (Correction, Completion & Monitoring) SI MANDATARIS dan Mekanisme Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik SI MANDATARIS Bagi Petugas Pemeriksa), Buku 3 (Pedoman Pengumpulan dan Entri Data dan Mekanisme Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik SI MANDATARIS bagi Petugas Pencacahan), Buku 4 (Pedoman Penjaminan Kualitas (Pemeriksaan) dan Uji Petik/Post Enumeration Survey (Pes) Data SI MANDATARIS di Level Desa/ Kelurahan).

- ❖ Administrator melakukan verifikasi data dan instrumen komponen data SIMANDATARIS yang dibutuhkan pada pengambilan data di lapangan.
- ❖ Operator melakukan Implementasi / pencacahan data by name by adres di lapangan berdasarkan instrumen komponen data yang diberikan;
- ❖ SKPD terkait sebagai pendukung database tambahan yang diperlukan SIMANDATARIS seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil.
- ❖ Eksekutif sebagai pucuk pimpinan tertinggi didalam pengambilan kebijakan dan keputusan terkait seluruh pelaksanaan SI MANDATARIS.
- ❖ Tim IT Pengelola Database Server dan Aplikasi SI MANDATARIS dengan sistem Single Database dan Aplikasi serta interkoneksi dengan Aplikasi Pendukung SIMANDATARIS lainnya yang bersifat real time dengan Fitur Aplikasi antara lain:
 - Pendataan Kemiskinan;
 - Indikator Kemiskinan; indikator kemiskinan keluarga yang mengacu pada data/formulir yang dipakai untuk menghitung indeks kemiskinan;
 - Single Database&Aplikasi;
 - Peta Interaktif; dan
 - Laporan (Data Grafis dan Tabel).

d. Potensi Pengembangan SI MANDATARIS adalah menuju system yang menyediakan data *'by name by address'* dengan keunggulan sebagai berikut:

- ❖ Sistem Informasi Managemen Pengelolaan Database Kemiskinan.
- ❖ SIM Pengelolaan IntervensiKemiskinan dan Raport Kemiskinan yaitu :
 - Integrasi SIM Kemiskinan dengan berbagai Sistem di Pemerintah Daerah (Program Intervensi dll)
 - Raport Kemiskinan RT, Individu
 - Pemetaan Kemiskinan dan Dashboard Kemiskinan

- ❖ Berbasis Mobile Application Surveyor(Android).
- e. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SI MANDATARIS:
 - ❖ Secara umum untuk pelaksanaan Tahap I untuk 10 Kabupaten/Kota tidak mengalami kendala baik dalam hal anggaran dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota peserta pilot project SI MANDATARIS.
 - ❖ Untuk pengembangan ke depan, Pemerintah Provinsi NTT membutuhkan dukungan dana bagi penambahan peserta SI MANDATARIS Tahap II di 12 Kabupaten/Kota yang belum mendapatkannya.

4.3.3.3 Output

- a. Menghasilkan berbagai data strategis dari dan hingga level desa/kelurahan dengan Prioritas utama Database Penduduk Miskin “*By Name By Address*” dengan data klasifikasi/tipologi sampai level desa/kelurahan’ yang menggunakan sistem Sumber pemuktahiran data strategis yang “real time”.
- b. Terbangunnya Aplikasi SI-MANDATARIS -Single Database -Kemiskinan (Data Terpusat dan Terpadu) yang dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem yang lain sehingga data kemiskinan dan juga data-data strategis lainnya menjadi sinkron dan konsisten.

4.3.3.4 Outcome

Pelaksanaan SI MANDATARIS secara signifikan memberikan dampak yang sangat besar pada prioritas pembangunan daerah yang ke 7 yaitu Reformasi Birokrasi dimana berdampak juga pada Prioritas daerah lainnya yang berhubungan dengan penyediaan data “*by name by address*” . Dampak besar yang akan dirasakan berkontribusi untuk peningkatan target pencapaian Misi 5 Reformasi Birokrasi pada RPJMD P Provinsi NTT Tahun 2028-2023 antara lain:

- a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik; dan
- c. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik.

4.4 Strategi Menghadapi Covid 19 dan Badai Siklon Seroja (Siklon Tropis 99S)

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian, dengan mengacu kepada Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Anggaran. Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid19). Inti dari Inpres ini adalah agar Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan penyesuaian anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan untuk difokuskan kepada penanganan Covid-19.

Sehubungan dengan ini, dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah mengambil 3 langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2020. *Pertama*, adalah Refocussing Anggaran K/L dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk percepatan penanganan COVID-19. *Kedua*, Realokasi Cadangan Belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19. *Ketiga*, penghematan belanja K/L dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19.

Refocussing rambu-rambunya adalah menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direalokasi. Belanja modal ditunda untuk dikerjakan secara multi year, kegiatan proyek yang sudah dikontrakkan untuk dinegosiasikan lagi kepada pihak ketiga untuk bisa ditunda pengerjaannya. Belanja yang dikecualikan dari pemotongan adalah belanja untuk penanggulangan dampak COVID-19, serta belanja untuk penanggulangan stunting, kematian ibu dan bayi, dan pemberantasan penyakit menular lain seperti TBC, HIV-AIDS, DBD, tetap dijaga efisiensi & efektivitasnya.

Realokasi yang dilakukan K/L antara lain:

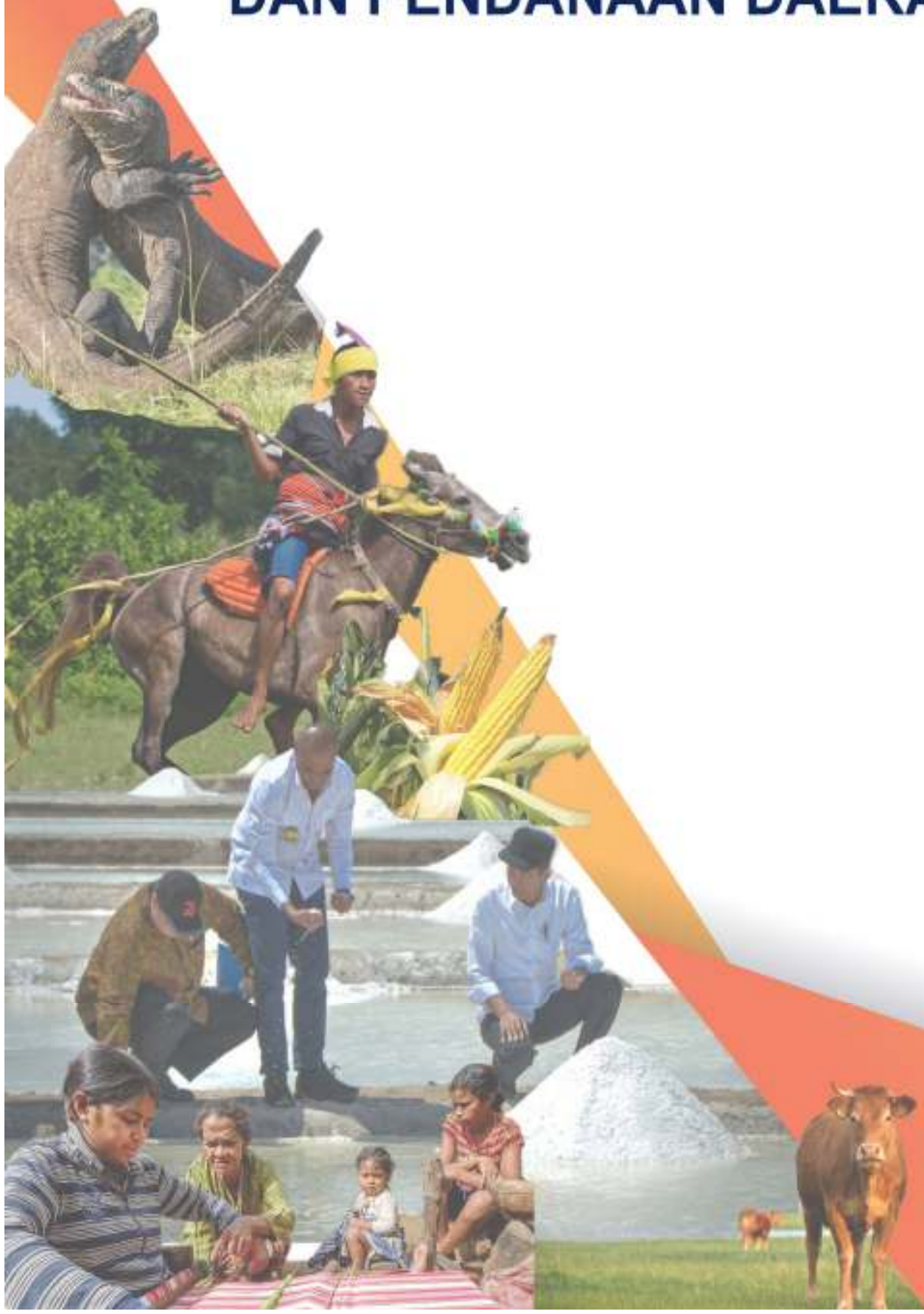
1. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yaitu pengadaan/distribusi obat buffer stock, alat/bahan pengendalian COVID-19, pengadaan APD ke RS yang menangani COVID-19, pengiriman alat kesehatan (alkes) ke Natuna/Sebaru, pengadaan tes cepat COVID-19, sosialisasi/edukasi, pemeriksaan laboratorium specimen COVID-19.
2. Kemendikbud, yaitu kegiatan terkait COVID-19 pada RS Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
3. Kemenhan, berupa pengadaan alat kesehatan RSPAD dan RS dr. Sutoyo; pengadaan rapid test.
4. Polri, menambah anggaran satgas COVID-19 di Polri. Untuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) digunakan untuk evakuasi WNI, pembelian tiket bagi WNI terlantar di airport (penampungan & makan).
5. Sementara untuk K/L lainnya, digunakan untuk membeli peralatan dan bahan, seperti tenda disinfektan, thermo scanner, sanitizer, masker, sarung tangan, dan rapid test.
6. Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan arahan tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta Perubahan APBD 2020, dibagi dalam tiga tahap : Pertama, mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan dan penanganan Covid-19; Kedua, menyiapkan alokasi anggaran untuk program jaring pengaman sosial, dan Ketiga, melakukan refocussing terhadap kegiatan yang sudah ada di Perangkat Daerah (PD) dengan melakukan perubahan terhadap sasaran kegiatan yang diarahkan sebagai stimulan perekonomian masyarakat.
7. Kemudian pada tahun 2021, kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan melakukan refocusing tahap I dan Tahap II dengan skema anggaran diperuntukkan untuk percepatan Penanganan Covid19. Belanja Tak Terduga terutama digunakan untuk program-program penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi NTT yang melonjak sejak akhir tahun 2020.

8. Menyusul Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 118/KEP/HK/2021 pada tanggal 6 April 2021 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan, kerusakan rumah warga tercatat sebesar 65,9 ribu rumah, dengan rincian sebanyak 52,7 ribu rusak ringan, 6,8 ribu rusak sedang, dan 6,3 ribu mengalami rusak berat, serta korban jiwa sebanyak 182 orang pada 21 Kab/Kota. Dengan kondisi tersebut, langkah awal yang dilakukan pemerintah daerah terhadap sektor pertanian adalah percepatan pendataan dan verifikasi data perikanan pada masa tanggap darurat bencana hingga 7 Mei 2021 untuk dilaporkan kepada Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait. Selanjutnya, pemerintah daerah mempercepat musim tanam padi dan jagung (April – September), mengganti tanaman rusak dan menyiapkan benih untuk wilayah kab/kota dengan kondisi air yang masih mencukupi. Penanganan terhadap kerusakan tanaman hortikultura juga dilakukan melalui percepatan panen dan pengolahan tanah, penanaman menggunakan Brigade pertanian (alsintan), serta perbaikan infrastruktur pertanian (pengairan/irigasi, bendungan)
- ³. Di sisi lain, perbaikan sektor peternakan dan perikanan juga didorong dengan memberikan bantuan benih rumput laut, bantuan pembangunan kapal sebanyak 300 unit kapal kecil (1-10 GT)⁴, bantuan obat-obatan dan pemantauan kondisi pelayanan kesehatan ternak, serta memfasilitasi pemasukan daging ayam karkas untuk memenuhi kebutuhan Provinsi NTT akibat kematian ayam yang mencapai 31,1 ribu ekor.

BAB V

RENCANA KERJA

DAN PENDANAAN DAERAH



Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, tujuan, sasaran dan prioritas daerah tahun 2021 tidak banyak mengalami perubahan, kecuali penyesuaian pada target capaian indikator yang telah ditetapkan. Karena itu, program dan kegiatan sebagai cara proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan dilakukan penyesuaian, walaupun penyesuaian tersebut tidak mengubah hasil *outcome* yang ingin dicapai.

Penyesuaian program, kegiatan dan pagu anggaran ini dilakukan khususnya untuk :

- a) Menampung berbagai kebijakan yang dilakukan dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19*, menyesuaikan asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b) Menyesuaikan capaian target kinerja program dan kegiatan;
- c) Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan untuk tahun anggaran berjalan;
- d) Menampung hasil audit terkait pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2020;
- e) Menampung revisi dan kegiatan mendahului perubahan APBD;
- f) Menyesuaikan indikator dan lokasi kegiatan yang mengalami perubahan antara KUA-PPAS Induk dan DPA-SKPD.

Yang harus menjadi perhatian adalah Pemerintah dalam hal ini seluruh perangkat daerah pelaksana program dan kegiatan adalah memperhatikan penyerapan belanja khususnya belanja langsung yang telah dialokasikan, dan memastikan semua program dan kegiatan harus bisa dilaksanakan dan fungsional. Penambahan kegiatan baru dilakukan secara selektif, dengan kriteria: 1) kegiatan yang dilaksanakan mendukung optimalisasi pencapaian target RPJMD, 2) mendukung pelaksanaan kebijakan Pusat, 3) Bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD 2020 karenanya memuat kegiatan yang perlu dilakukan untuk menangani *Covid-19*, pergeseran kegiatan antar unit kerja Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar program serta melakukan penyesuaian target kinerja sesuai realokasi anggaran yang ada. Adapun Struktur Perubahan APBD dalam RKPD Perubahan sebagai berikut :

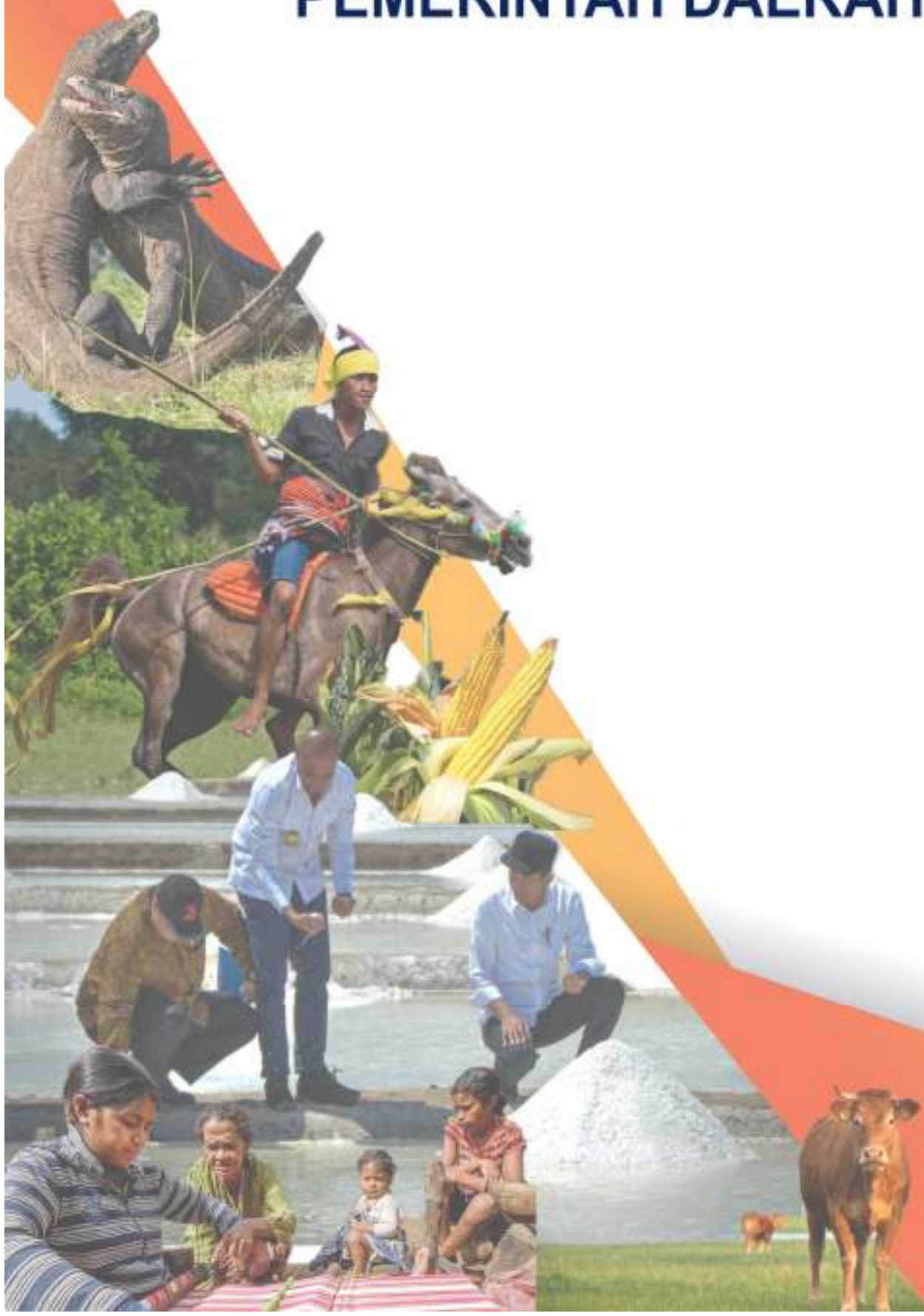
Tabel 5.1
Struktur Perubahan APBD Dalam RKPD Perubahan Tahun 2021

No.	Perangkat Daerah	RKPD 2021	RKPD Perubahan 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.135.351.637.360,00	2.867.961.068.633,00
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	212.296.000.000,00	285.149.376.484,00
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	479.864.273.805,00	247.930.070.023,00
4	Dinas PUPR	2.020.502.108.914,00	1.636.606.972.546,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	8.288.392.000,00	15.907.984.294,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.574.897.000,00	11.036.847.619,00
7	Dinas Sosial	62.234.656.500,00	37.017.810.498,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.811.066.400,00	8.396.123.274,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	255.131.238.004,00	261.559.181.131,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	66.760.867.200,00	52.911.697.400,00
11	Dinas Perhubungan	174.379.993.109,00	37.202.816.492,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	71.502.271.000,00	11.937.181.838,00
13	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	33.011.246.750,00	32.639.572.937,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8.016.418.500,00	10.211.538.072,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	95.174.220.450,00	19.025.643.128,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.645.911.000,00	18.117.559.297,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	214.509.240.000,00	222.490.031.184,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	43.330.267.500,00	20.865.949.329,00
19	Dinas Peternakan	35.932.000.000,00	137.508.930.022,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	333.027.171.400,00	181.010.408.991,00
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	33.279.000.000,00	16.193.056.092,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.094.056.500,00	14.920.825.474,00
23	Biro Umum	89.277.286.740,00	108.502.358.049,00
24	Biro Hukum	3.057.196.421,00	2.229.178.620,00
25	Biro Organisasi	10.472.000.000,00	2.203.615.852,00
26	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	4.358.000.000,00	1.902.441.459,00
27	Biro Pemerintahan	12.317.171.450,00	2.341.950.880,00
28	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4.022.400.000,00	8.591.640.714,00
29	Biro Administrasi Pimpinan	12.622.500.240,00	4.419.513.700,00
30	Sekretariat DPRD	274.251.798.500,00	135.016.624.167,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	21.841.243.900,00	31.601.735.270,00
32	Badan Keuangan Daerah	31.087.000.000,00	972.165.901.929,00
33	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	23.685.000.000,00	121.194.759.314,00
34	Badan Kepegawaian Daerah	19.981.357.000,00	19.883.384.339,00
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	37.055.380.000,00	59.530.833.628,00
36	Badan Pengelola Perbatasan	3.202.000.000,00	6.230.660.132,00
37	Badan Penghubung	2.437.221.571,00	5.743.583.380,00
38	Inspektorat Daerah	24.306.871.241,00	25.200.494.168,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.520.188.200,00	7.387.316.370,00
	TOTAL	5.914.211.548.655,00	7.660.746.636.729,00

Rincian program, kegiatan, indikator dan pagu per perangkat daerah sebagaimana terlihat dalam lampiran dari dokumen ini.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2021.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2021 disajikan sebagaimana Tabel 6.1. dan 6.2 berikut.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021

INDIKATOR	TAHUN
	2021
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil	
Pertumbuhan PDRB (%)	3,18 – 4,18
Inflasi (%)	2,1 – 3,1
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	19-20
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	20 - 23
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,2 -2,6
% PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	25,31
Indeks Gini (Poin)	0,35 - 0,34
Indeks Pembangunan Gender (Poin)	94
Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	
Persentase Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)	4
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	4
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.065.378
Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan	
Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	90
Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	9,08
Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	75.02
Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	15.498
Rasio Elektrifikasi (%)	75
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	67
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2)	17.248.829
Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang	72,73
Indeks Resiko Bencana (Poin)	140
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	
Angka Melek Huruf (%)	96,56

INDIKATOR	TAHUN
	2021
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,25
Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,2
Usia Harapan Hidup (Tahun)	68,1
Prevelensi Stunting (%)	21,8
Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	60
Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	65
Opini BPK (Opini)	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	A
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,3
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	50
Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	85
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,4

Sumber : RPJMD-P Prov. NTT Tahun 2018-2023, Bab V (data di update)

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun 2021

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
	- Pertumbuhan PDRB	%	3,18 - 4,18
	- Inflasi	%	2,1 - 3,1
	- PDRB per Kapita	(Rp. Juta)	20 - 23
	- Indeks Gini	Poin	0,35 - 0,34
	- Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	1,05
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin	4,02
	- Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65.54 - 67,00
	- Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,25
	- Angka Melek Huruf	%	96,56
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,2 -2,6
	- Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	25,31
	- Usia Harapan Hidup	Tahun	68,1
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,58
	- Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja	%	24,36
	- Opini BPK	Opini	WTP
	- Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Skor	67
	- Share Lapangan Usaha Penyediaan akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	0,76
	- Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB	%	2,23
	- Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	12,12
B	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	Layanan Urusan Wajib Dasar		
1	Pendidikan Menengah		
	- Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,25
	- Angka Melek Huruf	%	96,56
2	Urusan Kesehatan		
	- Kasus Kematian Ibu	Kasus	0
	- Kasus Kematian Bayi	Kasus	0
	- Kasus Kematian Balita	Kasus	0

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	- Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	%	90
	- Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	%	77
	- Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak	%	83
	- Persentase Rumah tangga menurut Sanitasi Layak	%	77
	- Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang	%	72,73
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	- Penambahan Rumah Layak Huni	Unit	15.498
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
	- Meningkatkan pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100
	- Meningkatkan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan)	%	100
6	Urusan Sosial		
	- Meningkatkan Penyelenggaraan dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi PMKS *Target 22 Kab/Kota)	%	80
7	Urusan Tenaga Kerja		
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,2 -2,6
	- Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja	%	24,36
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	- Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Perwakilan Provinsi	%	30
	- Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani	%	75
	- Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani	%	75
	- Persentase Pencapaian Tahapan Desa/Kelurahan Layak Anak	%	32,2
9	Urusan Pangan		
	- Skor Pola Pangan Harapan	Skor	67
10	Urusan Pertanian		
	- Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	
11	Urusan Lingkungan Hidup		
	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	67
12	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	- Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada/ Tidak ada	Ada
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	- Posyandu Aktif	Unit	5.792
	- BUMDes Aktif	Unit	960
	- Cakupan Desa/Kelurahan Model Kerja PKK dan Perangkat Daerah	Desa/ Kel	10,52
14	Urusan Perhubungan		
	- Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	%	9,08
	- Dwelling Time Pelabuhan	Hari	4
15	Urusan Komunikasi dan Informatika		
	- Skor PeGi Peningkatan E-government	Skor	80 (Menuju Informatif)
	- Persentase Informasi Publik yang disediakan dan di Publikasi	%	80
	- Meningkatkan Indeks Penyelenggaraan SPBE	Poin	2,3
16	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
	- Rasio UMKM dan Koperasi terhadap Populasi Penduduk	Poin	1
17	Urusan Penanaman Modal		
	- Realisasi Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	Rp.T	5,7
18	Urusan Kepemudaan dan Olahraga		

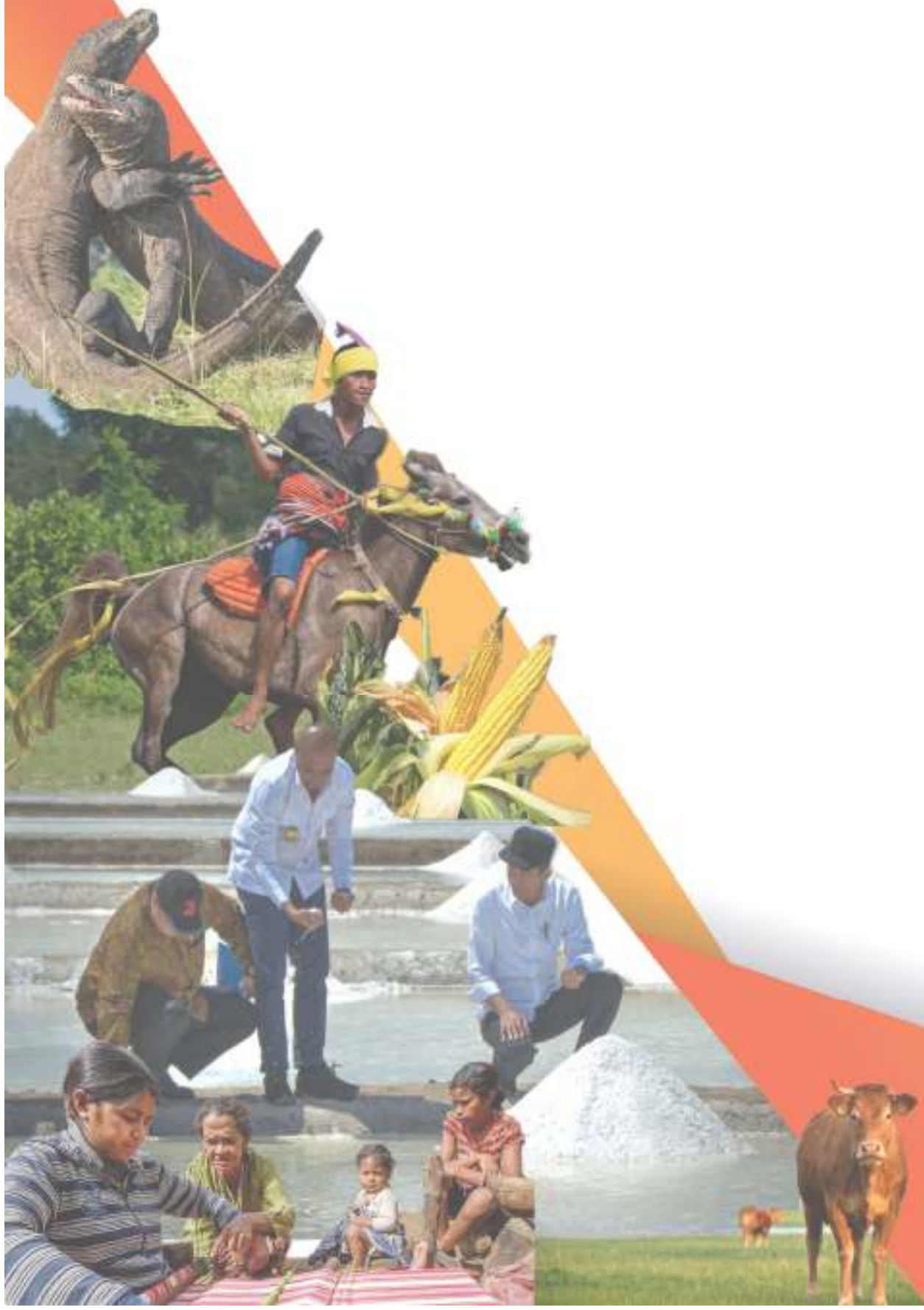
No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021
	- Jumlah medali yang diperoleh dalam Penyelenggaraan Olahraga Tingkat Regional, Nasional dan Internasional	Buah	9
	- Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan	%	60
19	Urusan Statistik		
	- Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak	Ada
20	Urusan Kebudayaan		
	- Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	25,9
21	Urusan Perpustakaan dan Kearsipan		
	- Persentase Angka kunjungan Perpustakaan per Tahun	%	50,0
	- Pengelolaan Arsip secara Baku	%	100
22	Urusan Pertanian		
	- Nilai Tukar Petani	Poin	102
23	Urusan Pariwisata		
	- Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.165.378
	- Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	4
24	Urusan Kehutanan		
	- Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	%	1,14
25	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral		
	- Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	80
26	Urusan Kelautan dan Perikanan		
	- Nilai Tukar Nelayan	Poin	106
27	Urusan Perindustrian dan Perdagangan		
	- Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	%	61,29
28	Urusan Transmigrasi		
	- Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	%	70
29	Urusan Perencanaan Pembangunan		
	- Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100
	- Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	%	100
30	Urusan Keuangan		
	- Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang - undangan	%	100
31	Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan		
	- Persentase Keterisian SKP Online	%	100
32	Urusan Penelitian dan Pengembangan		
	- Capaian Indeks Inovasi Daerah	Poin	11.721
	- Capaian Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,391
33	Urusan Pengawasan		
	- Opini Laporan BPK	Opini	WTP
34	Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
	- Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	%	100
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1.	Nilai Tukar Petani	Poin	102
2.	Rasio Ketergantungan	%	63,50
3.	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	%	61,29

Sumber : RPJMD-P Prov. NTT Tahun 2018-2023, Bab V (data di update)

No.	Bidang Urusan/Indikator Pembangunan Daerah	Satuan	2021
B	ASPEK PELAYANAN UMUM <i>Pelayanan Urusan Wajib :</i> Terkait Pelayanan Dasar		
2	Pendidikan Menengah - Rata-rata lama sekolah - Angka melek huruf	thn %	8,25 94,56
3	Urusan Kesehatan - Angka kematian ibu - Angka kematian bayi - Angka kematian balita	kasus kasus kasus	0 0 0
4	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang - Persentase jalan dalam kondisi baik - Daerah irigasi dalam kondisi baik - Jumlah rumah tidak layak huni	km ha unit	339 3.600 228.990
5	Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat - Persentase pemilih dalam menggunakan hak pilih Melalui pemilu : - Pilpres - Pilkada - Presentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
6	Urusan Sosial - Persentase PMKS yang ditangani	%	17
	Pelayanan Urusan Tidak Terkait Pelayanan Dasar		
7	Urusan tenaga kerja - Tingkat pengangguran terbuka	%	2,3
8	Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - % Perempuan dalam Lembaga Perwakilan Provinsi - Jumlah kasus KDRT - Persentase Pencapaian Tahapan Desa/Kelurahan Layak Anak	% Kasus %	30 210 4,5
9	Urusan pangan - Skor pola pangan harapan	poin	80
10	Urusan lingkungan hidup - Indeks kualitas lingkungan hidup	poin	67
11	Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa - Posyandu aktif - BUMDes aktif	Unit Unit	5792 960
12	Urusan perhubungan - Persentase angkutan umum layak jalan		
13	Urusan komunikasi dan informatika - Skor PeGi pemeringkatan e-government - Persentase informasi publik yang disediakan dan dipublikasi - Persentase perangkat daerah yang telah website aktif	unit	37

No.	Bidang Urusan/Indikator Pembangunan Daerah	Satuan	2021
14	Urusan koperasi usaha kecil dan menengah		
	- Rasio UMKM dan koperasi terhadap populasi	Poin	1
15	Urusan penanaman modal		
	- Realisasi nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp.T	5,7
16	Urusan kepemudaan dan olah raga		
	- Jumlah medali yang diperoleh dalam olah raga tingkat regional, nasional dan internasional	Buah	5
	- Persentase organisasi pemuda yang dibina	%	60
17	Urusan kebudayaan		
	- Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar yang dilestarikan	%	80
18	Urusan perpustakaan dan kearsipan		
	- Persentase Angka kunjungan perpustakaan	%	55
	- Pengelolaan arsip secara baku		
	Pelayanan Urusan Pilihan		
19	Urusan pertanian		
	- Nilai tukar petani	Point	102
20	Urusan pariwisata		
	- Presentase kunjungan wisatawan	org	1.065.378
	- Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	4
21	Urusan kelautan dan perikanan		
	- Nilai tukar nelayan	poin	106
22	Urusan perindustrian dan perdagangan		
	- Persentase pertumbuhan ekspor	%	
23	Urusan transmigrasi		
	Urusan pemerintahan		
24	Urusan perencanaan pembangunan		
	- Persentase usulan masyarakat yang Dokumen perencanaan	%	100
	- Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	100
	- Persentase ketersediaan data dan informasi	%	100
	- Perencanaan pembangunan	%	100
25	Urusan keuangan dan asset		
	Opini laporan BPK	opini	WTP
26	Urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan		
	Nilai rata-rata SKP	Point	
27	Urusan kelitbangan		
	- Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan	laporan	20

BAB VII PENUTUP



Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2021 dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang terbatas maka dalam implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah semua Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Persyaratan utama dalam implementasi perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendapatkan keterpaduan Program dan Kegiatan yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur dari berbagai sumber pendanaan, baik sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan dari stakeholders lainnya yang berasal dari swasta, maupun bantuan pendanaan melalui NGO dan Lembaga Kejasama Bilateral dan Multilateral.

Koordinasi dan sinkronisasi ini mutlak diperlukan agar indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 dapat dicapai. Mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas, maka dalam rangka optimalisasi pencapaian indikator dan target RPJMD Perubahan, pendanaan pembangunan tahun 2021 juga diusahakan melalui skema pinjaman daerah baik untuk mendanai infrastruktur, maupun untuk membiayai sektor-sektor produktif dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu RKPD Perubahan Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi dan pelayanan umum pemerintah dan dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Bagian dari upaya koordinasi ini telah dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang mulai dari jenjang pemerintahan terendah yaitu Desa hingga pelaksanaan Musrenbang Nasional. Acuan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2021 selain dokumen perencanaan jangka menengah daerah, juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

Dalam rangka keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap Program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing perangkat daerah wajib menyempurnakan Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2021 sesuai RKPD Perubahan 2021 sebagai berikut:

1. Usulan pembangunan tahun 2021 harus di dukung perencanaan berkualitas, oleh karena itu setiap usulan program/kegiatan pembangunan harus dilengkapi kelengkapan dokumen yaitu; (a) target dan sasaran yang terukur; (b) lokasi yang jelas; (c) dokumen teknis berupa *Survey Investigation Design (SID)*, proposal dan TOR sesuai jenis program/kegiatan;
2. Untuk menjamin kepastian terpenuhinya dokumen pendukung usulan Program/kegiatan pembangunan Tahun 2021, maka Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bappeda/BP4D/Bappelitbang Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur secara intensif berkoordinasi sehingga masing-masing perangkat daerah terkait Tingkat Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pengusul memenuhi kewajibannya;
3. Bagi usulan strategis yang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota dan memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Nusa Tenggara Timur usulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat disiapkan oleh perangkat daerah Provinsi;
4. Untuk usulan strategis program/kegiatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota maka usulannya disiapkan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
5. Kegiatan fisik yang membutuhkan desain, maka pembiayaan studi desain dapat dilakukan melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2021 disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah (PD) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 dan juga sebagai dokumen acuan dalam proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tahun 2021 selanjutnya.

Semua perencanaan Program dan Kegiatan selanjutnya, tidak dapat keluar dari kerangka yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah perubahan ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat di dalam RKPD Perubahan Tahun 2021 ini.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (PERUBAHAN 2021)

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			2,804,483,142,755	2,858,767,435,340	54,284,292,585	
1	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1,955,237,842,964	2,002,250,671,028	47,012,828,064	
1	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			471,100,314,872	475,059,688,787	3,959,373,915	
1	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Pengembangan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (%)	100	100	163,552,000	163,552,000	0
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMA) (%)	100	100			
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (%)	100	100			
			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA (%)	100	100			
1	01	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasaran dan utilitas sekolah (%)	100	100	117,355,318,500	117,220,174,500	-135,144,000
1	01	Tambahan Penghasilan				108,770,000	108,770,000	0
1	01	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Manajemen Bos SMA (%)	100	100	1,708,200,000	1,708,200,000	0
1	01	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				64,072,661,040	64,251,303,840	178,642,800
1	01	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				53,494,233,611	49,157,189,311	-4,337,044,300
1	01	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				234,306,349,721	242,559,269,136	8,252,919,415
1	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			300,787,478,950	300,883,558,950	96,080,000	
1	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (SMK) (%)	100	100	299,064,000	160,000,000	-139,064,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	1	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK (%)	100	100	147,413,214,950	147,648,358,950	235,144,000
1	01	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				153,075,200,000	153,075,200,000	0
1	1	Pengelolaan Pendidikan Khusus				1,183,350,049,142	1,226,307,423,291	42,957,374,149
1	1	Pembangunan Asrama Sekolah	Pembangunan Asrama Sekolah (%)	100	100	825,360,000	740,827,500	-84,532,500
1	01	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasaran dan utilitas sekolah (%)	100	100	767,973,830	877,415,630	109,441,800
1	1	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				2,479,060,000	2,479,060,000	0
1	01	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus (%)	100	100	12,381,925,312	10,832,099,882	-1,549,825,430
1	01	Tambahan Penghasilan				34,350,000	5,125,000	-29,225,000
1	01	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				1,166,895,730,000	1,211,378,020,279	44,482,290,279
1	01	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				213,927,060	193,907,060	-20,020,000
1	01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				213,927,060	193,907,060	-20,020,000
1	01	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra (%)	100	100	213,927,060	193,907,060	-20,020,000
1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				849,031,372,731	856,322,857,252	7,291,484,521
1	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				225,864,765	93,231,790	-132,632,975
1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				27,162,265	9,455,000	-17,707,265
1	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				9,696,500	2,250,000	-7,446,500

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			52,486,750	47,426,170	-5,060,580
1	1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			52,986,880	0	-52,986,880
1	01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			23,224,750	0	-23,224,750
1	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			42,313,980	19,313,980	-23,000,000
1	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17,993,640	14,786,640	-3,207,000
1	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			839,076,706,564	848,211,449,192	9,134,742,628
1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			838,896,114,244	848,105,856,872	9,209,742,628
1	01	Tambahan Penghasilan			234,688,329,000	234,688,329,000	0
1	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			180,592,320	105,592,320	-75,000,000
1	01	Tambahan Penghasilan			2,100,000	2,100,000	0
1	01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			285,128,000	118,456,000	-166,672,000
1	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			282,696,000	116,024,000	-166,672,000
1	01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2,432,000	2,432,000	0
1	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			232,290,744	37,037,600	-195,253,144
1	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			28,740,648	5,865,600	-22,875,048
1	01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			137,000,000	30,972,000	-106,028,000
1	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			66,550,096	200,000	-66,350,096
1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			905,744,098	598,053,358	-307,690,740
1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			109,916,178	109,916,178	0
1	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			217,772,800	131,938,000	-85,834,800
1	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			61,744,800	61,744,800	0
1	1	Penyediaan Bahan/Material			285,962,320	245,546,380	-40,415,940
1	1	Fasilitasi Kunjungan Tamu			103,750,000	48,908,000	-54,842,000
1	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			126,598,000	0	-126,598,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				677,426,100	365,461,152	-311,964,948
1	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				299,978,828	113,434,960	-186,543,868
1	1	Pengadaan Mebel				170,838,000	151,338,000	-19,500,000
1	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				206,609,272	100,688,192	-105,921,080
1	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6,174,811,660	6,129,035,160	-45,776,500
1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60,996,500	45,044,600	-15,951,900
1	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)		100	923,578,200	756,750,200	-166,828,000
1	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5,190,236,960	5,327,240,360	137,003,400
1	01	Tambahan Penghasilan				100,926,000	243,120,000	142,194,000
1	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,453,400,800	770,133,000	-683,267,800
1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				181,760,000	40,320,000	-141,440,000
1	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65,016,400	4,000,000	-61,016,400
1	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung				1,206,624,400	725,813,000	-480,811,400
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				11,072,982,013	9,193,633,293	-1,879,348,720
2	22	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				4,100,675,850	2,179,467,460	-1,921,208,390
2	22	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1,750,000,000	1,750,000,000	0
2	22	Pelindungan, Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan dalam daerah provinsi (%)		100	1,750,000,000	1,750,000,000	0
2	22	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				2,152,303,090	396,647,600	-1,755,655,490

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	22	Pelindungan, Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (%)	100	100	958,408,230	0	-958,408,230
2	22	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembinaan Sumber daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan (%)	100	100	1,193,894,860	396,647,600	-797,247,260
2	22	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				198,372,760	32,819,860	-165,552,900
2	22	Pelindungan, Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat (%)	100	100	64,595,860	32,819,860	-31,776,000
2	22	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat (%)	100	100	133,776,900	0	-133,776,900
2	22	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				2,345,713,500	1,106,970,500	-1,238,743,000
2	22	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunva Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2,345,713,500	1,106,970,500	-1,238,743,000
2	22	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional (%)	100	100	776,103,500	514,437,500	-261,666,000
			pelestarian kesenian tradisional dalam daerah provinsi (%)	100	100			
			Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesenian Tradisional (%)	100	100			
2	22	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (%)	100	100	1,569,610,000	592,533,000	-977,077,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	22	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				184,399,860	177,599,860	-6,800,000
2	22	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi				184,399,860	177,599,860	-6,800,000
2	22	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (%)	100	100	184,399,860	177,599,860	-6,800,000
2	22	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				1,587,165,880	1,212,136,500	-375,029,380
2	22	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				876,661,880	501,632,500	-375,029,380
2	22	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Register Cagar Budaya (%)	100	100	117,983,770	0	-117,983,770
2	22	Penetapan Cagar Budaya				758,678,110	501,632,500	-257,045,610
2	22	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				710,504,000	710,504,000	0
2	22	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya (%)	100	100	710,504,000	710,504,000	0
2	22	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				2,093,546,120	1,797,330,250	-296,215,870
2	22	Pengelolaan Museum Provinsi				2,093,546,120	1,797,330,250	-296,215,870
2	22	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (%)	100	100	382,565,120	239,997,520	-142,567,600
2	22	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman (%)	100	100	35,000,000	29,123,330	-5,876,670
2	22	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum (%)	100	100	1,061,959,000	914,187,400	-147,771,600
2	22	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum (%)	100	100	490,622,000	490,622,000	0
2	22	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum (%)	100	100	123,400,000	123,400,000	0
2	22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				761,480,803	2,720,128,723	1,958,647,920

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	22	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				47,974,000	8,874,000	-39,100,000
2	22	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2,104,000	104,000	-2,000,000
2	22	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				9,200,000	2,490,000	-6,710,000
2	22	Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya ASN				4,200,000	350,000	-3,850,000
2	22	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4,850,000	0	-4,850,000
2	22	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5,940,000	280	-5,660,000
2	22	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				4,900,000	0	-4,900,000
2	22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17,000,000	6,000,000	-11,000,000
2	22	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3,980,000	0	-3,980,000
2	22	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19,880,000	19,760,000	-120,000
2	22	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				19,880,000	19,760,000	-120,000
2	22	Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya ASN				14,880,000	19,760,000	4,880,000
2	22	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				9,420,000	0	-9,420,000
2	22	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3,820,000	0	-3,820,000
2	22	Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya ASN				1,820,000	0	-1,820,000
2	22	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5,600,000	0	-5,600,000
2	22	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5,998,880	920,000	-5,078,880
2	22	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1,998,880	0	-1,998,880
2	22	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				4,000,000	920,000	-3,080,000
2	22	Administrasi Umum Perangkat Daerah				120,012,513	94,808,513	-25,204,000
2	22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18,597,333	18,597,333	0
2	22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12,807,200	12,807,200	0
2	22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1,996,400	1,996,400	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	22	Penyediaan Bahan/Material			19,861,580	19,861,580	0	
2	22	Fasilitasi Kunjungan Tamu			14,556,000	9,880,000	-4,676,000	
2	22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			52,194,000	31,666,000	-20,528,000	
2	22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			176,694,750	163,074,750	-13,620,000	
2	22	Pengadaan Mebel			44,910,850	31,290,850	-13,620,000	
2	22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			131,783,900	131,783,900	0	
2	22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			181,511,460	135,043,460	-46,468,000	
2	22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2,865,900	2,865,900	0	
2	22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			149,528,000	121,928,000	-27,600,000	
2	22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			29,117,560	10,249,560	-18,868,000	
2	22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			199,989,200	2,297,648,000	2,097,658,800	
2	22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			49,989,800	7,020,000	-42,969,800	
2	22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			149,999,400	2,290,628,000	2,140,628,600	
Jumlah Belanja					2,815,556,124,768	2,867,961,068,633	52,404,943,865	
RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang								
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			279,053,296,621	285,149,376,484	6,096,079,863	
1	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			78,416,001,922	78,300,343,542	-115,658,380	
1	02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			68,208,114,072	68,110,455,692	-97,658,380	
1	02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (%)	100	100	73,671,350	73,671,350	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	02	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan (%)	100	100	57,848,024,067	57,848,024,067	0
1	02	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Terlaksananya pengadaan Sarana di Fasilitas layanan kesehatan (%)	100	100	261,525,000	261,525,000	0
1	02	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan (%)	100	100	4,900,000	4,900,000	0
1	02	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium (persen)	100	100	13,103,838	13,103,838	0
1	02	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Terlaksananya Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit (%)	100	100	10,006,889,817	9,909,231,437	-97,658,380
1	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				10,165,526,200	10,165,526,200	0
1	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lingkungan (%)	100	100	499,986,000	499,986,000	0
1	02	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (%)	100	100	9,665,540,200	9,665,540,200	0
1	02	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				42,361,650	24,361,650	-18,000,000
1	02	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (persen)	100	100	42,361,650	24,361,650	-18,000,000
1	02	PROGRAM PENINGKATAN				4,751,474,120	7,145,160,200	2,393,686,080

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
	KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
1	02	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			4,613,823,120	7,009,771,200	2,395,948,080	
1	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan (persen)	100	100	4,613,823,120	7,009,771,200	2,395,948,080
1	02	Tambahan Penghasilan				2,244,000,000	4,632,000,000	2,388,000,000
1	02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				137,651,000	135,389,000	-2,262,000
1	02	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan (persen)	100	100	137,651,000	135,389,000	-2,262,000
1	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				195,885,820,579	199,703,872,742	3,818,052,163
1	02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10,773,500	8,523,500	-2,250,000
1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1,125,000	1,125,000	0
1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1,125,000	1,125,000	0
1	02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1,125,000	0	-1,125,000
1	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1,125,000	0	-1,125,000
1	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6,273,500	6,273,500	0
1	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				90,321,549,182	93,121,477,889	2,799,928,707
1	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				90,318,507,182	93,118,435,889	2,799,928,707
1	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,521,000	1,521,000	0
1	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1,521,000	1,521,000	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	02	Administrasi Umum Perangkat Daerah				326,489,986	42,996,986	-283,493,000
1	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				28,680,786	28,680,786	0
1	02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10,385,000	10,385,000	0
1	02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3,931,200	3,931,200	0
1	02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				283,493,000	0	-283,493,000
1	02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27,321,900	0	-27,321,900
1	2	Pengadaan Mebel				27,321,900	0	-27,321,900
1	02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,994,738,398	1,992,873,598	-1,864,800
1	2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10,999,800	9,135,000	-1,864,800
1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100	1,828,944,298	1,828,944,298	0
1	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				154,794,300	154,794,300	0
1	02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38,300,000	38,300,000	0
1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				23,300,000	23,300,000	0
1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15,000,000	15,000,000	0
1	2	Peningkatan Pelayanan BLUD				103,166,647,613	104,499,700,769	1,333,053,156
1	02	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				103,166,647,613	104,499,700,769	1,333,053,156
Jumlah Belanja						279,053,296,621	285,149,376,484	6,096,079,863
Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				217,403,687,666	245,797,049,613	28,393,361,947
1	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				151,157,570,135	183,760,405,039	32,602,834,904

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				48,302,810,884	38,214,375,183	-10,088,435,701
1	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas kesehatan Lainnya (persen)	100	100	35,384,113,324	32,336,540,683	-3,047,572,641
1	02	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Pengadaan Prasarana di fasilitas Pelayanan Kesehatan (persen)	100	100	1,400,000,000	0	-1,400,000,000
1	02	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Terlaksananya Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (persen)		100	1,997,459,400	1,997,459,400	0
1	02	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium (persen)	100	100	349,955,000	349,955,000	0
1	02	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (persen)	100	100	154,910,950	0	-154,910,950
1	02	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Distribusi alat kesehatan , obat, vaksin, makanan dan minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (persen)		100	2,822,294,150	2,197,037,350	-625,256,800
1	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				100,332,602,341	143,841,799,526	43,509,197,185
1	02	Pengelolaan Pelayanan Dinas				4,633,119,680	1,221,094,300	-3,412,025,380

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (%)	100	100	2,251,878,830	1,601,855,000	-650,023,830
1	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (persen)	100	100	2,078,689,311	1,164,248,500	-914,440,811
1	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (persen)	100	100	304,528,800	304,528,750	-50
1	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (persen)	100	100	21,638,810,840	19,346,746,730	-2,292,064,110
1	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (persen)	100	100	734,467,500	139,300,000	-595,167,500
1	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (persen)	100	100	686,922,910	501,793,500	-185,129,410
1	02	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (persen)	100	100	1,491,235,150	1,027,967,650	-463,267,500
1	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya (persen)	100	100	554,388,830	436,908,830	-117,480,000
1	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	100	100	10,621,307,339	5,333,887,245	-5,287,420,094
1	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (%)	100	100	38,563,900	0	-38,563,900

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	100	100	1,067,049,562	242,379,242	-824,670,320
1	02	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (persen)	100	100	44,377,695,989	108,752,027,209	64,374,331,220
1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (persen)	100	100	3,481,767,170	1,769,905,530	-1,711,861,640
1	02	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Terlaksananya Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi (persen)	100	100	361,004,190	349,004,190	-12,000,000
1	02	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (persen)	100	100	156,355,420	156,355,420	0
1	02	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan (persen)	100	100	5,294,578,450	1,331,442,450	-3,963,136,000
1	02	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (persen)	100	100	560,238,470	162,354,980	-397,883,490
1	02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				1,268,358,870	680,399,490	-587,959,380

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	02	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (persen)	100	100	734,332,980	266,197,600	-468,135,380
1	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (persen)	100	100	234,025,890	114,201,890	-119,824,000
1	02	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Terlaksananya Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (persen)	100	100	300,000,000	300,000,000	0
1	02	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				1,253,798,040	1,023,830,840	-229,967,200
1	02	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (persen)	100	100	1,253,798,040	1,023,830,840	-229,967,200
1	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				26,328,974,140	24,476,087,900	-1,852,886,240
1	02	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				21,460,403,560	20,769,457,480	-690,946,080
1	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan (persen)	100	100	21,460,403,560	20,769,457,480	-690,946,080
1	02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				4,868,570,580	3,706,630,420	-1,161,940,160

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	02	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan (persen)	100	100	4,868,570,580	3,706,630,420	-1,161,940,160
1	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				39,917,143,391	37,560,556,674	-2,356,586,717
1	02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,535,961,581	1,041,033,815	-494,927,766
1	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25,012,361	25,624,115	611,754
1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				75,080,000	4,280,000	-70,800,000
1	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1,308,124,720	1,011,129,700	-296,995,020
1	02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				127,744,500	0	-127,744,500
1	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23,776,444,419	24,354,670,054	578,225,635
1	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				23,477,778,759	24,259,359,394	781,580,635
1	02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				184,770,000	92,385,000	-92,385,000
1	02	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				113,895,660	2,925,660	-110,970,000
1	02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				296,420,000	5,000,000	-291,420,000
1	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				296,420,000	5,000,000	-291,420,000
1	02	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,761,167,679	1,788,620,623	-972,547,056
1	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				81,523,520	81,523,520	0
1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26,730,000	26,730,000	0
1	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				810,378,243	580,878,243	-229,500,000
1	02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				264,044,400	124,628,100	-139,416,300
1	02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				69,373,790	31,170,790	-38,203,000
1	2	Penyediaan Bahan/Material				266,135,320	142,437,034	-123,698,286

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1,030,105,406	801,252,936	-228,852,470	
1	02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			212,877,000	0	-212,877,000	
1	02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			880,777,284	289,296,064	-591,481,220	
1	2	Pengadaan Mebel Peralatan dan Mesin			241,405,400	0	-241,405,400	
1	02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			481,133,964	170,644,624	-310,489,340	
1	02	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			158,237,920	118,651,440	-39,586,480	
1	02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9,055,489,328	8,533,046,818	-522,442,510	
1	02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			20,084,140	20,071,540	-12,600	
1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100	1,462,299,010	1,458,206,000	-4,093,010
1	02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			67,914,016	53,474,016	-14,440,000	
1	02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,610,883,100	1,548,889,300	-61,993,800	
1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			509,802,600	447,808,800	-61,993,800	
1	02	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			50,792,000	50,792,000	0	
1	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1,050,288,500	1,050,288,500	0	
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			2,230,808,742	2,133,020,410	-97,788,332	
2	12	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			2,230,808,742	2,133,020,410	-97,788,332	
2	12	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			2,077,145,632	1,979,357,300	-97,788,332	
2	12	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			251,892,632	154,104,300	-97,788,332	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	12	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1,825,253,000	1,825,253,000	0	
2	12	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			153,663,110	153,663,110	0	
2	12	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			153,663,110	153,663,110	0	
Jumlah Belanja					219,634,496,408	247,930,070,023	28,295,573,615	
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat								
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1,501,632,338,504	1,625,474,274,006	123,841,935,502	
1	03	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			111,711,882,286	109,684,309,354	-2,027,572,932	
1	03	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			58,469,482,845	55,812,970,445	-2,656,512,400	
1	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersedianya data perencanaan pembangunan embung kecil (Unit)	75.00	75.00	2,538,877,410	1,763,780,410	-775,097,000
			Tersedianya data AKNOP Embung Kecil (Unit)	50.00	50.00			
			Perencanaan Peningkatan sarana irigasi (HA)	2016.00	2016.00			
1	03	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya embung kecil (Unit)	100.00	100.00	45,569,600,180	45,407,651,780	-161,948,400
1	03	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			278,612,000	0	-278,612,000	
1	03	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehab Embung (Unit)	49.00	49.00	5,988,828,380	5,994,769,380	5,941,000
			Terlaksananya Demplot Pemanfaatan Embung (Unit)	20.00	20.00			

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	03	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Terlaksananya Identifikasi Sepadan Sungai Keritis pada D.I. Kewenangan Provinsi	1260.00	1260.00	3,006,848,220	1,730,502,220	-1,276,346,000
			Terbangun dan diperbaikinya Sepadan Sungai Keritis (M)	1260.00	1260.00			
1	03	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Tersedianya data Hidrologi pada stasiun hidrologi kewenangan provinsi	90.00	90.00	730,666,435	620,794,435	-109,872,000
1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	tersedianya pelayanan tenaga kontrak	12	12	356,050,220	295,472,220	-60,578,000
1	03	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				53,242,399,441	53,871,338,909	628,939,468
1	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Pembangunan dan Peningkatan Sarana Irigasi (Ha)	33542.00	33542.00	985,900,890	935,310,890	-50,590,000
1	03	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				41,993,446,151	42,898,627,619	905,181,468
1	03	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharanya jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi (Paket)	1	1	10,263,052,400	10,037,400,400	-225,652,000
1	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MTNUM				6,390,836,390	6,308,078,390	-82,758,000
1	03	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				6,390,836,390	6,308,078,390	-82,758,000
1	03	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM				6,390,836,390	6,308,078,390	-82,758,000
1	03	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				110,923,375,060	98,640,877,280	-12,282,497,780
1	03	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi				110,923,375,060	98,640,877,280	-12,282,497,780

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	03	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi				110,923,375,060	98,640,877,280	-12,282,497,780
1	03	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				17,111,490,971	443,842,740	-16,667,648,231
1	03	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				17,111,490,971	443,842,740	-16,667,648,231
1	03	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya PSU:Lingkungan Kawasan Perkantoran dan Pedesaan serta Desa Pusat Pertumbuhan (%)	50	50	17,111,490,971	443,842,740	-16,667,648,231
			Persentasi ketersediaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi (%)	100	100			
1	03	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				1,196,676,017,342	1,358,940,711,319	162,264,693,977
1	3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi				1,196,676,017,342	1,358,940,711,319	162,264,693,977
1	3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Terlaksananya Survey Kondisi Jalan/Jembatan (%)	100	100	2,156,549,020	2,058,339,020	-98,210,000
1	3	Rekonstruksi Jalan	Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi mantap serta Fungsional (%)	100	100	125,711,861,013	139,080,137,670	13,368,276,657
			Pembangunan/ Peningkatan Jalan Provinsi (Kegiatan)	1	1			
1	3	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Provinsi (Kegiatan)	1	1	1,044,825,533,139	1,217,553,197,459	172,727,664,320
1	3	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan (%)	100	100	503,999,920	225,499,920	-278,500,000
1	3	Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan (%)	100	100	23,478,074,250	23,537,250	-23,454,537,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	03	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			2,628,640,180	508,744,200	-2,119,895,980	
1	03	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			1,918,295,980	0	-1,918,295,980	
1	03	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli Konstruksi (Orang)	240.00	240.00	1,918,295,980	0	-1,918,295,980
1	03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			710,344,200	508,744,200	-201,600,000	
1	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Persentase ketersediaan Informasi Jakon kewenangan Provinsi dalam SIPJAKI (%)	50.00	50.00	710,344,200	508,744,200	-201,600,000
1	03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			3,973,629,328	2,044,073,458	-1,929,555,870	
1	03	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			1,549,434,480	557,527,660	-991,906,820	
1	03	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi			1,549,434,480	557,527,660	-991,906,820	
1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			1,342,763,938	1,011,224,578	-331,539,360	
1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penvusunan RRTR Provinsi			1,133,791,388	878,845,028	-254,946,360	
1	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota			208,972,550	132,379,550	-76,593,000	
1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			356,112,410	141,526,410	-214,586,000	
1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			356,112,410	141,526,410	-214,586,000	
1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			725,318,500	333,794,810	-391,523,690	
1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang daerah (%)	18.75	18.75	271,451,840	78,848,840	-192,603,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	03	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang daerah (%)	18.75	18.75	453,866,660	254,945,970	-198,920,690
1	03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				52,216,466,947	48,903,637,265	-3,312,829,682
1	03	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				526,752,580	369,664,160	-157,088,420
1	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60,194,860	43,449,340	-16,745,520
1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				16,194,740	11,874,740	-4,320,000
1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				15,462,060	9,569,660	-5,892,400
1	03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				14,403,820	0	-14,403,820
1	03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				14,003,200	0	-14,003,200
1	03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				406,493,900	304,770,420	-101,723,480
1	03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				32,258,594,510	32,157,422,272	-101,172,238
1	03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				31,723,299,530	31,833,934,712	110,635,182
1	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				62,677,780	45,944,880	-16,732,900
1	03	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				72,419,320	35,707,120	-36,712,200
1	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				375,006,360	241,835,560	-133,170,800
1	03	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				25,191,520	0	-25,191,520
1	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				173,101,400	111,999,400	-61,102,000
1	03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				173,101,400	111,999,400	-61,102,000
1	03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				162,165,200	0	-162,165,200
1	03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				99,913,000	0	-99,913,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			62,252,200	0	-62,252,200	
1	03	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,337,262,401	697,474,337	-639,788,064	
1	03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			29,994,091	29,994,091	0	
1	03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			196,301,950	124,301,950	-72,000,000	
1	03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			23,478,000	23,478,000	0	
1	3	Penyediaan Bahan/Material			285,522,960	137,855,776	-147,667,184	
1	03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			420,120,880	0	-420,120,880	
1	03	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			381,844,520	381,844,520	0	
1	03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,796,974,560	1,278,781,960	-1,518,192,600	
1	3	Pengadaan Mebel			894,361,180	257,872,760	-636,488,420	
1	03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1,879,953,380	998,249,200	-881,704,180	
1	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			22,660,000	22,660,000	0	
1	03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,773,145,420	4,740,713,360	-32,432,060	
1	3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			34,776,000	34,776,000	0	
1	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100	2,021,134,200	2,021,134,200	0
1	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2,717,235,220	2,684,803,160	-32,432,060	
1	03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,570,936,876	930,047,776	-640,889,100	
1	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			511,580,000	225,000,000	-286,580,000	
1	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			281,797,000	230,523,500	-51,273,500	
1	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			777,559,876	474,524,276	-303,035,600	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	3	Peningkatan Pelayanan BLUD			8,617,534,000	8,617,534,000	0
1	03	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			8,617,534,000	8,617,534,000	0
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			13,751,698,590	10,384,697,540	-3,367,001,050
1	04	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			5,933,013,140	3,046,148,090	-2,886,865,050
1	04	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			2,605,029,850	2,570,593,850	-34,436,000
1	04	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			2,605,029,850	2,570,593,850	-34,436,000
1	04	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			3,327,983,290	475,554,240	-2,852,429,050
1	04	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			3,327,983,290	475,554,240	-2,852,429,050
1	04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			7,818,685,450	7,338,549,450	-480,136,000
1	04	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			7,818,685,450	7,338,549,450	-480,136,000
1	04	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			7,818,685,450	7,338,549,450	-480,136,000
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			909,659,000	748,001,000	-161,658,000
2	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			909,659,000	748,001,000	-161,658,000
2	10	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			909,659,000	748,001,000	-161,658,000
2	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			909,659,000	748,001,000	-161,658,000
Jumlah Belanja					1,516,293,696,094	1,636,606,972,546	120,313,276,452
Satuan Polisi Pamong Praja							

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				16,403,217,311	15,907,984,294	-495,233,017
1	05	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3,105,760,610	2,464,911,340	-640,849,270
1	05	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2,774,902,090	2,254,510,590	-520,391,500
1	05	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				1,821,525,810	1,823,387,410	1,861,600
			Terlaksananya Penyediaan jasa pengamanan kantor (%)	100	100			
1	05	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				433,783,180	431,123,180	-2,660,000
			Terlaksananya pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum (nersen)	100	100			
			konsultasi dan koordinasi diklat PPNS di Pusat (%)	100	100			
1	05	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				265,771,140	0	-265,771,140
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu di Kab/Kota se -NTT (nersen)	100	100			
			Terlaksana pengamanan Aset (TURJAWALI) adan Piket (nersen)	100	100			

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	05	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				35,588,630	0	-35,588,630
			terlaksananya Pembinaan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) bagi Satlinmas (%)	100	100			
1	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia				190,338,330	0	-190,338,330
			terlaksananya pengembangan SDM aparatur satpol pp (%)	100	100			
1	05	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-	-	-	27,895,000	0	-27,895,000
1	05	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				207,356,830	160,138,060	-47,218,770
1	05	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				207,356,830	160,138,060	-47,218,770
			Terlaksananya operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kegiatan)	12.00	12.00			
1	05	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				123,501,690	50,262,690	-73,239,000
1	05	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	-	-	-	123,501,690	50,262,690	-73,239,000
1	05	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				138,751,830	84,351,840	-54,399,990
1	05	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				138,751,830	84,351,840	-54,399,990
1	05	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	-	-	-	84,351,840	84,351,840	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	05	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	-	54,399,990	0	-54,399,990
1	05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13,158,704,871	13,358,721,114	200,016,243
1	05	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11,954,280	11,954,280	0
1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			11,954,280	11,954,280	0
			Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (%)	100	100		
1	05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10,662,376,000	11,124,101,961	461,725,961
1	05	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	10,662,376,000	11,124,101,961	461,725,961
1	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			352,262,000	309,697,400	-42,564,600
1	05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	314,500,000	271,935,400	-42,564,600
1	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	37,762,000	37,762,000	0
1	05	Administrasi Umum Perangkat Daerah			392,396,520	239,238,520	-153,158,000
1	05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4,998,000	4,998,000	0
			Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)	100	100		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor (Paket)	1	1		
1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15,139,000	15,139,000	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (%)	100	100			
1	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4,995,800	2,932,800	-2,063,000
1	5	Penyediaan Bahan/Material			39,998,720	39,998,720	0
1	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu			83,360,000	83,360,000	0
		Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%)	100	100			
1	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			215,605,000	92,810,000	-122,795,000
		Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah (%)	100	100			
1	05	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	28,300,000	0	-28,300,000
1	05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,259,979,133	1,211,575,487	-48,403,646
1	05	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	1,149,234,920	1,109,744,500	-39,490,420
1	5	Pengadaan Mebel Peralatan dan Mesin	-	-	29,998,050	29,870,000	-128,050
1	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			80,746,163	71,960,987	-8,785,176
		Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor (%)	100	100			
1	05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			179,759,524	176,510,452	-3,249,072
1	05	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1,482,160	1,480,400	-1,760
		Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat (bulan)	12	12			
1	05	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			30,094,624	27,715,312	-2,379,312

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100			
1	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	148,182,740	147,314,740	-868,000
1	05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			299,977,414	285,643,014	-14,334,400
1	05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			171,617,414	171,693,014	75,600
		Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (%)	100	100			
1	05	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	28,360,000	13,950,000	-14,410,000
1	05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100,000,000	100,000,000	0
		Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (%)	100	100			
Jumlah Belanja					16,403,217,311	15,907,984,294	-495,233,017
Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			12,074,287,196	11,036,847,619	-1,037,439,577
1	05	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			5,504,385,636	4,852,592,090	-651,793,546
1	05	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			243,473,860	243,473,860	0
1	05	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi			243,473,860	243,473,860	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Mitigasi Dalam Rangka Pengurangan Perlindungan Lokasi Rawan Bencana (Dokumen)	10	10			
1	05	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			763,009,780	427,511,360	-335,498,420
1	05	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			199,185,500	0	-199,185,500
		Penyelenggaraan Hari Bencana dan Hari Pengurangan Resiko Bencana (I anoran)	2.00	2.00			
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Rehabilitasi Rekonstruksi (JITU-PB) (Orang)	35.00	35.00			
1	05	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana			99,764,400	99,764,400	0
1	5	Pengelolaan Risiko Bencana			117,225,920	117,225,920	0
		Operasional kendaraan /peralatan penanggulangan bencana (18 mobil, motor 8, kapal 1, genset 4) (Unit)	31.00	31.00			
1	05	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			281,330,520	0	-281,330,520
		Pembentukan dan Pengembangan Desa / Kelurahan Tangguh Bencana (Desa / Kelurahan)	20.00	20.00			
1	05	Penanganan Pascabencana Provinsi			65,503,440	210,521,040	145,017,600
		Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU _ PASNA) (Dokumen)	2.00	2.00			
1	05	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			4,398,884,596	4,181,606,870	-217,277,726
1	05	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			4,148,454,596	3,940,259,870	-208,194,726

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Kaji Cepat Dalam Situasi Tanggap Darurat (Dokumen)	1.00	1.00			
1	05	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			250,430,000	241,347,000	-9,083,000
		Fasilitasi Pendampingan Pendistribusian Bantuan Logistik /Peralatan Penanggulangan Bencana (Lanoran)	1.00	1.00			
		Pengadaan Dukungan Stok Logistik/Peralatan untuk Korban Bencana (paket)	1.00	1.00			
1	05	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			99,017,400	0	-99,017,400
1	05	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			99,017,400	0	-99,017,400
		Rapat Penguatan Kelembagaan BPBD Tk. Provinsi NTT (Orang)	100.00	100.00			
1	05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6,569,901,560	6,184,255,529	-385,646,031
1	05	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6,370,000	6,370,000	0
1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6,370,000	6,370,000	0
		Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Tahun)	1	1			
1	05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,391,299,000	5,082,149,769	-309,149,231
1	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,500,000	0	-12,500,000
1	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	12,500,000	0	-12,500,000
1	05	Administrasi Umum Perangkat Daerah			242,494,600	170,869,600	-71,625,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12,137,320	12,137,320	0
			Terlaksananya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (Tabun)	1	1		
1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			39,955,000	36,000,000	-3,955,000
			Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Tabun)	1	1		
1	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8,798,400	8,798,400	0
			Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Tabun)	1	1		
1	5	Penyediaan Bahan/Material			56,784,880	56,784,880	0
			Terlaksananya jasa pengangkutan beras dan barang dinas (Tabun)	1	1		
1	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu			24,100,000	18,460,000	-5,640,000
1	05	Penyelenggaraan Rapat	-	-	100,719,000	38,689,000	-62,030,000
1	05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			31,730,040	41,358,240	9,628,200
1	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	31,730,040	41,358,240	9,628,200
1	05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			592,986,020	592,986,020	0
1	05	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5,994,500	5,994,500	0
			Terlaksananya jasa surat menyurat (Tabun)	1	1		
1	05	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			154,716,000	154,716,000	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Tabun)	1	1				
1	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	432,275,520	432,275,520	0	
1	05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			292,521,900	290,521,900	-2,000,000	
1	05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan			239,650,900	239,650,900	0	
			-	-				
1	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7,100,000	5,100,000	-2,000,000	
		Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor (Unit)	1	1				
1	05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			45,771,000	45,771,000	0	
Jumlah Belanja		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Tabun)	1	1	12,074,287,196	11,036,847,619	-1,037,439,577	
Dinas Sosial								
1	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			39,021,404,503	37,017,810,498	-2,003,594,005	
1	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			2,599,835,200	1,296,745,470	-1,303,089,730	
1	06	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			2,599,835,200	1,296,745,470	-1,303,089,730	
1	06	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Terlaksana Pelatihan Keterampilan bagi TAGANA (keg)	1	1	1,631,288,370	1,282,095,970	-349,192,400
		Jumlah TAGANA Prov yang menerima insentif (orang)	103	103				
		Jumlah TAGANA yang berkualitas dan berkompetensi dalam penanganan bencana (orang)	500	500				

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Jumlah SDM PKH yang mendapatkan Insentif dari APBD 1 (orang)	1.701	1.701				
		Jumlah SDM PKh yang mengikuti Rapat Koordinasi (orang)	1.701	1.701				
1	06	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah TKSK yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (orang)	200	200	953,897,330	0	-953,897,330
1	06	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah PSKS yang diseleksi dan mendapatkan hadiah (orang)	176	176	14,649,500	14,649,500	0
		Jumlah Penyuluh yg mendapatkan pendidikan dan pelatihan (orang)	60	60				
		Peringatan Hari Pahlawan (Tahun)	1	1				
		Jumlah PSKS yang di Evaluasi (Tahun)	1	1				
		Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pemahaman tentang kesejahteraan sosial (orang)	300	300				
		Jumlah TKSK yang mendapatkan insentif (orang)	309	309				
		Terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu Provinsi (unit)	1	1				
1	06	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				243,743,300	207,230,300	-36,513,000
1	06	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal				243,743,300	207,230,300	-36,513,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	06	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Rumah perlindungan dan tauma center yang mendapatkan operasional (paket)	1	1	243,743,300	207,230,300	-36,513,000
1	6	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				10,714,599,145	11,016,443,085	301,843,940
1	06	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti				1,704,929,132	1,702,978,132	-1,951,000
1	6	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi klien panti pemerintah provinsi (orang)	569	569	487,922,000	487,922,000	0
			Terpenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas dalam panti swasta (orang)	1.35	1.35			
1	6	Penyediaan Sandang	Tersedianya alat bantu bagi penyandang disabilitas di dalam panti sasta (Tabun)	1	1	209,580,900	209,580,900	0
1	06	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				2,013,800	2,013,800	0
1	6	Penyediaan Alat Bantu Peralatan dan Mesin	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1	1	267,546,600	267,546,600	0
1	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				52,830,512	59,769,512	6,939,000
1	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya koordinasi pendamping disabilitas (kegiatan)	1	1	512,715,320	487,455,320	-25,260,000
			Terlaksananya bimbingan teknis bagi patugas panti disabilitas (orang)	50	50			
1	06	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				72,300,000	64,650,000	-7,650,000
1	06	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				49,657,000	45,309,000	-4,348,000
1	06	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				50,363,000	78,731,000	28,368,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	06	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti				5,461,403,483	5,626,420,023	165,016,540
1	6	Pengasuhan				705,600,000	739,751,040	34,151,040
1	6	Penyediaan Makanan	Terpenuhi kebutuhan dasar anak terlantar dalam panti swasta (orang)	1.800	1.800	2,564,190,000	2,564,190,000	0
1	6	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya kebutuhan sandang pada panti sosial swasta (orang)	1.100	1.100	844,604,090	678,027,590	-166,576,500
1	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				65,518,670	65,518,670	0
1	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Peningkatan kapasitas petugas panti anak swasta (orang)	40	40	262,074,600	408,294,600	146,220,000
			Terlaksananya Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi (orang)	220	220			
1	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari				179,985,483	179,985,483	0
1	06	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				563,012,640	813,662,640	250,650,000
1	06	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya home visit paacapengangkatan anak (Tahun)	1	1	20,410,000	20,410,000	0
1	06	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				256,008,000	156,580,000	-99,428,000
1	06	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				2,300,147,590	2,279,867,590	-20,280,000
1	6	Penyediaan Permakanan	Terpenuhi kebutuhan dasar lanjut usia terlantar didalam panti swasta (orang)	50	50	1,335,160,000	1,335,160,000	0
			Tersalurnya bantuan sembako hari lansia (paket)	100	100			
1	6	Penyediaan Sandang				404,409,590	404,409,590	0
1	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				104,526,000	104,526,000	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Peningkatan kapasitas petugas panti swasta lanjut usia (orang)	20	20	69,000,000	48,720,000	-20,280,000
			Penyelenggaraan Hari Disabilitas Tingkat Provinsi (Kegiatan)	1	1			
			Jumlah alokasi Dana bagi Komda Lansia (Tahun)	1	1			
			Jumlah Lansia yang terverifikasi dan mendapatkan bantuan sosial (Tahun)	1	1			
			Penyelenggaraan hari Lansia tingkat provinsi (Kegiatan)	1	1			
1	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				188,400,000	188,400,000	0
1	06	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				72,042,000	72,042,000	0
1	06	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				17,612,000	17,612,000	0
1	6	Belana Perjalanan Dinas				17,612,000	17,612,000	0
1	06	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				11,498,000	11,498,000	0
1	6	Belana Perjalanan Dinas				11,498,000	11,498,000	0
1	6	Pemulasaraan				97,500,000	97,500,000	0
1	06	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti				1,248,118,940	1,407,177,340	159,058,400
1	6	Penyediaan Permakanan				472,137,200	472,137,200	0
1	6	Penyediaan Sandang				178,570,850	178,570,850	0
1	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				37,597,820	37,597,820	0
1	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Paket kedaruratan Anak yang memerlukan perlindungan khusus (paket)	1	1	390,203,070	324,261,470	-65,941,600

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Jumlah Anak Jalanan dan Orang Tua yang mendapatkan pembinaan (orang)	60	60				
1	6	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Klien pada panti pemerintah yang diterminasi dan mendapatkan modal usaha (Tabun)	1	1	169,610,000	394,610,000	225,000,000
1	06	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				3,359,051,510	2,086,903,510	-1,272,148,000
1	06	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal				69,665,620	63,355,620	-6,310,000
1	6	Pengangkatan Anak antar WNI				50,227,620	43,917,620	-6,310,000
1	06	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal				19,438,000	19,438,000	0
1	06	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				3,289,385,890	2,023,547,890	-1,265,838,000
1	06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				3,030,486,750	1,846,056,750	-1,184,430,000
1	06	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota				238,899,180	157,491,180	-81,408,000
1	06	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				19,999,960	19,999,960	0
1	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				523,336,920	517,445,920	-5,891,000
1	06	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				523,336,920	517,445,920	-5,891,000
1	6	Penyediaan Permakanan	Jumlah Logistik Kebencanaan yang tersedia (paket)	1	1	152,022,640	152,022,640	0
			Jumlah Korban Bencana Sosial yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya (Kegiatan)	1	1			
1	6	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya (orang)	1.000	1.000	49,127,400	49,127,400	0
1	06	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				322,186,880	316,295,880	-5,891,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	06	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			72,912,100	72,912,100	0	
1	06	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			72,912,100	72,912,100	0	
1	06	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan (Tahun)	1	1	18,912,100	18,912,100	0
1	06	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			54,000,000	54,000,000	0	
1	06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			21,507,926,328	21,820,130,113	312,203,785	
1	06	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			206,393,000	73,043,100	-133,349,900	
1	06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			21,510,580	17,110,580	-4,400,000	
1	06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			52,000,420	36,934,420	-15,066,000	
1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			18,998,100	18,998,100	0	
1	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			113,883,900	0	-113,883,900	
1	06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18,572,376,087	18,415,812,404	-156,563,683	
1	6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18,562,560,357	18,410,583,334	-151,977,023	
1	06	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			5,229,070	5,229,070	0	
1	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			4,586,660	0	-4,586,660	
1	06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			13,200,000	0	-13,200,000	
1	06	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan			13,200,000	0	-13,200,000	
1	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			403,877,980	347,261,380	-56,616,600	
1	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			33,230,860	34,910,860	1,680,000	
1	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			26,318,400	26,318,400	0	
1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12,604,800	12,604,800	0	
1	6	Penyediaan Bahan/Material			245,866,920	243,007,320	-2,859,600	
1	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu			53,820,000	30,420,000	-23,400,000	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			32,037,000	0	-32,037,000	
1	06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			103,183,753	44,616,233	-58,567,520	
1	6	Pengadaan Mebel			40,515,200	0	-40,515,200	
1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			62,668,553	44,616,233	-18,052,320	
1	06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,344,893,928	1,872,437,416	527,543,488	
1	6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			14,857,820	14,857,820	0	
1	06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100	581,097,532	597,354,140	16,256,608
1	06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			748,938,576	1,260,225,456	511,286,880	
1	06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			864,001,580	1,066,959,580	202,958,000	
1	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			64,114,000	64,114,000	0	
1	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			223,983,080	226,422,440	2,439,360	
1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2,946,400	1,473,200	-1,473,200	
1	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			572,958,100	774,949,940	201,991,840	
Jumlah Belanja					39,021,404,503	37,017,810,498	-2,003,594,005	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			10,358,531,820	8,396,123,274	-1,962,408,546	
2	08	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			1,531,051,880	508,231,490	-1,022,820,390	
2	08	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			424,045,960	153,549,210	-270,496,750	
2	08	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi			22,223,530	20,523,530	-1,700,000	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan PUG (OPD)	39	39			
2	08	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi			197,726,290	133,025,680	-64,700,610
		Terlaksananya Fasilitasi dan pendampingan penyusunan GAP, GBS, bgai 39 PD Provinsi (Orang)	39	39			
		Terselenggaranya Bimtek bagi 39 Perangkat Daerah dan 30 ASN di TTS (Orang)	69	69			
		Terlaksananya Fasilitasi pengintegrasian GAP, GBS, KAK pada RKA di 39 PD lingkuo Prov. NTT (OPD)	39	39			
2	08	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi			204,096,140	0	-204,096,140
		Terlaksananya BIMTEK PPRG bagi 22 Kab/Kota di Regional Timor, Flores, dan Sumba (Kab/Kota)	22	22			
2	08	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi			548,017,200	197,288,350	-350,728,850
2	08	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			127,314,080	1,700,000	-125,614,080
		-	-	-			
2	08	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			420,703,120	195,588,350	-225,114,770

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Terlaksananya Advokasi Forum Koordinasi PUSPA Provinsi (Orang)	50	50			
		Terselenggaranya Rapat koordinasi Daerah Program PPPA (orang)	110	110			
2	08	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			558,988,720	157,393,930	-401,594,790
2	08	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			131,008,430	0	-131,008,430
		Terlaksananya pendampingan persiapan evaluasi Ape dan Pembinaan Penyusunan PRG desa model (kolaborasi PKK) (Kab/Kota)	7	7			
2	08	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			302,778,490	34,998,270	-267,780,220
		Terlaksananya Fasilitasi dan evaluasi SEKOPER (orang)	150	150			
		Terlaksananya Pertemuan Evaluasi dan identifikasi Best Practices Mitra Program PP PA (OPD, Lembaga Masyarakat) (orang)	100	100			
2	08	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			125,201,800	122,395,660	-2,806,140
		Tersedianya Media Komunikasi Informasi dan Edukasi Gender PP dan PA (Media)	4	4			
2	08	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			1,255,885,580	959,012,940	-296,872,640

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	08	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				297,180,168	97,510,948	-199,669,220
2	08	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				130,045,748	97,510,948	-32,534,800
			Terlaksananya Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Orang)	100	100			
2	08	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				167,134,420	0	-167,134,420
			Terlaksananya sosialisasi pencegahan persekusi, kekerasan perempuan dan anak serta TPPO bagi tokoh agama dan toko adat regional sumba (Orang)	100	100			
2	08	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				737,291,050	753,132,640	15,841,590
2	08	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				71,887,460	71,887,460	0
			Terlaksananya Penguatan Kelembagaan P2TP2A di Kab. TTS (Kegiatan)	1	1			
2	08	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				665,403,590	681,245,180	15,841,590

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Tersedianya Operasional P2TP2A (Bulan)	12	12			
2	08	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			221,414,362	108,369,352	-113,045,010
2	08	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			101,553,072	97,839,072	-3,714,000
		Terlaksananya Kajian Efektifitas KIE, kebijakan TPPO, Tenaga Kerja Non Prosedural menuju Zero Human Trafficking 2023 (Dokumen)	1	1			
2	08	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			40,921,600	0	-40,921,600
		Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO bagi pengelola layanan (orang)	50	50			
2	08	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			78,939,690	10,530,280	-68,409,410
		Terseleenggaranya peringatan Hari Perempuan Internasional (Orang)	50	50			
		Terlaksananya Fasilitas Pembentukan UPTD, PPA Satgas dan Forum Jejaring di Kab./Kota (Orang)	100	100			

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor dan Mitra untuk kesepakatan bersama terhadap pencegahan kekerasan dan penanganan TPPO (Kab/Kota)	5	5			
2	08	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			290,742,980	133,575,640	-157,167,340
2	08	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			290,742,980	133,575,640	-157,167,340
2	08	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			290,742,980	133,575,640	-157,167,340
		Terlatihnya Kader Champion untuk penanggulangan stunting dan implementasi pedoman ketahanan keluarga melalui kursus Pra Nikah Stunting setara gender (Kab/Kota)	81	81			
		Terlatihnya KK RTMP untuk mengembangkan usaha perempuan dalam mendukung sektor pariwisata di NTT (Orang)	105	105			
		Terlaksananya Fasilitasi pembentukan Kelompok Ekonomi Marginal (Korban Kekerasan, TPPO, Non Prosedural) dalam mendukung pemberdayaan ekonomi inklusif (Kelompok)	6	6			
2	08	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			157,383,590	38,319,590	-119,064,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2	08	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			157,383,590	38,319,590	-119,064,000
2	08	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi			157,383,590	38,319,590	-119,064,000
			Tersedianya Profil Gender dan Anak provinsi NTT (Dokumen)	10	10		
2	08	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			731,722,940	482,757,960	-248,964,980
2	08	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			731,722,940	482,757,960	-248,964,980
2	08	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			87,705,760	48,349,320	-39,356,440
			Terlaksananya koordinasi dan advokasi pembentuk desa layak anak (Desa)	150	150		
2	08	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			128,359,420	27,788,920	-100,570,500
			-	-	-		
2	08	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			515,657,760	406,619,720	-109,038,040
			Terlaksananya Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) (Kab/Kota)	4	4		
			Terlaksananya Konferensi Anak Daerah (Konferda) dan Forum Anak Nasional (FAN) (Orang)	55	55		
2	08	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			125,182,600	83,082,600	-42,100,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	08	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				76,211,960	48,961,960	-27,250,000
2	08	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				76,211,960	48,961,960	-27,250,000
			-	-	-			
2	08	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				48,970,640	34,120,640	-14,850,000
2	08	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				48,970,640	34,120,640	-14,850,000
			-	-	-			
2	08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				6,266,562,250	6,191,143,054	-75,419,196
2	08	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				111,393,760	212,447,860	101,054,100
2	08	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	7,200,000	87,200,000	80,000,000
2	08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				104,193,760	125,247,860	21,054,100
			Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (Tabun)	1	1			
2	08	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,658,192,000	5,237,187,726	-421,004,274
2	08	Administrasi Umum Perangkat Daerah				199,102,880	366,630,480	167,527,600
2	08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2,498,200	2,498,200	0
			Terlaksananya penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor (Tabun)	1	1			
2	08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15,468,000	120,871,000	105,403,000
			Terlaksananya Bahan cetak dan Penggandaan (tabun)	1	1			

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3,494,400	2,932,800	-561,600
			Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Tahun)	1	1		
2	8	Penyediaan Bahan/Material	-	-	26,034,280	31,026,280	4,992,000
2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			16,620,000	146,619,200	129,999,200
2	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			134,988,000	62,683,000	-72,305,000
			-	-			
2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			242,254,810	302,669,810	60,415,000
2	08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2,898,000	1,449,000	-1,449,000
			Terlaksananya surat meyurat dan pembelian materai (Tahun)	1	1		
2	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			95,402,400	107,286,400	11,884,000
			Terlaksananya Penyediaan pelayanan komunikasi, air dan listrik (tahun)	1	1		
2	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			143,954,410	193,934,410	49,980,000
			-	-			
2	08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55,618,800	72,207,178	16,588,378
2	08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			32,251,200	50,653,778	18,402,578
			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (Tahun)	1	1		

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Terlaksananya Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional (tahun)	1	1			
2	08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			23,367,600	21,553,400	-1,814,200
		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (%)	1	1			
Jumlah Belanja					10,358,531,820	8,396,123,274	-1,962,408,546
Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan							
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			96,554,951,599	90,857,992,649	-5,696,958,950
2	11	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			798,561,760	252,393,010	-546,168,750
2	11	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			128,769,370	128,769,370	0
2	11	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi			128,769,370	128,769,370	0
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi (%)	100	100			
2	11	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			669,792,390	123,623,640	-546,168,750
2	11	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang			669,792,390	123,623,640	-546,168,750
		Terlaksananya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang (%)	100	100			
2	11	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			1,748,750,710	1,481,847,710	-266,903,000
2	11	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			1,678,501,280	1,411,598,280	-266,903,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			112,118,250	112,118,250	0
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut (%)	100	100			
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut (%)	100	100			
2	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			55,344,140	43,687,140	-11,657,000
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (%)	100	100			
2	11	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi			1,511,038,890	1,255,792,890	-255,246,000
		-	-	-			
2	11	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			70,249,430	70,249,430	0
2	11	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			70,249,430	70,249,430	0
		Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	100	100			

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	11	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				6,051,458,816	4,397,745,316	-1,653,713,500
2	11	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				6,051,458,816	4,397,745,316	-1,653,713,500
2	11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan (%)	100	100	6,051,458,816	4,397,745,316	-1,653,713,500
2	11	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				249,441,080	225,643,880	-23,797,200
2	11	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				249,441,080	225,643,880	-23,797,200
2	11	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				249,441,080	225,643,880	-23,797,200
			Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (%)	100	100			
2	11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				380,314,780	330,932,780	-49,382,000
2	11	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				380,314,780	330,932,780	-49,382,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2	11	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			380,314,780	330,932,780	-49,382,000
			100	100			
			100	100			
2	11	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			196,311,750	186,348,750	-9,963,000
2	11	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			196,311,750	186,348,750	-9,963,000
2	11	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan			196,311,750	186,348,750	-9,963,000
			100	100			

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				439,511,840	121,683,840	-317,828,000
2	11	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				439,511,840	121,683,840	-317,828,000
2	11	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional				439,511,840	121,683,840	-317,828,000
			Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional (Paket)	100	100			
2	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				86,690,600,863	83,861,397,363	-2,829,203,500
2	11	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				578,641,650	385,561,040	-193,080,610
2	11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	104,639,720	73,535,720	-31,104,000
2	11	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	37,606,600	0	-37,606,600
2	11	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	81,723,300	0	-81,723,300
2	11	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	54,350,710	0	-54,350,710
2	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				300,321,320	312,025,320	11,704,000
			Terlaksanay penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (%)	100	100			
2	11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				80,451,928,460	78,174,766,550	-2,277,161,910
2	11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	80,445,542,380	78,170,592,090	-2,274,950,290
2	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	6,386,080	4,174,460	-2,211,620
2	11	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				70,200,000	75,600,000	5,400,000
2	11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	70,200,000	75,600,000	5,400,000
2	11	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				130,572,120	47,391,540	-83,180,580

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	11	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	82,307,500	0	-82,307,500
2	11	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	48,264,620	47,391,540	-873,080
2	11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150,224,870	107,311,090	-42,913,780
2	11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	5,796,320	4,904,540	-891,780
2	11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	144,428,550	102,406,550	-42,022,000
2	11	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,516,017,524	1,337,403,224	-178,614,300
2	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13,009,016	13,009,016	0
			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)	100	100			
2	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100,897,430	99,076,830	-1,820,600
			Tersedianya barang cetak dan penggandaan (%)	100	100			
2	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				998,400	998,400	0
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%)	100	100			
2	11	Penyediaan Bahan/Material				193,571,628	180,577,928	-12,993,700
			Tersedianya jasa pengangkutan beras dan barang dinas (%)	100	100			
2	11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	57,688,000	58,136,000	448
2	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	1,149,853,050	985,605,050	-164,248,000
2	11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				578,829,913	578,829,913	0
2	11	Pengadaan Mebel	-	-	-	49,802,000	49,802,000	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	529,027,913	529,027,913	0
2	11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,851,073,736	2,790,695,316	-60,378,420
2	11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				44,001,720	29,446,020	-14,555,700
			Tersedianya jasa surat menyurat (%)	100	100			
2	11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				602,715,556	528,953,156	-73,762,400
			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100			
2	11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				415,180,000	415,180,000	0
			-	-	-			
2	11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1,789,176,460	1,817,116,140	27,939,680
2	11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				363,112,590	363,838,690	726,100
2	11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				137,141,790	137,141,790	0
			Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (%)	100	100			
2	11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				98,739,300	67,224,300	-31,515,000
			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (%)	100	100			
2	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				127,231,500	159,472,600	32,241,100
3	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				180,531,796,587	170,701,188,482	-9,830,608,105
3	28	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				163,464,086,544	161,033,719,479	-2,430,367,065

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
3	28	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			528,208,210	188,488,000	-339,720,210
3	28	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			507,763,430	185,188,000	-322,575,430
			Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (%)	100	100		
			Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (%)	100	100		
			Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Dokumen)	1	1		
3	28	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH			20,444,780	3,300,000	-17,144,780
			-	-	-		
3	28	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			7,680,811,034	7,058,196,608	-622,614,426
3	28	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan			128,650,620	93,305,120	-35,345,500
			Terlaksananya Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (%)	100	100		
			Terlaksananya Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (%)	100	100		
			Terlaksananya Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (%)	100	100		

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
3	28	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan			7,552,160,414	6,964,891,488	-587,268,926
			Terlaksananya Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan (Kahupaten)	22	22		
			Terlaksananya Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan (%)	100	100		
3	28	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			2,845,160,770	1,614,392,420	-1,230,768,350
3	28	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	-	-	2,385,808,610	1,307,322,760	-1,078,485,850
3	28	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	128,409,900	81,309,900	-47,100,000
3	28	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	-	-	137,825,940	86,567,940	-51,258,000
3	28	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	193,116,320	139,191,820	-53,924,500
		Komputer					
3	28	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			151,268,945,980	151,382,908,041	113,962,061
3	28	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya			151,268,945,980	151,382,908,041	113,962,061
			Terlaksananya pengembangan porang (Hektar)	100	100		
			Terlaksananya Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (%)	100	100		
			Terlaksananya Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (%)	100	100		

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Terlaksananya Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (%)	100	100			
3	28	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			1,140,960,550	789,734,410	-351,226,140
3	28	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			1,140,960,550	789,734,410	-351,226,140
		Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/ Tahun (Kabupaten/Kota)	22	22			
		Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/ Tahun (%)	100	100			
3	28	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			8,515,528,670	3,836,594,230	-4,678,934,440
3	28	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi			945,367,350	558,085,190	-387,282,160
3	28	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			945,367,350	558,085,190	-387,282,160
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/ atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (%)	100	100			

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
3	28	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				7,570,161,320	3,278,509,040	-4,291,652,280
3	28	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				7,570,161,320	3,278,509,040	-4,291,652,280
			Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (%)	100	100			
			Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (%)	100	100			
			Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (%)	100	100			
3	28	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				2,208,198,180	579,136,600	-1,629,061,580
3	28	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				2,208,198,180	579,136,600	-1,629,061,580
3	28	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				261,586,690	216,307,690	-45,279,000
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan (%)	100	100			

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan (%)	100	100			
3	28	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			107,640,080	91,179,080	-16,461,000
		Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (Dokumen)	9	9			
3	28	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			1,838,971,410	271,649,830	-1,567,321,580
		Terlaksananya Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (%)	100	100			
3	28	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			86,166,160	78,166,160	-8,000,000
3	28	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			86,166,160	78,166,160	-8,000,000
3	28	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS			86,166,160	78,166,160	-8,000,000
		Teralaksananya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS (%)	100	100			
		Terlaksananya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS (%)	100	100			
3	28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6,257,817,033	5,173,572,013	-1,084,245,020
3	28	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			636,692,160	211,787,520	-424,904,640

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
3	28	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	92,187,520	45,479,520	-46,708,000
3	28	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	150,554,650	43,648,880	-106,905,770
3	28	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	218,134,740	59,666,300	-158,468,440
3	28	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	175,815,250	62,992,820	-112,822,430
3	28	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				379,769,460	355,422,960	-24,346,500
3	28	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	161,461,300	161,461,300	0
3	28	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	4,816,500	4,816,500	0
3	28	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	213,491,660	189,145,160	-24,346,500
3	28	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				319,923,630	329,433,630	9,510,000
3	28	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	15,087,290	15,087,290	0
3	28	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	108,591,960	107,301,960	-1,290,000
3	28	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	196,244,380	207,044,380	10,800,000
3	28	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				115,482,470	40,806,740	-74,675,730
3	28	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	33,714,370	0	-33,714,370
3	28	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	81,768,100	40,806,740	-40,961,360
3	28	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30,634,920	29,743,020	-891,900
3	28	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	30,634,920	29,743,020	-891,900
3	28	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,379,036,142	754,285,392	-624,750,750
3	28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	156,779,440	153,417,940	-3,361,500
3	28	Penyediaan Bahan/Material Komputer	-	-	-	274,867,952	268,469,452	-6,398,500
3	28	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	80,875,000	61,836,000	-19,039,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
3	28	Penyelenggaraan Rapat	-	-	866,513,750	270,562,000	-595,951,750
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-			
3	28	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,191,500,300	2,201,489,260	9,988,960
3	28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	72,869,920	66,112,120	-6,757,800
3	28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	483,229,000	438,021,000	-45,208,000
3	28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	1,635,401,380	1,697,356,140	61,954,760
3	28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,204,777,951	1,250,603,491	45,825,540
3	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	875,494,280	875,494,280	0
3	28	Pemeliharaan Mebel	-	-	29,000,000	38,280,000	9,280,000
3	28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	135,446,000	86,305,700	-49,140,300
Jumlah Belanja					277,086,748,186	261,559,181,131	-15,527,567,055
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			46,189,931,598	52,911,697,400	6,721,765,802
2	13	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			1,603,516,060	1,221,890,740	-381,625,320
2	13	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			1,603,516,060	1,221,890,740	-381,625,320
2	13	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa			49,958,860	410,362,860	360,404,000
2	13	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa			177,369,150	205,131,200	27,762,050
2	13	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			98,643,580	0	-98,643,580
2	13	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			418,957,810	110,050,900	-308,906,910
2	13	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa			129,307,340	53,315,260	-75,992,080
2	13	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anqqota BPD			116,621,010	45,263,060	-71,357,950

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	13	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa			612,658,310	397,767,460	-214,890,850	
2	13	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			36,578,322,110	44,323,308,707	7,744,986,597	
2	13	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			36,578,322,110	44,323,308,707	7,744,986,597	
2	13	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			102,745,800	82,102,000	-20,643,800	
2	13	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			3,913,546,120	12,494,703,170	8,581,157,050	
2	13	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan (%)	100	100	242,955,340	81,991,520	-160,963,820
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (%)	100	100			
2	13	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (%)	100	100	207,635,830	111,125,824	-96,510,006
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (%)	100	100			

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	13	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya pemanfaatan teknologi tepat guna (%)	100	100	1,933,776,754	1,558,606,984	-375,169,770
		Bangunan Gedung						
2	13	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				197,382,380	14,499,380	-182,883,000
2	13	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				29,980,279,886	29,980,279,829	-57
		Komputer						
2	13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				8,008,093,428	7,366,497,953	-641,595,475
2	13	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				328,801,760	188,260,820	-140,540,940
2	13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				106,362,090	96,642,890	-9,719,200
2	13	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				9,017,400	9,017,300	-100
2	13	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6,271,355	6,271,300	-55
2	13	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				8,774,230	0	-8,774,230
2	13	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				6,271,355	0	-6,271,355
2	13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13,599,080	12,069,080	-1,530,000
2	13	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				178,506,250	64,260,250	-114,246,000
2	13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,536,470,975	5,897,856,444	-638,614,531
2	13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6,509,958,000	5,875,972,244	-633,985,756
2	13	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12,211,975	12,211,975	0
2	13	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1,799,750	599,750	-1,200,000
2	13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3,291,425	3,291,425	0
2	13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				8,181,050	5,781,050	-2,400,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2	13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1,028,775	0	-1,028,775
2	13	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			77,754,950	77,750,420	-4,530
2	13	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			52,839,360	52,839,360	0
2	13	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			12,147,108	12,146,280	-828
2	13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12,768,482	12,764,780	-3,702
2	13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			5,291,000	5,291,000	0
2	13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			6,463,412	6,463,412	0
2	13	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			8,792,000	792,000	-8,000,000
2	13	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			17,104,590	0	-17,104,590
2	13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			7,254,872	0	-7,254,872
2	13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			13,719,000	0	-13,719,000
2	13	Administrasi Umum Perangkat Daerah			366,948,129	258,077,780	-108,870,349
2	13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4,079,200	4,079,200	0
2	13	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			10,010,000	10,010,000	0
2	13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7,820,800	7,820,800	0
2	13	Penyediaan Bahan/Material			37,498,769	71,506,420	34,007,651
2	13	Fasilitasi Kunjungan Tamu			12,474,000	37,422,000	24,948,000
2	13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			167,826,000	0	-167,826,000
2	13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			127,239,360	127,239,360	0
2	13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			52,321,600	122,390,600	70,069,000
2	13	Pengadaan Mebel			27,900,000	0	-27,900,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24,421,600	122,390,600	97,969,000
		Komputer						
2	13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				451,637,780	563,073,720	111,435,940
2	13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6,944,000	1,176,500	-5,767,500
2	13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100	195,373,040	195,373,040	0
2	13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				249,320,740	366,524,180	117,203,440
2	13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				135,533,360	246,541,757	111,008,397
2	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				102,545,360	136,353,757	33,808,397
2	13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6,500,000	14,750,000	8,250,000
2	13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				26,488,000	95,438,000	68,950,000
Jumlah Belanja						46,189,931,598	52,911,697,400	6,721,765,802
Dinas Perhubungan								
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				888,565,600	871,092,100	-17,473,500
1	05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				888,565,600	871,092,100	-17,473,500
1	05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				888,565,600	871,092,100	-17,473,500
1	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	888,565,600	871,092,100	-17,473,500
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				42,511,568,311	36,331,724,392	-6,179,843,919
2	15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				2,727,859,960	1,488,326,613	-1,239,533,347
2	15	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				842,861,750	655,653,233	-187,208,517

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	15	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi Bangunan Gedung				185,330,800	6,371,200	-178,959,600
			Pemasangan Fasilitas Keselamatan dari dan ke Tourism Estate (%)	50.00	50.00			
2	15	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Bangunan Gedung				657,530,950	649,282,033	-8,248,917
			Pemasangan fasilitas keselamatan (Paket)	5.00	5.00			
2	15	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				248,269,040	0	-248,269,040
2	15	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Bangunan Gedung				123,000,000	0	-123,000,000
			Pemeliharaan terminal tipe B (Terminal)	5.00	5.00			
2	15	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B				125,269,040	0	-125,269,040
			Pelatihan teknis pengelolaan terminal (Orang)	25.00	25.00			
2	15	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				754,220,880	737,931,380	-16,289,500
2	15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				754,220,880	737,931,380	-16,289,500
			Jumlah sosialisasi keselamatan, abdiyasa teladan, wahana tata nugraha, pelajar pelopor dan ramp cek (Kegiatan)	5.00	5.00			
2	15	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi				110,791,200	26,897,950	-83,893,250
2	15	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				110,791,200	26,897,950	-83,893,250

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kota Kupang (Kegiatan)	5.00	5.00			
2	15	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			83,506,400	5,883,400	-77,623,000
2	15	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi			83,506,400	5,883,400	-77,623,000
		Survey load faktor angkutan orang trayek perintis (Lokasi)	7.00	7.00			
2	15	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			35,024,000	0	-35,024,000
2	15	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi			35,024,000	0	-35,024,000
		Survey perencanaan jaringan trayek angkutan pepadu moda pada kawasan yang berotorita atau pengelola (bandara dan pelabuhan laut) serta tourism estate (Kabupaten)	0.00	0.00			
2	15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			653,186,690	61,960,650	-591,226,040
2	15	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			653,186,690	61,960,650	-591,226,040

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Jumlah pemantauan lalu lintas harian, hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar nasional (Kegiatan)	7.00	7.00				
		Jumlah pemeriksaan kendaraan bermotor bersama instansi terkait (Kegiatan)	1.00	1.00				
		Jumlah pemantauan dan penertiban lalu lintas harian (Kegiatan)	1.00	1.00				
		Pengawasan pelaksanaan perizinan LLAJ (Kegiatan)	1.00	1.00				
		Pendataan subyek dan obyek retribusi (Kegiatan)	1.00	1.00				
		Pengawasan dan Penertiban Operasional Angkutan Umum pada Saat Kedatangan Kapal Laut (Kegiatan)	1.00	1.00				
2	15	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				22,409,427,382	18,823,747,572	-3,585,679,810
2	15	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi				49,554,000	0	-49,554,000
2	15	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi				49,554,000	0	-49,554,000
		Survey load faktor angkutan pelayaran (Kegiatan)	2.00	2.00				

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	15	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				194,089,270	37,161,480	-156,927,790
2	15	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				194,089,270	37,161,480	-156,927,790
			Pemantauan pemberlakuan tarif angkutan penyeberangan (Kegiatan)	1.00	1.00			
2	15	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				137,069,440	2,840,000	-134,229,440
2	15	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				137,069,440	2,840,000	-134,229,440
			Survey terhadap persetujuan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri (Kegiatan)	1.00	1.00			
2	15	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				43,365,120	517,120	-42,848,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2	15	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			43,365,120	517,120	-42,848,000
			Pendataan pelabuhan yang belum mempunyai dokumen AMDAL, DLKp/DLKr (Dokumen)	1.00	1.00		
2	15	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			21,946,917,992	18,782,739,412	-3,164,178,580
2	15	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional			21,913,394,742	18,782,354,162	-3,131,040,580
			Studi pelabuhan laut dan penyeberangan (Dokumen)	1.00	1.00		
2	15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif Lainnya ASN	-	-	1,700,000	1,700,000	0
2	15	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			33,523,250	385,250	-33,138,000
			Pemantauan penilaian operasional pelabuhan penyeberangan (Kegiatan)	1.00	1.00		
2	15	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional			38,431,560	489,560	-37,942,000
2	15	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional			38,431,560	489,560	-37,942,000
			Pendataan pendangkalan pelabuhan laut dan penyeberangan (Dokumen)	1.00	1.00		
2	15	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			1,195,901,600	0	-1,195,901,600
2	15	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			1,195,901,600	0	-1,195,901,600

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2	15	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian			1,195,901,600	0	-1,195,901,600
			Survey perencanaan jaringan trayek angkutan orang exsecutive class (PATAS) (Trayek)	0.00	0.00		
2	15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			16,178,379,369	16,019,650,207	-158,729,162
2	15	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			106,793,640	15,691,000	-91,102,640
2	15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			17,791,000	15,691,000	-2,100,000
			Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (%)	100	100		
2	15	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	89,002,640	0	-89,002,640
2	15	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13,448,741,106	13,895,731,277	446,990,171
2	15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	13,434,294,476	13,883,664,647	449,370,171
2	15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	65,160,000	65,160,000	0
2	15	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	4,998,380	4,368,380	-630,000
2	15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	9,448,250	7,698,250	-1,750,000
2	15	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			58,182,000	7,000,000	-51,182,000
2	15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	7,000,000	7,000,000	0
2	15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	51,182,000	0	-51,182,000
2	15	Administrasi Umum Perangkat Daerah			549,052,803	171,939,203	-377,113,600
2	15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			24,138,683	24,138,683	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)	100	100				
2	15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			41,079,700	40,793,700	-286,000	
		Tersedianya barang cetak dan penggandaan (%)	100	100				
2	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			13,024,800	13,024,800	0	
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%)	100	100				
2	15	Penyediaan Bahan/Material	-	-	60,546,540	56,490,020	-4,056,520	
2	15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	22,192,000	0	-22,192,000	
2	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	388,071,080	37,492,000	-350,579,080	
2	15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			154,473,780	118,055,647	-36,418,133	
2	15	Pengadaan Mebel Komputer	-	-	16,102,000	10,694,000	-5,408,000	
2	15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Komputer			138,371,780	107,361,647	-31,010,133	
		Tersedianya peralatan gedung kantor (%)	100	100				
2	15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,665,739,040	1,647,300,580	-18,438,460	
2	15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (%)	100	100	32,361,120	31,278,120	-1,083,000
2	15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			365,303,200	354,435,200	-10,868,000	
		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100				
2	15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7,774,000	3,825,540	-3,948,460	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Tersedianya jasa jaminan sosial (%)	100	100			
		Kantor Dinas Perhubungan : Penyediaan Jasa Jaminan Sosial (Orang)	56	56			
2	15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	1,260,300,720	1,257,761,720	-2,539,000
2	15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obvektif lainnya ASN	-	-	71,280,000	71,280,000	0
2	15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			195,397,000	163,932,500	-31,464,500
2	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			40,618,150	40,618,150	0
		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (%)	100	100			
2	15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			18,668,300	14,268,300	-4,400,000
		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (%)	100	100			
2	15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			136,110,550	109,046,050	-27,064,500
		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (%)	100	100			
Jumlah Belanja					43,400,133,911	37,202,816,492	-6,197,317,419
Dinas Komunikasi dan Informatika							
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			211,357,440	251,260,800	39,903,360

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			211,357,440	251,260,800	39,903,360
1	05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			211,357,440	251,260,800	39,903,360
1	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			211,357,440	251,260,800	39,903,360
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			12,135,519,694	11,304,801,408	-830,718,286
2	16	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			703,006,622	0	-703,006,622
2	16	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			703,006,622	0	-703,006,622
2	16	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			203,565,930	0	-203,565,930
2	16	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			149,980,000	0	-149,980,000
2	16	Pelayanan Informasi Publik dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			235,973,752	0	-235,973,752
2	16	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			113,486,940	0	-113,486,940
2	16	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			1,613,579,670	2,321,274,151	707,694,481
2	16	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi			564,285,370	1,495,528,331	931,242,961
2	16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer			0	75,000,000	75,000,000
2	16	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas Peralatan dan Mesin Komputer			126,043,480	0	-126,043,480
2	16	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan / atau jasa untk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat perkalatan dan msin komputer			923,250,820	825,745,820	-97,505,000
2	16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			9,818,933,402	8,983,527,257	-835,406,145

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	16	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7,198,800	7,198,800	0
2	16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	7,198,800	7,198,800	0
2	16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,762,707,599	8,192,435,304	-570,272,295
2	16	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8,685,755,099	8,115,482,804	-570,272,295
2	16	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				76,952,500	76,952,500	0
2	16	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				113,879,700	20,000,000	-93,879,700
2	16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				20,000,000	20,000,000	0
2	16	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				23,810,000	0	-23,810,000
2	16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				70,069,700	0	-70,069,700
2	16	Administrasi Umum				332,733,993	273,152,993	-59,581,000
2	16	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerapan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	100	69,976,553	69,976,553	0
2	16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	100	45,019,000	45,019,000	0
2	16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	100	7,454,680	7,454,680	0
2	16	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	100	100	61,969,760	61,969,760	0
2	16	Fasilitasi Kunjungan Tamu				14,790,000	9,945,000	-4,845,000
2	16	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				133,524,000	78,788,000	-54,736,000
2	16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				150,509,150	126,645,200	-23,863,950
2	16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya peralatan dan mesin komputer				150,509,150	126,645,200	-23,863,950

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				164,952,100	160,462,100	-4,490,000
2	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100	100	14,999,700	13,959,700	-1,040,000
2	16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	100	149,952,400	146,502,400	-3,450,000
2	16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				286,952,060	203,632,860	-83,319,200
2	16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100	100	112,545,860	112,545,860	0
2	16	Belanja Pemeliharaan				23,797,500	23,797,500	0
2	16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				99,802,200	55,963,000	-43,839,200
2	16	Belanja Pemeliharaan				99,802,200	55,963,000	-43,839,200
2	16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	100	74,604,000	35,124,000	-39,480,000
2	16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer				22,188,000	22,188,000	0
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				99,913,400	60,399,400	-39,514,000
2	20	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				99,913,400	60,399,400	-39,514,000
2	20	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi				99,913,400	60,399,400	-39,514,000
2	20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya data/informasi sektoral Pemerintah Provinsi NTT	100	100	99,913,400	60,399,400	-39,514,000
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				390,435,590	320,720,230	-69,715,360
2	21	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				390,435,590	320,720,230	-69,715,360
2	21	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				390,435,590	320,720,230	-69,715,360

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	21	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			97,943,110	82,659,110	-15,284,000	
2	21	Penyediaan Layanan keamanan informasi pemerintah daerah provinsi			292,492,480	238,061,120	-54,431,360	
Jumlah Belanja					12,837,226,124	11,937,181,838	-900,044,286	
Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4,833,836,179	903,668,205	-3,930,167,974	
2	07	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			567,257,390	85,705,860	-481,551,530	
2	07	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			527,885,640	85,705,860	-442,179,780	
2	07	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (%)	100	100	527,885,640	85,705,860	-442,179,780
			Terlaksananya Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (%)	100	100			
			Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (%)	100	100			
2	07	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja			39,371,750	0	-39,371,750	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	07	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja (%)	100	100	39,371,750	0	-39,371,750
2	07	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				291,835,330	258,777,330	-33,058,000
2	07	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				29,255,730	29,255,730	0
2	7	Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/ Bursa Kerja (%)	100	100	29,255,730	29,255,730	0
2	07	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi				262,579,600	229,521,600	-33,058,000
2	07	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (%)	100	100	262,579,600	229,521,600	-33,058,000
2	07	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				102,191,330	100,709,330	-1,482,000
2	07	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				66,307,900	66,307,900	0
2	07	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)	100	100	66,307,900	66,307,900	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	07	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			35,883,430	34,401,430	-1,482,000	
2	07	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Terlaksananya Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	35,883,430	34,401,430	-1,482,000
2	07	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			84,794,770	84,794,770	0	
2	07	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			84,794,770	84,794,770	0	
2	07	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan			84,794,770	84,794,770	0	
2	07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			3,787,757,359	373,680,915	-3,414,076,444	
2	07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,800,000	4,800,000	0	
2	07	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN			4,800,000	4,800,000	0	
2	07	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			57,428,160	57,428,160	0	
2	07	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			57,428,160	57,428,160	0	
2	07	Administrasi Umum Perangkat Daerah			71,599,782	67,393,782	-4,206,000	
2	07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			11,436,402	11,436,402	0	
2	07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			28,574,180	28,574,180	0	
2	07	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			6,944,400	6,944,400	0	
2	07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5,670,000	5,670,000	0	
2	7	Penyediaan Bahan/Material			8,703,800	8,703,800	0	
2	7	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1,865,000	1,865,000	0	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4,206,000	0	-4,206,000	
2	07	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			4,200,000	4,200,000	0	
2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			117,585,333	117,585,333	0	
2	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Komputer			84,777,333	84,777,333	0	
2	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Komputer			32,808,000	32,808,000	0	
2	07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			104,019,160	104,019,160	0	
2	7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2,530,000	2,530,000	0	
2	07	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100	48,801,000	48,801,000	0
2	07	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			52,688,160	52,688,160	0	
2	07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,432,324,924	22,454,480	-3,409,870,444	
2	07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6,332,000	6,332,000	0	
2	07	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12,200,000	12,200,000	0	
2	07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3,413,792,924	3,922,480	-3,409,870,444	
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			26,575,344,361	31,243,396,584	4,668,052,223	
2	17	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			152,360,320	0	-152,360,320	
2	17	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			152,360,320	0	-152,360,320	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	17	Meningkatkan Akuntabilitas,Kepercayaan, Kepatuhan,Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)	100	100	70,214,500	0	-70,214,500
2	17	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Terlaksananya Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel (%)	100	100	82,145,820	0	-82,145,820
2	17	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				1,505,830,340	1,704,994,940	199,164,600
2	17	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1,505,830,340	1,704,994,940	199,164,600
2	17	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (%)	100	100	1,505,830,340	1,704,994,940	199,164,600
2	17	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				140,894,720	0	-140,894,720
2	17	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				140,894,720	0	-140,894,720

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	17	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Terlaksananya Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (%)	100	100	140,894,720	0	-140,894,720
			Terlaksananya Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (%)	100	100			
2	17	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MTKRO (UMKM)				539,195,290	548,347,930	9,152,640
2	17	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				539,195,290	548,347,930	9,152,640
2	17	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya Penumbuhkembangan UMKM untuk mnjadi usaha yang tangguh dan Mandiri Sehingga dapat meningkatkan Penciptaan lapangan kerja, Pemerataan pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	100	100	539,195,290	548,347,930	9,152,640

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Terlaksanannya Penumbuhkembangan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	100	100				
2	17	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			456,804,700	456,804,700	0	
2	17	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			456,804,700	456,804,700	0	
2	17	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terlaksanannya Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah (%)	100	100	456,804,700	456,804,700	0
2	17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			23,780,258,991	28,533,249,014	4,752,990,023	
2	17	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			442,196,174	392,022,792	-50,173,382	
2	17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			319,950,174	295,796,792	-24,153,382	
2	17	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			122,246,000	96,226,000	-26,020,000	
2	17	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21,657,000,752	20,910,453,412	-746,547,340	
2	17	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21,619,816,008	20,876,655,320	-743,160,688	
2	17	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			15,577,000	15,577,000	0	
2	17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			8,232,352	4,845,700	-3,386,652	
2	17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			13,375,392	13,375,392	0	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	17	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5,000,000	5,000,000	0	
2	17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			5,000,000	5,000,000	0	
2	17	Administrasi Umum Perangkat Daerah			361,528,600	5,933,667,300	5,572,138,700	
2	17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1,540,000	1,540,000	0	
2	17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2,860,000	2,860,000	0	
2	17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1,996,800	1,996,800	0	
2	17	Penyediaan Bahan/Material			40,762,500	40,762,500	0	
2	17	Fasilitasi Kunjungan Tamu			27,040,000	13,520,000	-13,520,000	
2	17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			287,329,300	92,988,000	-194,341,300	
2	17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0	5,780,000,000	5,780,000,000	
2	17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			71,794,000	82,121,600	10,327,600	
2	17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20,650,000	20,650,000	0	
2	17	Pengadaan Aset Tetap Lainnya Komputer			51,144,000	61,471,600	10,327,600	
2	17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,082,849,815	1,080,514,980	-2,334,835	
2	17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4,270,000	950	-3,320,000	
2	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100	215,172,000	172,932,000	-42,240,000
2	17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN			863,407,815	906,632,980	43,225,165	
2	17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			159,889,650	129,468,930	-30,420,720	
2	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			50,914,650	68,868,930	17,954,280	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2	17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5,950,000	5,950,000	0
2	17	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			3,050,000	3,050,000	0
2	17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			99,975,000	51,600,000	-48,375,000
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			902,064,488	492,508,148	-409,556,340
3	32	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			46,835,570	40,635,570	-6,200,000
3	32	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			46,835,570	40,635,570	-6,200,000
3	32	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi			46,835,570	40,635,570	-6,200,000
3	32	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			220,827,890	100,058,210	-120,769,680
3	32	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			220,827,890	100,058,210	-120,769,680
3	32	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi			52,217,290	32,127,790	-20,089,500
3	32	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			88,703,240	34,797,240	-53,906,000
3	32	Penyuluhan Transmigrasi			79,907,360	33,133,180	-46,774,180
3	32	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			634,401,028	351,814,368	-282,586,660
3	32	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan			634,401,028	351,814,368	-282,586,660
3	32	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman			634,401,028	351,814,368	-282,586,660
Jumlah Belanja					32,311,245,028	32,639,572,937	328,327,909
Dinas Penanaman Modal dan PTSP							
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			11,591,465,717	10,211,538,072	-1,379,927,645

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	18	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
					374,545,480	80,000,000	-294,545,480	
2	18	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						
					246,717,980	30,000,000	-216,717,980	
2	18	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal (%)	100	100	246,717,980	30,000,000	-216,717,980
2	18	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi						
					127,827,500	50,000,000	-77,827,500	
2	18	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Tersedianya peta potensi dan peluang usaha di Provinsi (Dokumen)	1	1	127,827,500	50,000,000	-77,827,500
2	18	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						
					454,886,980	115,000,000	-339,886,980	
2	18	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						
					454,886,980	115,000,000	-339,886,980	
2	18	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Tersusunnya strategi promosi Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	339,981,580	65,000,000	-274,981,580
2	18	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Terlaksananya promosi Penanaman Modal (kali)	3	3	114,905,400	50,000,000	-64,905,400
2	18	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						
					709,839,260	424,608,310	-285,230,950	
2	18	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						
					709,839,260	424,608,310	-285,230,950	
2	18	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem terintegrasi secara elektronik (paket)	1	1	225,092,600	20,000,000	-205,092,600

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	18	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal (%)	100	100	469,746,880	390,388,530	-79,358,350
2	18	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat (%)	100	100	14,999,780	14,219,780	-780,000
2	18	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				418,975,560	556,012,600	137,037,040
2	18	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				418,975,560	556,012,600	137,037,040
2	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (lokasi)	22	22	344,025,560	75,329,840	-268,695,720
2	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (lokasi)	22	22	74,950,000	304,912,800	229,962,800
2	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (lokasi)	22	22	0	175,769,960	175,769,960
2	18	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				227,998,320	50,000,000	-177,998,320
2	18	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi				227,998,320	50,000,000	-177,998,320
2	18	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya sistem data base perizinan berbasis GIS (%)	100	100	227,998,320	50,000,000	-177,998,320

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2	18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			9,405,220,117	8,985,917,162	-419,302,955
2	18	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			196,328,550	61,356,400	-134,972,150
2	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			34,992,370	7,000,000	-27,992,370
2	18	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3,499,660	3,499,660	0
2	18	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2,499,900	2,499,900	0
2	18	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2,999,880	0	-2,999,880
2	18	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			2,499,900	0	-2,499,900
2	18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9,319,600	9,319,600	0
2	18	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			140,517,240	39,037,240	-101,480,000
2	18	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,518,030,000	7,366,862,115	-151,167,885
2	18	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7,508,950,000	7,362,782,115	-146,167,885
2	18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			4,080,000	4,080,000	0
2	18	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			5,000,000	0	-5,000,000
2	18	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5,447,400	5,447,400	0
2	18	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2,723,700	2,723,700	0
2	18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			2,723,700	2,723,700	0
2	18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10,499,420	5,499,440	-4,999,980
2	18	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			2,499,920	2,499,920	0
2	18	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			1,499,520	1,499,520	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	18	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1,999,980	0	-1,999,980	
2	18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			4,500,000	1,500,000	-3,000,000	
2	18	Administrasi Umum Perangkat Daerah			493,160,167	335,281,627	-157,878,540	
2	18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7,599,967	7,599,967	0	
2	18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			50,000,000	50,000,000	0	
2	18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			9,984,000	9,984,000	0	
2	18	Penyediaan Bahan/Material			49,999,660	49,999,660	0	
2	18	Fasilitas Kunjungan Tamu			15,000,000	15,000,000	0	
2	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			281,478,540	150,000,000	-131,478,540	
2	18	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1,498,560	1,498,560	0	
2	18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			119,831,200	132,443,600	12,612,400	
2	18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			89,960,000	94,989,600	5,029,600	
2	18	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			29,871,200	37,454,000	7,582,800	
2	18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			841,254,200	858,357,400	17,103,200	
2	18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1,638,000	1,638,000	0	
2	18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100	276,719,400	276,719,400	0
2	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			562,896,800	580,000,000	17,103,200	
2	18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			220,669,180	220,669,180	0	
2	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			25,974,120	25,974,120	0	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			47,697,760	47,697,760	0	
2	18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4,500,000	4,500,000	0	
2	18	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			10,000,000	10,000,000	0	
2	18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			132,497,300	132,497,300	0	
Jumlah Belanja					11,591,465,717	10,211,538,072	-1,379,927,645	
Dinas Kepemudaan dan Olahraga								
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			198,550,000	198,550,000	0	
1	03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			198,550,000	198,550,000	0	
1	03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			198,550,000	198,550,000	0	
1	03	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			198,550,000	198,550,000	0	
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			23,402,410,384	18,827,093,128	-4,575,317,256	
2	19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			2,162,229,836	1,181,021,600	-981,208,236	
2	19	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			2,087,457,336	1,181,021,600	-906,435,736	
2	19	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Wirausaha muda provinsi (org)	100	100	131,101,350	0	-131,101,350
2	19	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi			215,847,356	0	-215,847,356	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Penyiapan calon Wirausaha Pemuda dibidang usaha Tatarias (Orang/Kelompok)	0.00	0.00				
		Workshop Penumbuhan Minat Kemandirian Usaha Ekonomi Pemuda (Paket)	1	1				
		Pelathan Peningkatan Ketrampilan Pemuda di bidang perbengkelan las (Paket)	1	1				
		Pelatihan Peningkatan Krestifitas pemuda dibidang seni kriya (kerajinan. anyaman dan ukiran) (Paket)	1	1				
		Pelatihan Peningkatan Kretaifitas Pemuda di bidang pangan/kuliner (pembuatan Mi dari Kelor, dan Olah makanan dari bahan ikan) (Paket)	1	1				
		Pelatihan Kreatifitas Perfilman bagi pemuda/ pelajar dalam bdiang pembuatan film (dengan peralatan HP Android, dll) (Paket)	1	1				
		Pelatihan Kreatif pemuda bidang Kewirausahaan Sosial Start Up/ Unicorn (Paket)	1	1				
2	19	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah pemuda kader Provinsi (Org)	50	50	215,315,830	0	-215,315,830
		Dialog Cinta Damai Pemuda Lintas Agama (paket)	1	1				

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Seleksi Jambore pemuda Indonesia (JPI) (Paket)	1	1				
		Seleksi kapal Pemuda Nusantara (KPN) (Paket)	1	1				
		Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) (Paket)	1	1				
		Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Bersih dan ASRI (PEPELINGASIH) (Paket)	1	1				
		Dilalog/diskusi Wawasan Kebangsaan Pemuda (berbagai organisasi Kepemudaan) (Paket)	1	1				
		Jamboire Pemuda Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Paket)	1	1				
		Festifal Kreatifitas Pemuda dan Pameran Hasil-hasil Kreatifitas Pemuda (Paket)	1	1				
2	19	Tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	jumlah peserta TOT paskibraka Tingkat Provinsi (orang)	50	50	20,655,000	0	-20,655,000
			Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi (%)	100	100			
2	19	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	jumlah peserta TOT paskibraka Tingkat Provinsi (orang)	50	50	1,525,192,800	1,181,021,600	-344,171,200
			Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi (%)	100	100			
2	19	Tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN				8,699,000	8,699,000	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	19	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				74,772,500	0	-74,772,500
2	19	Peningkatan Kapasitas organoisasi kepemudaan provinsi	Bimtek Manajemen Pembinaan OKP (paket)	1	1	74,772,500	0	-74,772,500
2	19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				7,330,238,316	4,166,806,520	-3,163,431,796
2	19	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				24,000,000	0	-24,000,000
2	19	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	terbangunnya pagar keliling dari PPLP sampai gedung KONI (paket)	1	1	24,000,000	0	-24,000,000
			pembangunan baru gedung kempo (paket)	1	1			
			pembangunan baru gedung Pertina (paket)	1	1			
2	19	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga				2,360,051,966	0	-2,360,051,966
2	19	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	kejuaraan nasional Tinju PPLP se-Indonesia (orang)	500	500	881,159,976	0	-881,159,976
			Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) (Paket)	1	1			
			Pelaksanaan Gubernur Cup (Paket)	1	1			
			Pelaksanaan Sirkuit Atletik (Paket)	1	1			
			Pelaksanaan Lomba Lari 5 K Tingkat Pelajar (Paket)	1	1			
			sepak bola liga berjenjang U 14 dan U16 (orang)	500	500			

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Try Out Atlet PPLP NTT (Paket)	1	1				
		Festival Kids Olahraga (Paket)	1	1				
		kejuaraan nasional Tinju PPLP se-Indonesia (%)	100	100				
2	19	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Traening Center dan Pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional (Paket)	1	1	490,431,495	0	-490,431,495
			Traening Center dan Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS) (Paket)	1	1			
2	19	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Penjaringan atlet berprestasi untuk mengikuti POPNAS (Paket)	1	1	988,460,495	0	-988,460,495
			pemantauan dan pendampingan atlet PPLD dan PPLMD ke Pekan Olahraga Nasional(PON) ke XX di Papua tahun 2020 (orang)	26	26			
			mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua Tahun 2021 (Hibah ke KONI) (paket)	1	1			
2	19	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional				4,439,665,520	4,166,806,520	-272,859,000
2	19	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Sentra Pembinaan PPLD dan PPLMD (Paket)	1	1	4,389,665,520	4,166,806,520	-222,859,000
2	19	Tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN				42,075,000	42,075,000	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	19	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			50,000,000	0	-50,000,000	
2	19	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			506,520,830	0	-506,520,830	
2	19	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Pelatihan Pelatih Senam (Paket)	1	1	219,665,780	0	-219,665,780
			Pelatihan Pelatih Disabilitas (Paket)	1	1			
2	19	Pengembangan Organisasi Keolahragaan dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Olahraga Rekreasi Pendukung Pariwisata (Paket)	1	1	286,855,050	0	-286,855,050
			Olahraga Tradisional Pendukung Pariwisata (Paket)	1	1			
2	19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13,909,942,232	13,479,265,008	-430,677,224	
2	19	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			46,745,945	31,046,000	-15,699,945	
2	19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			46,745,945	31,046,000	-15,699,945	
2	19	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11,080,408,000	10,855,996,181	-224,411,819	
2	19	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11,080,408,000	10,855,996,181	-224,411,819	
2	19	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			27,618,000	10,500,000	-17,118,000	
2	19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			27,618,000	10,500,000	-17,118,000	
2	19	Administrasi Umum Perangkat Daerah			377,452,140	135,546,460	-241,905,680	
2	19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			51,598,140	36,596,140	-15,002,000	
2	19	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin komputer			3,250,000	0	-3,250,000	
2	19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			34,821,600	34,821,600	0	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5,865,600	5,865,600	0	
2	19	Penyediaan Bahan/Material peralatan dan mesin komputer			44,656,120	38,176,120	-6,480,000	
2	19	Fasilitasi Kunjungan Tamu			30,593,600	15,885,000	-14,708,600	
2	19	Penyelenggaraan Rapat			209,917,080	4,202,000	-205,715,080	
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
2	19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			215,043,499	103,033,499	-112,010,000	
2	19	Pengadaan MebelPeralatan dan Mesin			12,720,000	0	-12,720,000	
2	19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin Komputer			202,323,499	103,033,499	-99,290,000	
2	19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,796,741,568	1,740,011,688	-56,729,880	
2	19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9,815,400	4,095,000	-5,720,400	
2	19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100	452,574,000	391,842,000	-60,732,000
2	19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			141,506,748	68,178,748	-73,328,000	
		Peralatan dan Mesin Komputer						
2	19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1,192,845,420	1,275,895,940	83,050,520	
2	19	Tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN			147,000,000	134,880,000	-12,120,000	
2	19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			365,933,080	603,131,180	237,198,100	
2	19	Penyediaan Jasa,Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			120,642,780	120,427,180	-215,600	
2	19	Belanja Pemeliharaan			45,000,000	45,000,000	0	
2	19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			66,912,300	24,872,000	-42,040,300	
2	19	Belanja Pemeliharaan			40,190,000	24,690,000	-15,500,000	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			178,378,000	457,832,000	279,454,000
2	19	Belanja Pemeliharaan			178,378,000	442,832,000	264,454,000
Jumlah Belanja					23,600,960,384	19,025,643,128	-4,575,317,256
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan							
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			6,273,483,410	4,490,623,640	-1,782,859,770
2	23	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			5,644,586,550	4,226,255,820	-1,418,330,730
2	23	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi			2,122,250,040	1,309,796,300	-812,453,740
2	23	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			1,061,507,380	685,217,560	-376,289,820
			Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik (%)	100	100		
2	23	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer	-	-	56,190,500	50,000,000	-6,190,500
2	23	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			228,820,200	228,820,200	0
			Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di seluruh wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (%)	100	100		
2	23	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi			422,527,800	192,518,200	-230,009,600

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN DI TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI (%)	100	100			
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Provinsi (%)	100	100			
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Provinsi (%)	100	100			
2	23	Pengembangan Perpustakaan Deposit			165,008,320	49,098,000	-115,910,320
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan Deposit (%)	100	100			
2	23	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			244,386,340	154,142,340	-90,244,000
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka (%)	100	100			
		Penjilidan Koran dan Majalah Nasional (bundel)	48	48			
		Perbaikan Bahan Pustaka (eks)	2.000	2.000			
2	23	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi			3,522,336,510	2,916,459,520	-605,876,990
2	23	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			305,956,250	0	-305,956,250

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Terlaksanannya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat (%)	100	100			
2	23	Belanja Pemeliharaan	-	-	4,550,000	0	-4,550,000
2	23	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-	2,898,239,400	2,777,219,400	-121,020,000
2	23	Belanja Pemeliharaan			2,211,600,000	2,211,600,000	0
2	23	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Peralatan dan Mesin			318,140,860	139,240,120	-178,900,740
		Terlaksanannya Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (%)	100	100			
2	23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			628,896,860	264,367,820	-364,529,040
2	23	Administrasi Umum Perangkat Daerah			387,883,340	15,272,000	-372,611,340
2	23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			387,883,340	15,272,000	-372,611,340
		Pengadaan peralatan gedung kantor (%)	100	100			
2	23	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			241,013,520	249,095,820	8,082,300
2	23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	241,013,520	249,095,820	8,082,300
2	23	Tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	-	-	44,850,000	44,850,000	0
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			16,125,983,035	13,626,935,657	-2,499,047,378
2	24	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			1,589,122,800	505,164,280	-1,083,958,520
2	24	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi			514,627,100	357,878,600	-156,748,500

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	24	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Peralatan dan Mesin				514,627,100	357,878,600	-156,748,500
			Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi (%)	100	100			
			terlaksannnya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis (%)	100	100			
2	24	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi				952,319,000	116,174,000	-836,145,000
2	24	Akuisi, Pengolahan,Preservasi dan Akses Arsip Statis dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Peralatan dan Mesin				952,319,000	116,174,000	-836,145,000
			Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (%)	100	100			
			Pengelolaan Arsip Statis Provinsi (%)	100	100			
2	24	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi				122,176,700	31,111,680	-91,065,020
2	24	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				122,176,700	31,111,680	-91,065,020
			terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN kab/kota melalui JIKN (%)	100	100			
2	24	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				276,656,790	31,923,790	-244,733,000
2	24	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				276,656,790	31,923,790	-244,733,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2	24	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Peralatan dan Mesin Komputer			276,656,790	31,923,790	-244,733,000
			TERSEDINYA PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP (%)	100	100		
			Terlaksananya Penilaian, Penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 tahun (%)	100	100		
2	24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			14,260,203,445	13,089,847,587	-1,170,355,858
2	24	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			405,272,490	70,373,990	-334,898,500
2	24	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	112,620,750	18,838,250	-93,782,500
2	24	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	292,651,740	51,535,740	-241,116,000
2	24	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12,361,334,982	11,784,431,525	-576,903,457
2	24	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	12,361,334,982	11,784,431,525	-576,903,457
2	24	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			92,467,450	20,360,000	-72,107,450
2	24	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	37,769,450	20,360,000	-17,409,450
2	24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	54,698,000	0	-54,698,000
2	24	Administrasi Umum Perangkat Daerah			515,679,420	505,674,620	-10,004,800
2	24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4,456,000	4,456,000	0
			-	-			
			-	-			
2	24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			26,078,880	26,078,880	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		-	-	-			
		-	-	-			
2	24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6,988,800	6,988,800	0
		-	-	-			
		-	-	-			
2	24	Penyediaan Bahan/Material	-	-	49,935,740	49,935,740	0
2	24	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	6,240,000	6,240,000	0
2	24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	421,980,000	411,975,200	-10,004,800
2	24	Belanja Pemeliharaan			288,000,000	288,000,000	0
2	24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			285,401,511	155,165,500	-130,236,011
2	24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			285,401,511	155,165,500	-130,236,011
		-	-	-			
		-	-	-			
2	24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			296,822,192	301,075,392	4,253,200
2	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	5,481,200	4,008,000	-1,473,200
2	24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	291,340,992	297,067,392	5,726,400
2	24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			303,225,400	252,766,560	-50,458,840
2	24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	73,346,640	73,185,120	-161,520
2	24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	145,893,760	127,581,440	-18,312,320
2	24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	52,000,000	52,000,000	0
2	24	Belanja Pemeliharaan	-	-	52,000,000	52,000,000	0
2	24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	18,715,000	0	-18,715,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
2	24	Belanja Pemeliharaan	-	-	18,715,000	0	-18,715,000	
2	24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	13,270,000	0	-13,270,000	
2	24	Belanja Pemeliharaan	-	-	13,270,000	0	-13,270,000	
Jumlah Belanja					22,399,466,445	18,117,559,297	-4,281,907,148	
Dinas Kelautan dan Perikanan								
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			230,588,894,910	222,490,031,184	-8,098,863,726	
3	25	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			3,238,333,480	2,546,383,880	-691,949,600	
3	25	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			3,123,070,620	2,464,870,020	-658,200,600	
3	25	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas kawasan konservasi perairan daerah bagi pemijahan dan cadangan potensi kelautan dan perikanan	183.98	183.98	2,974,317,400	2,368,575,800	-605,741,600
3	25	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			148,753,220	96,294,220	-52,459,000	
3	25	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			70,214,960	52,215,960	-17,999,000	
3	25	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan konservasi perairan daerah bagi pemijahan dan cadangan potensi kelautan dan perikanan	183.98	183.98	70,214,960	52,215,960	-17,999,000
3	25	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			45,047,900	29,297,900	-15,750,000	
3	25	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			45,047,900	29,297,900	-15,750,000	
3	25	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			39,960,272,798	39,084,738,878	-875,533,920	
3	25	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			26,224,143,820	25,438,908,200	-785,235,620	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
3	25	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	238.64	238.64	60,567,660	60,567,660	0
3	25	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Ketersediaan Pangan Berbasis Perikanan di Pariwisata Estate	95	95	26,082,891,540	25,378,340,540	-704,551,000
3	25	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	238.64	238.64	80,684,620	0	-80,684,620
3	25	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				14,497,300	0	-14,497,300
3	25	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				14,497,300	0	-14,497,300
3	25	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT				161,865,030	170,559,030	8,694,000
3	25	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT				161,865,030	170,559,030	8,694,000
3	25	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				51,663,080	30,878,080	-20,785,000
3	25	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	238.64	238.64	51,663,080	30,878,080	-20,785,000
3	25	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi				13,508,103,568	13,444,393,568	-63,710,000
3	25	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	238.64	238.64	105,052,000	105,052,000	0
3	25	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	238.64	238.64	13,403,051,568	13,339,341,568	-63,710,000
3	25	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				162,676,936,854	160,121,258,991	-2,555,677,863

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
3	25	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				14,205,856	14,205,856	0
3	25	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	100	100	14,205,856	14,205,856	0
3	25	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				162,662,730,998	160,107,053,135	-2,555,677,863
3	25	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya, Jumlah Produksi Rumput laut	100	100	159,122,920,313	157,976,737,050	-1,146,183,263
3	25	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produksi Perikanan Air Payau dan Air Tawar	100	100	3,339,810,865	1,930,316,265	-1,409,494,600
3	25	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Pangan Berbasis Perikanan di Pariwisata Estate	95	95	199,999,820	199,999,820	0
3	25	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERTIKANAN				3,295,265,724	1,966,061,484	-1,329,204,240
3	25	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				3,295,265,724	1,966,061,484	-1,329,204,240
3	25	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang bebas IUU Fishing	60	60	840,725,220	705,964,420	-134,760,800
3	25	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan	1	1	2,349,836,204	1,184,606,284	-1,165,229,920
3	25	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				51,573,740	39,843,740	-11,730,000
3	25	Penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)				53,130,560	35,647,040	-17,483,520
3	25	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				1,058,422,482	708,305,430	-350,117,052

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
3	25	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				678,737,282	328,620,230	-350,117,052
3	25	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya	100	100	678,737,282	328,620,230	-350,117,052
3	25	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				379,685,200	379,685,200	0
3	25	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	1	379,685,200	379,685,200	0
3	25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				20,359,663,572	18,063,282,521	-2,296,381,051
3	25	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				879,593,700	692,594,720	-186,998,980
3	25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7,158,540	7,078,540	-80,000
3	25	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				29,975,470	29,975,470	0
3	25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	12,257,500	12,257,500	0
3	25	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				830,202,190	643,283,210	-186,918,980
3	25	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14,254,305,605	13,093,798,217	-1,160,507,388
3	25	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14,235,368,887	13,074,861,499	-1,160,507,388
3	25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18,936,718	18,936,718	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
3	25	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				48,547,280	48,547,280	0
3	25	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				48,547,280	48,547,280	0
3	25	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				57,082,000	57,082,000	0
3	25	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				57,082,000	57,082,000	0
3	25	Administrasi Umum Perangkat Daerah				733,279,430	109,384,810	-623,894,620
3	25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100	100	41,133,250	41,133,250	0
3	25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	100	18,111,600	18,111,600	0
3	25	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya jasa pengangkutan beras dan barang dinas	100	100	44,111,560	33,409,960	-10,701,600
3	25	Fasilitasi Kunjungan Tamu				24,430,000	16,730,000	-7,700,000
3	25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				605,493,020	0	-605,493,020
3	25	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				573,300,491	387,059,104	-186,241,387
3	25	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan mebeleur	100	100	76,450,000	13,800,000	-62,650,000
3	25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				496,850,491	373,259,104	-123,591,387
3	25	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,250,592,478	3,171,560,802	-79,031,676
3	25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100	100	31,920,000	29,528,600	-2,391,400
3	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	100	1,129,675,984	1,106,635,984	-23,040,000
3	25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2,088,996,494	2,035,396,218	-53,600,276
3	25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				562,962,588	503,255,588	-59,707,000
3	25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100	100	354,323,708	350,824,508	-3,499,200

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
3	25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			93,393,880	56,886,080	-36,507,800	
3	25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	100	115,245,000	95,545,000	-19,700,000
Jumlah Belanja					230,588,894,910	222,490,031,184	-8,098,863,726	
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			32,666,978,063	20,865,949,329	-11,801,028,734	
3	26	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			7,938,033,673	3,078,032,793	-4,860,000,880	
3	26	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			5,563,179,103	2,696,249,213	-2,866,929,890	
3	26	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-	-	300,000,000	0	-300,000,000	
3	26	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-	-	323,885,600	172,093,710	-151,791,890	
3	26	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-	-	4,939,293,503	2,524,155,503	-2,415,138,000	
3	26	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			2,374,854,570	381,783,580	-1,993,070,990	
3	26	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-	999,999,990	0	-999,999,990	
3	26	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-	1,374,854,580	381,783,580	-993,071,000	
3	26	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			4,604,842,720	2,317,615,100	-2,287,227,620	
3	26	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			4,604,842,720	2,317,615,100	-2,287,227,620	
3	26	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			739,077,400	1,071,000,120	331,922,720	
			Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri (%)	100	100			

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
3	26	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			2,423,267,280	581,049,540	-1,842,217,740
			Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi (%)	100	100		
3	26	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri			138,296,520	138,184,320	-112,200
			Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri (%)	100	100		
3	26	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			1,304,201,520	527,381,120	-776,820,400
			Terlaksananya Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Persen)	100	100		
			Terlaksananya Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (\$)	100	100		
3	26	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			3,884,679,920	787,000,740	-3,097,679,180
3	26	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			3,884,679,920	787,000,740	-3,097,679,180
3	26	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik			2,087,764,340	679,145,340	-1,408,619,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Terlaksananya Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik (%)	100	100			
3	26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif			1,163,491,560	0	-1,163,491,560
		Terlaksananya Kooordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif (Person)	100	100			
3	26	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula			633,424,020	107,855,400	-525,568,620
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan ke Pasar (%)	100	100			
3	26	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			5,145,747,380	2,288,236,690	-2,857,510,690
3	26	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			5,145,747,380	2,288,236,690	-2,857,510,690
3	26	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			1,719,795,380	17,640,000	-1,702,155,380
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan (%)	100	100			
3	26	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			2,202,954,940	1,682,551,950	-520,402,990

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Terlaksananya Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (%)	100	100			
3	26	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan			242,035,440	0	-242,035,440
		Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan (%)	100	100			
3	26	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	-	-	980,961,620	588,044,740	-392,916,880
3	26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			11,093,674,370	12,395,064,006	1,301,389,636
3	26	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			777,006,920	468,077,480	-308,929,440
3	26	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			297,477,960	174,183,960	-123,294,000
		Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri (%)	100	100			
3	26	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			49,818,040	49,818,040	0
		Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah (%)	100	100			
3	26	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			19,714,000	19,714,000	0
		-	-	-			
3	26	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD			24,937,440	0	-24,937,440

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
			-	-			
3	26	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			19,925,000	0	-19,925,000
			-	-			
3	26	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			54,153,480	54,153,480	0
			Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (%)	100	100		
3	26	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			310,981,000	170,208,000	-140,773,000
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi serta Rapat Koordinasi (%)	100	100		
3	26	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8,240,314,270	9,873,309,906	1,632,995,636
3	26	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	8,077,382,000	9,710,377,636	1,632,995,636
3	26	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	19,991,860	19,991,860	0
3	26	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	19,997,180	19,997,180	0
3	26	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	83,119,410	83,119,410	0
3	26	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	29,997,020	29,997,020	0
3	26	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			133,786,000	6,800,000	-126,986,000
3	26	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	41,036,000	6,800,000	-34,236,000
3	26	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	92,750,000	0	-92,750,000
3	26	Administrasi Umum Perangkat Daerah			475,656,840	484,072,840	8,416,000
3	26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			33,362,400	33,362,400	0
			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)	100	100		

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
3	26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			213,155,760	242,929,760	29,774,000
			Tersedianya jasa jaminan sosial (%)	100	100		
3	26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15,084,200	15,084,200	0
			tersedianya barang cetakan dan penggandaan (%)	100	100		
3	26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			13,478,400	13,478,400	0
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%)	100	100		
3	26	Penyediaan Bahan/Material			30,095,080	30,095,080	0
			-	-	-		
3	26	Fasilitas Kunjungan Tamu			29,430,000	29,430,000	0
			-	-	-		
3	26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			141,051,000	119,693,000	-21,358,000
			Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah (%)	100	100		
3	26	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50,322,000	0	-50,322,000
3	26	Pengadaan Mebel			50,322,000	0	-50,322,000
			-	-	-		
3	26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,219,903,260	1,186,401,260	-33,502,000
3	26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			11,340,000	5,670,000	-5,670,000
			Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat (%)	100	100		
3	26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			191,808,000	163,976,000	-27,832,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100				
3	26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1,016,755,260	1,016,755,260	0	
			-	-				
3	26	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			196,685,080	376,402,520	179,717,440	
3	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			54,985,080	54,985,080	0	
3	26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			11,700,000	6,100,000	-5,600,000	
3	26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			130,000,000	315,317,440	185,317,440	
Jumlah Belanja					32,666,978,063	20,865,949,329	-11,801,028,734	
Dinas Peternakan								
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN			145,190,043,492	137,508,930,022	-7,681,113,470	
		BIDANG PERTANIAN						
3	27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			94,879,718,630	95,273,413,708	393,695,078	
3	27	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			375,607,770	8,215,200	-367,392,570	
3	27	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Paket)	1	1	177,241,670	0	-177,241,670

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Paket)	1	1				
		Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Tahun)	1	1				
3	27	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1	1	198,366,100	8,215,200	-190,150,900	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Kegiatan)	4	4				
3	27	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi			13,004,110,860	13,765,198,508	761,087,648	
3	27	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Kelompok)	3	3	10,493,943,360	11,293,460,508	799,517,148

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Paket)	1	1				
3	27	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan kepada Badan,Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan (Paket)	1	1	2,485,207,500	2,471,738,000	-13,469,500
		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan (Paket)	1	1				
		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan (Tahun)	1	1				
		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan (Paket)	1	1				
3	27	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak (Paket)	1	1	24,960,000	0	-24,960,000
3	27	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				81,500,000,000	81,500,000,000	0
3	27	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain peralatan dan mesin bangunan gedung,bangunan air, intalasi jaringan	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ekor)	390	390	81,500,000,000	81,500,000,000	0
3	27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				26,703,578,150	19,530,185,650	-7,173,392,500
3	27	Penataan Prasarana Pertanian				26,703,578,150	19,530,185,650	-7,173,392,500

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
3	27	Perencanaan Pengembangan Prasarana,Kawasan dan Komoditas Pertanian Kawasan dan Komoditas Pertanian pemeliharaan peralatan dan mesin bangunan gedung instalasi jaringan	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Lokasi)	7	7	26,425,233,540	19,430,185,650	-6,995,047,890
3	27	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya (Kegiatan)	4	4	178,344,610	0	-178,344,610
3	27	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Jaringan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya (Paket)	35	35	100,000,000	100,000,000	0
3	27	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				4,608,015,317	4,300,263,016	-307,752,301
3	27	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				4,317,902,997	4,121,339,836	-196,563,161
3	27	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Paket)	1	1	4,317,902,997	4,121,339,836	-196,563,161
			Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Paket)	2	2			
3	27	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi				122,097,740	102,314,740	-19,783,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
3	27	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Paket)	1	122,097,740	102,314,740	-19,783,000
		Peralatan dan Mesin					
3	27	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			168,014,580	76,608,440	-91,406,140
3	27	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan (Dokumen)	1	51,690,140	0	-51,690,140
3	27	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner (Paket)	1	116,324,440	76,608,440	-39,716,000
3	27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			18,998,731,395	18,405,067,648	-593,663,747
3	27	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9,471,340	39,369,950	29,898,610
3	27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9,471,340	39,369,950	29,898,610
3	27	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17,539,276,002	16,953,313,945	-585,962,057
3	27	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			22,572,000	0	-22,572,000
3	27	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			22,572,000	0	-22,572,000
3	27	Administrasi Umum Perangkat Daerah			175,608,313	73,751,553	-101,856,760
3	27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			11,646,403	11,646,403	0
3	27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			16,308,050	14,621,950	-1,686,100
3	27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			9,734,400	9,734,400	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN				
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
3	27	Penyediaan Bahan/Material			15,403,460	14,288,800	-1,114,660		
3	27	Fasilitasi Kunjungan Tamu			24,252,000	0	-24,252,000		
3	27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			98,264,000	23,460,000	-74,804,000		
3	27	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30,945,000	56,815,000	25,870,000		
3	27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			30,945,000	56,815,000	25,870,000		
		Peralatan dan Mesin Komputer							
3	27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,052,425,860	1,049,565,620	-2,860,240		
3	27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12	12	4,428,900	1,845,900	-2,583,000	
3	27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12	12	395,134,400	370,232,000	-24,902,400	
3	27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial (Bulan)	12	12	652,862,560	677,487,720	24,625,160	
3	27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			168,432,880	232,251,580	63,818,700		
3	27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Bulan)	12	12	117,904,580	152,880,780	34,976,200	
3	27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Bulan)	12	12	2,300,000	1,150,000	-1,150,000	
		Pemeliharaan							
3	27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Bulan)		12	48,228,300	78,220,800	29,992,500	
Jumlah Belanja							145,190,043,492	137,508,930,022	-7,681,113,470
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			1,312,166,060	700,321,810	-611,844,250
2	09	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			1,312,166,060	700,321,810	-611,844,250
2	09	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			654,501,900	52,107,650	-602,394,250
2	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi			654,501,900	52,107,650	-602,394,250
2	09	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi			657,664,160	648,214,160	-9,450,000
2	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			657,664,160	648,214,160	-9,450,000
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			183,370,153,737	180,310,087,181	-3,060,066,556
3	27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			6,127,401,520	6,123,356,140	-4,045,380
3	27	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			6,127,401,520	6,123,356,140	-4,045,380
3	27	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan			6,127,401,520	6,123,356,140	-4,045,380
3	27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			132,624,964,029	131,668,190,933	-956,773,096
3	27	Penataan Prasarana Pertanian			132,624,964,029	131,668,190,933	-956,773,096
3	27	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian berdasarkan Pertimbangan Objektif			123,723,889,310	122,767,123,110	-956,766,200
3	27	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			2,199,667,515	2,199,667,365	-150
3	27	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			2,199,667,515	2,199,667,365	-150

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
3	27	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			2,199,667,515	2,199,667,365	-150
3	27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			42,418,120,673	40,318,872,743	-2,099,247,930
3	27	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			138,847,580	11,061,480	-127,786,100
3	27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			14,999,160	11,061,480	-3,937,680
3	27	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			123,848,420	0	-123,848,420
3	27	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			39,820,714,310	38,320,215,492	-1,500,498,818
3	27	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			39,820,714,310	38,320,215,492	-1,500,498,818
3	27	Administrasi Umum Perangkat Daerah			399,414,653	95,869,313	-303,545,340
3	27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			14,947,333	14,947,333	0
3	27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			34,832,000	32,584,400	-2,247,600
3	27	Penyediaan Bahan/Material			49,963,320	44,169,580	-5,793,740
3	27	Fasilitasi Kunjungan Tamu			44,835,000	4,168,000	-40,667,000
3	27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			254,837,000	0	-254,837,000
3	27	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			94,878,000	49,120,000	-45,758,000
3	27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			94,878,000	49,120,000	-45,758,000
		Komputer					
3	27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,673,265,180	1,626,708,708	-46,556,472
3	27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7,488,800	7,486,860	-1,940

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
3	27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100	670,305,320	634,818,048	-35,487,272
3	27	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				209,996,560	208,419,300	-1,577,260
3	27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				785,474,500	775,984,500	-9,490,000
3	27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				291,000,950	215,897,750	-75,103,200
3	27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				190,940,490	148,010,490	-42,930,000
3	27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Komputer				50,060,560	17,887,360	-32,173,200
3	27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				49,999,900	49,999,900	0
Jumlah Belanja						184,682,319,797	181,010,408,991	-3,671,910,806
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral								
3	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				18,445,913,728	16,193,056,092	-2,252,857,636
3	29	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN				1,299,758,760	934,349,160	-365,409,600
3	29	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1,118,788,380	883,272,380	-235,516,000
3	29	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Pembangunan Sumur Bor (Unit)	30	30	383,354,680	220,404,680	-162,950,000
			Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (Kabupaten/Kota)	22	22			

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
3	29	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				422,819,460	326,428,460	-96,391,000
3	29	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				135,993,000	115,626,000	-20,367,000
3	29	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				135,993,000	115,626,000	-20,367,000
3	29	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				286,826,460	210,802,460	-76,024,000
3	29	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				286,826,460	210,802,460	-76,024,000
3	29	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				1,666,595,060	1,433,008,450	-233,586,610
3	29	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				44,855,960	0	-44,855,960
3	29	Pengendalian dan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya konservasi energi di wilayah Provinsi NTT (unit)	693	693	44,855,960	0	-44,855,960

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
			Terlaksananya konservasi energi di Provinsi NTT (unit)	751	751			
3	29	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				1,621,739,100	1,433,008,450	-188,730,650
3	29	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terlaksananya konservasi energi di wilayah Provinsi NTT (unit)	693	693	1,359,559,690	1,246,464,410	-113,095,280
			Terlaksananya konservasi energi di wilayah Provinsi NTT (unit)	60	60			
3	29	Tambahan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN kepada Badan,Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				5,240,000	5,240,000	0
3	29	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi				262,179,410	186,544,040	-75,635,370
3	29	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				1,108,306,600	830,909,200	-277,397,400
3	29	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1,108,306,600	830,909,200	-277,397,400
3	29	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (unit)		1.413	1,108,306,600	830,909,200	-277,397,400
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (unit)		8.056			

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
3	29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13,948,433,848	12,668,360,822	-1,280,073,026
3	29	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				31,629,380	39,429,480	7,800,100
3	29	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				149,849,440	56,616,000	-93,233,440
3	29	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11,833,695,221	10,807,875,117	-1,025,820,104
3	29	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11,824,095,221	10,798,275,117	-1,025,820,104
3	29	Tambahan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				16,481,234	16,481,234	0
3	29	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9,600,000	9,600,000	0
3	29	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				111,917,674	0	-111,917,674
3	29	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				111,917,674	0	-111,917,674
3	29	Administrasi Umum Perangkat Daerah				293,325,011	195,218,031	-98,106,980
3	29	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10,124,241	10,124,241	0
3	29	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				32,642,750	32,642,750	0
3	29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				16,397,200	16,397,200	0
3	29	Penyediaan Bahan/Material				94,865,820	72,611,840	-22,253,980
3	29	Fasilitasi Kunjungan Tamu				64,542,000	63,442,000	-1,100,000
3	29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74,753,000	0	-74,753,000
3	29	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7,970,000	2,890,000	-5,080,000
3	29	Pengadaan Mebel				5,080,000	0	-5,080,000
		Peralatan dan Mesin						
3	29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2,890,000	2,890,000	0
		Peralatan dan Mesin						
3	29	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,084,400,972	1,061,286,044	-23,114,928
3	29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				39,886,900	18,939,400	-20,947,500

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
3	29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100	195,369,792	192,035,504	-3,334,288
3	29	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2,000,000	2,000,000	0
3	29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				847,144,280	848,311,140	1,166,860
3	29	Tambahan berdasarkan Pertimbangan ojektif lainnya Asn				130,950,000	130,950,000	0
3	29	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				435,646,150	505,046,150	69,400,000
3	29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				46,898,250	46,898,250	0
3	29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38,624,900	108,024,900	69,400,000
3	29	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer				38,624,900	53,024,900	14,400,000
3	29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				347,223,000	347,223,000	0
3	29	Belanja Pemeliharaan				77,223,000	77,223,000	0
3	29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2,900,000	2,900,000	0
3	29	Belanja Pemeliharaan				2,900,000	2,900,000	0
Jumlah Belanja						18,445,913,728	16,193,056,092	-2,252,857,636
Dinas Perindustrian dan Perdagangan								
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3,520,025,940	1,891,017,530	-1,629,008,410
3	30	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				169,663,950	28,435,450	-141,228,500
3	30	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar				110,926,800	25,233,450	-85,693,350
3	30	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				110,926,800	25,233,450	-85,693,350

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
3	30	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)			58,737,150	3,202,000	-55,535,150
3	30	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			58,737,150	3,202,000	-55,535,150
3	30	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			264,118,400	0	-264,118,400
3	30	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			264,118,400	0	-264,118,400
3	30	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi			264,118,400	0	-264,118,400
3	30	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			531,292,320	844,761,860	313,469,540
3	30	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			165,898,620	625,206,120	459,307,500
3	30	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor			165,898,620	625,206,120	459,307,500
3	30	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			254,116,700	179,130,740	-74,985,960
3	30	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			108,161,620	33,175,660	-74,985,960
3	30	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			145,955,080	145,955,080	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
3	30	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya			111,277,000	40,425,000	-70,852,000
3	30	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi			111,277,000	40,425,000	-70,852,000
3	30	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			697,094,800	19,987,900	-677,106,900
3	30	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			697,094,800	19,987,900	-677,106,900
3	30	Pameran Dagang Internasional/Nasional			529,336,100	0	-529,336,100
3	30	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor			167,758,700	19,987,900	-147,770,800
3	30	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			1,526,798,050	957,403,960	-569,394,090
3	30	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			156,843,200	17,952,060	-138,891,140
3	30	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen			156,843,200	17,952,060	-138,891,140
3	30	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			1,075,660,410	848,335,460	-227,324,950
3	30	Pengembangan Layanan Pengujian			1,075,660,410	848,335,460	-227,324,950
3	30	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			294,294,440	91,116,440	-203,178,000
3	30	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen			246,391,340	65,605,340	-180,786,000
3	30	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen			47,903,100	25,511,100	-22,392,000
3	30	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			331,058,420	40,428,360	-290,630,060

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
3	30	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri			150,736,780	40,428,360	-110,308,420	
3	30	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			150,736,780	40,428,360	-110,308,420	
3	30	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			180,321,640	0	-180,321,640	
3	30	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			180,321,640	0	-180,321,640	
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			20,080,463,141	13,029,807,944	-7,050,655,197	
3	31	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			6,295,153,460	966,255,200	-5,328,898,260	
3	31	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			6,295,153,460	966,255,200	-5,328,898,260	
3	31	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	100	100	2,748,243,980	255,364,860	-2,492,879,120
3	31	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	100	100	2,616,878,940	577,780,300	-2,039,098,640
3	31	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	100	100	930,030,540	133,110,040	-796,920,500
3	31	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			167,979,120	68,148,980	-99,830,140	
3	31	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi			167,979,120	68,148,980	-99,830,140	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
3	31	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	100	100	89,325,740	59,779,800	-29,545,940
3	31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	100	100	78,653,380	8,369,180	-70,284,200
3	31	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				195,763,980	59,277,740	-136,486,240
3	31	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				195,763,980	59,277,740	-136,486,240
3	31	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				195,763,980	59,277,740	-136,486,240
3	31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13,421,566,581	11,936,126,024	-1,485,440,557
3	31	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				386,888,600	215,681,470	-171,207,130
3	31	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				246,150,960	84,708,820	-161,442,140
3	31	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7,299,540	7,299,540	0
3	31	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				9,496,850	9,496,850	0
3	31	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				7,293,900	0	-7,293,900
3	31	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	20,473,930	11,182,840	-9,291,090
3	31	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				96,173,420	102,993,420	6,820,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
3	31	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,795,410,905	9,001,023,478	-794,387,427
3	31	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9,767,970,385	8,973,582,958	-794,387,427
3	31	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				0	15,900,000	15,900,000
3	31	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5,170,000	5,170,000	0
3	31	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100	100	7,031,280	7,031,280	0
3	31	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				7,874,480	7,874,480	0
3	31	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran	100	100	7,364,760	7,364,760	0
3	31	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2,049,420	2,049,420	0
3	31	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1,311,520	1,311,520	0
3	31	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				737,900	737,900	0
3	31	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1,312,120	1,312,120	0
3	31	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				324,750	0	-324,750
3	31	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				270,414,820	5,260,000	-265,154,820
3	31	Administrasi Umum Perangkat Daerah				418,553,422	227,523,222	-191,030,200
3	31	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	100	18,503,280	14,993,280	-3,510,000
3	31	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100	100	35,715,990	35,715,990	0
3	31	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	100	9,942,400	6,011,200	-3,931,200
3	31	Penyediaan Bahan/Material				98,792,752	98,792,752	0
3	31	Fasilitasi Kunjungan Tamu				29,650,000	29,650,000	0
3	31	Penyelenggaraan Rapat				225,949,000	42,360,000	-183,589,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
3	31	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			161,568,160	40,494,320	-121,073,840	
3	31	Pengadaan Mebel			17,690,000	0	-17,690,000	
3	31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			121,013,200	32,497,200	-88,516,000	
		Komputer						
3	31	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			22,864,960	7,997,120	-14,867,840	
3	31	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,118,616,344	2,079,689,004	-38,927,340	
3	31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100	100	10,352,900	7,851,960	-2,500,940
3	31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	100	182,180,544	170,252,544	-11,928,000
3	31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1,926,082,900	1,901,584,500	-24,498,400	
3	31	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			136,440,000	113,640,000	-22,800,000	
3	31	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			266,428,040	363,092,990	96,664,950	
3	31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			96,359,950	73,714,000	-22,645,950	
3	31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			54,780,000	36,640,000	-18,140,000	
3	31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16,500,000	11,700,000	-4,800,000	
3	31	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			24,864,000	157,351,300	132,487,300	
3	31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			73,924,090	83,687,690	9,763,600	
Jumlah Belanja					23,600,489,081	14,920,825,474	-8,679,663,607	
Biro Umum								
0	0	p						
4	1	SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			122,263,889,637	108,502,358,049	-13,761,531,588	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
4	01	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17,686,220	17,686,220	0
4	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17,686,220	17,686,220	0
4	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				47,768,297,000	44,948,227,621	-2,820,069,379
4	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				47,768,297,000	44,948,227,621	-2,820,069,379
4	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				744,074,750	894,064,750	149,990,000
4	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				523,896,600	592,636,600	68,740,000
4	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				51,866,400	114,981,800	63,115,400
4	1	Penyediaan Bahan/Material				320,211,045	550,211,045	230,000,000
4	1	Fasilitasi Kunjungan Tamu Dinas				4,486,521,000	4,335,941,200	-150,579,800
4	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6,104,411,100	4,939,675,100	-1,164,736,000
4	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,077,847,860	536,455,500	-1,541,392,360
4	1	Pengadaan Mebel				243,537,300	22,000,000	-221,537,300
		Peralatan dan Mesin						
4	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin Komputer				268,310,560	514,455,500	246,144,940
4	01	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1,566,000,000	0	-1,566,000,000
		Peralatan dan Mesin						
		Bangunan Gedung						
4	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				26,321,750,132	25,960,902,892	-360,847,240
4	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				798,142,300	789,470,300	-8,672,000
4	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100	3,871,920,672	3,835,159,872	-36,760,800
4	01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1,515,924,000	1,545,230,000	29,306,000
4	01	Belanja Pemeliharaan				67,160,000	0	-67,160,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			20,135,763,160	19,791,042,720	-344,720,440
4	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif Lainnya ASN			174,280,000	174,280,000	0
4	01	Belanja Pemeliharaan dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			154,000,000	154,000,000	0
4	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16,480,691,790	9,161,822,000	-7,318,869,790
4	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			80,000,000	207,600,000	127,600,000
4	01	Belanja Pemeliharaan			80,000,000	207,600,000	127,600,000
4	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			560,300,000	1,115,300,000	555,000,000
4	01	Belanja Pemeliharaan			244,500,000	799,500,000	555,000,000
4	1	Pemeliharaan Mebel			39,800,000	39,800,000	0
4	01	Belanja Pemeliharaan			39,800,000	39,800,000	0
4	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			514,000,000	780,480,000	266,480,000
4	01	Belanja Pemeliharaan			514,000,000	780,480,000	266,480,000
4	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			15,286,591,790	7,018,642,000	-8,267,949,790
4	01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung			7,059,506,732	4,162,458,000	-2,897,048,732
4	01	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			3,204,297,000	3,192,468,981	-11,828,019
4	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2,693,797,000	2,681,968,981	-11,828,019
4	01	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			340,000,000	340,000,000	0
4	01	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			170,500,000	170,500,000	0
		Peralatan dan Mesin					

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
4	01	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah			7,373,825,740	6,240,531,340	-1,133,294,400	
4	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			1,779,281,720	1,886,272,920	106,991,200	
4	01	Belanja Pemeliharaan Jaringan			27,500,000	40,000,000	12,500,000	
4	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			1,188,038,220	1,217,038,220	29,000,000	
4	01	Belanja Pemeliharaan			27,500,000	40,000,000	12,500,000	
4	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			4,406,505,800	3,137,220,200	-1,269,285,600	
4	01	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jaringan			1,000,000	1,000,000	0	
4	01	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			6,788,513,000	7,016,753,000	228,240,000	
4	01	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			6,788,513,000	7,016,753,000	228,240,000	
Jumlah Belanja					122,263,889,637	108,502,358,049	-13,761,531,588	
Biro Hukum								
4	1	SEKRETARIAT DAERAH			3,647,076,420	2,229,178,620	-1,417,897,800	
4	01	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			2,200,079,400	1,359,553,580	-840,525,820	
4	01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			738,573,400	515,374,580	-223,198,820	
4	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan			291,763,800	230,666,800	-61,097,000	
4	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Terlaksananya fasilitasi ranperda dan ranpergub (nersen)	100	100	141,598,880	131,848,880	-9,750,000
4	01	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	-	-	112,620,920	48,697,920	-63,923,000	
4	01	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya (persen)	100	100	192,589,800	104,160,980	-88,428,820

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
					1,461,506,000	844,179,000	-617,327,000
4	1	Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-			
4	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum			1,091,444,000	734,067,000	-357,377,000
					370,062,000	110,112,000	-259,950,000
4	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Terlaksananya penyelesaian masalah hukum (nersen)	100	100		
					1,446,997,020	869,625,040	-577,371,980
4	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya penyelesaian masalah non litigasi dan HAM (nersen)	100	100		
4	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			180,000,000	151,824,000	-28,176,000
4	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			30,000,000	15,636,000	-14,364,000
4	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	30,000,000	15,636,000	-14,364,000
4	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	10,000,000	0	-10,000,000
4	01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	10,000,000	0	-10,000,000
4	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	100,000,000	120,552,000	20,552,000
					75,000,000	0	-75,000,000
4	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (%)	100	100		
4	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			75,000,000	0	-75,000,000
4	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah			632,307,900	240,491,920	-391,815,980
4	01	Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan			3,500,000	3,500,000	0
					2,496,000	2,496,000	0
4	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (%)	100	100		
					39,812,920	40,508,920	696

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
4	1	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%)	100	100			
4	1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	24,984,000	24,984,000	0
4	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	561,514,980	169,003,000	-392,511,980
						386,574,000	300,114,000	-86,460,000
4	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
4	1	Pengadaan Mebel				111,424,000	134,356,000	22,932,000
		Peralatan dan Mesin	-	-	-			
4	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				246,150,000	133,358,000	-112,792,000
		Peralatan dan Mesin Komputer	-	-	-			
4	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29,000,000	32,400,000	3,400,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-			
4	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				121,332,000	125,412,000	4,080,000
4	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5,292,000	5,292,000	0
						8,400,000	8,400,000	0
4	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa surat menyurat (%)	100	100			
						107,640,000	111,720,000	4,080,000
4	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100			
						51,783,120	51,783,120	0
4	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
4	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				44,841,520	44,841,520	0
						3,050,000	3,050,000	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
4	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (%)	100	100			
		Pemeliharaan						
			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (%)	100	100	3,891,600	3,891,600	0
4	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
			-	-	-	3,647,076,420	2,229,178,620	-1,417,897,800
Jumlah Belanja								
Biro Organisasi								
Jumlah Pendapatan						0	0	0
4	1	SEKRETARIAT DAERAH				3,456,777,372	2,203,615,852	-1,253,161,520
4	01	Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1,001,219,900	788,179,060	-213,040,840
4	01	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi				361,119,910	312,362,490	-48,757,420
4	01	Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				174,460,670	155,274,910	-19,185,760
4	01	Penataan Analisis Jabatan				465,639,320	320,541,660	-145,097,660
4	01	Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				1,719,403,130	1,090,937,350	-628,465,780
4	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				341,747,060	210,864,900	-130,882,160
4	01	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				450,364,790	302,941,750	-147,423,040
4	01	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				88,271,760	77,746,660	-10,525,100
4	01	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				436,702,960	323,753,980	-112,948,980
4	01	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik				402,316,560	175,630,060	-226,686,500
4	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				736,154,342	324,499,442	-411,654,900
4	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				117,215,900	82,981,400	-34,234,500
4	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				24,244,710	15,874,710	-8,370,000
4	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				24,909,780	23,049,780	-1,860,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
4	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			23,164,650	20,923,650	-2,241,000	
4	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			23,133,260	23,133,260	0	
4	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21,763,500	0	-21,763,500	
4	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			96,756,740	0	-96,756,740	
4	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai			43,736,000	0	-43,736,000	
4	01	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			53,020,740	0	-53,020,740	
4	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah			213,845,500	61,416,500	-152,429,000	
4	01	Penyediaan Barang Penggandaan			20,001,000	20,001,000	0	
4	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4,492,800	4,492,800	0	
4	01	Penyediaan Bahan/Material			20,007,700	20,007,700	0	
4	01	Fasilitasi Kunjungan Tamu			21,918,000	16,600,000	-5,318,000	
4	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			147,426,000	315,000	-147,111,000	
4	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			114,898,560	22,672,000	-92,226,560	
4	1	Pengadaan Mebel			80,931,000	0	-80,931,000	
		Komunikasi, dan Pemancar						
4	01	Pengadaan Peralatan Komputer			33,967,560	22,672,000	-11,295,560	
4	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70,481,000	70,480,900	-100	
4	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1,834,500	1,834,500	0	
4	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100	15,000,000	15,000,000	0
4	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pertimbangan Objektif Lainnya			53,646,500	53,646,400	-100	
4	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			122,956,642	86,948,642	-36,008,000	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
4	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			37,986,642	37,986,642	0	
4	01	Pemeliharaan Peralatan			84,970,000	48,962,000	-36,008,000	
Jumlah Belanja					3,456,777,372	2,203,615,852	-1,253,161,520	
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan								
4	1	SEKRETARIAT DAERAH			2,095,262,619	1,902,441,459	-192,821,160	
4	1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1,311,397,650	1,217,175,090	-94,222,560	
4	01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			561,623,900	538,075,900	-23,548,000	
4	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro	100	100	314,925,800	291,377,800	-23,548,000
4	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			246,698,100	246,698,100	0	
4	01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			443,970,170	406,664,170	-37,306,000	
4	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	9	9	312,141,480	312,141,480	0
		Dinas						
4	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			55,315,300	27,949,300	-27,366,000	
4	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			76,513,390	66,573,390	-9,940,000	
		Dinas						
4	01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			305,803,580	272,435,020	-33,368,560	
4	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Jasa keuangan dan Aneka Usaha	5	5	81,380,660	48,012,100	-33,368,560
4	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi			14,465,700	14,465,700	0	
4	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			209,957,220	209,957,220	0	
		Dinas						

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	01	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			222,419,850	221,724,850	-695,000
4	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			222,419,850	221,724,850	-695,000
4	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD			222,419,850	221,724,850	-695,000
4	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			561,445,119	463,541,519	-97,903,600
4	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19,999,000	19,999,000	0
4	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			19,999,000	19,999,000	0
4	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			22,198,000	22,198,000	0
4	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			22,198,000	22,198,000	0
4	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah			237,057,600	141,806,000	-95,251,600
4	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			24,964,280	24,964,280	0
4	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bahan Perpustakaan			5,391,400	4,492,800	-898,600
4	1	Penyediaan Bahan/Material			29,973,920	27,481,920	-2,492,000
4	1	Fasilitasi Kunjungan Tamu			64,220,000	64,220,000	0
4	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			112,508,000	20,647,000	-91,861,000
4	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			31,312,000	28,660,000	-2,652,000
4	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Komputer			31,312,000	28,660,000	-2,652,000
4	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126,167,380	126,167,380	0
4	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6,507,880	6,507,880	0
4	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			16,965,000	16,965,000	0
4	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pertimbangan Objektif Lainnya			102,694,500	102,694,500	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
4	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				124,711,139	124,711,139	0
4	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				105,578,139	105,578,139	0
4	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19,133,000	19,133,000	0
Jumlah Belanja						2,095,262,619	1,902,441,459	-192,821,160
Biro Pemerintahan								
4	1	SEKRETARIAT DAERAH				3,539,539,640	2,341,950,880	-1,197,588,760
4	01	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				1,590,089,480	1,445,078,240	-145,011,240
4	01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				422,506,800	454,194,140	31,687,340
4	01	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				226,006,580	154,533,080	-71,473,500
4	01	Fasilitasi Penataan Wilayah	-	-	-	196,500,220	299,661,060	103,160,840
4	01	Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-	-	617,964,520	590,143,060	-27,821,460
4	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				201,044,840	268,965,200	67,920,360
4	01	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	416,919,680	321,177,860	-95,741,820
4	01	Fasilitasi Kerjasama Daerah	-	-	-	549,618,160	400,741,040	-148,877,120
4	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah				218,658,560	124,712,040	-93,946,520
4	01	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	-	-	-	203,293,000	190,617,000	-12,676,000
4	01	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-	-	-	127,666,600	85,412,000	-42,254,600
4	01	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	1,632,353,010	713,564,020	-918,788,990
4	01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				604,821,480	112,093,800	-492,727,680
4	01	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				604,821,480	112,093,800	-492,727,680
4	01	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-	-	-	369,960,730	160,318,750	-209,641,980
4	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				347,113,040	137,471,060	-209,641,980
4	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	-	-	-	22,847,690	22,847,690	0
4	01	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-	-	-	657,570,800	441,151,470	-216,419,330

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
4	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan pariwisata				172,694,430	147,355,680	-25,338,750
		Sinkronisasi Kebijakan	-	-	-			
4	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-	-	-	484,876,370	293,795,790	-191,080,580
4	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	317,097,150	183,308,620	-133,788,530
4	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29,982,816	20,683,136	-9,299,680
4	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5,265,210	5,265,210	0
4	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	4,419,750	4,419,750	0
4	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	4,649,750	0	-4,649,750
4	01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	4,649,930	0	-4,649,930
4	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	10,998,176	10,998,176	0
						27,358,000	6,000,000	-21,358,000
4	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (%)	100	100			
4	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai				27,358,000	6,000,000	-21,358,000
4	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah				150,947,680	43,406,680	-107,541,000
4	01	Penyediaan Barang Pnggandaan				9,579,000	9,579,000	0
						4,492,800	4,492,800	0
4	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan (%)	100	100			
						17,610,880	17,610,880	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
4	01	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%)	100	100			
						11,724,000	11,724,000	0
4	01	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-			
4	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	107,541,000	0	-107,541,000
4	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				33,988,200	33,988,200	0
4	01	Pengadaan Peralatan Pertimbangan Objektif Lainnya				33,988,200	33,988,200	0
4	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	53,289,280	53,289,280	0
4	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9,489,280	9,489,280	0
						19,800,000	19,800,000	0
4	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa surat menyurat (%)	100	100			
						24,000,000	24,000,000	0
4	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100			
4	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	21,531,174	25,941,324	4,410,150
4	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18,231,174	22,641,324	4,410,150
Jumlah Belanja			Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional (paket)	100	100	3,539,539,640	2,341,950,880	-1,197,588,760
Biro Pengadaan Barang dan Jasa								
4	1	SEKRETARIAT DAERAH				8,769,025,604	8,591,640,714	-177,384,890
4	01	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				7,530,396,994	7,355,506,244	-174,890,750

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
4	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	6,269,744,020	6,721,777,020	452,033,000
4	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	58,678,820	58,678,820	0
4	01	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	6,021,698,040	6,563,301,040	541,603,000
4	01	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	189,367,160	99,797,160	-89,570,000
4	01	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	495,505,194	399,640,144	-95,865,050
4	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik				127,638,560	95,638,560	-32,000,000
4	01	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				80,153,850	58,048,850	-22,105,000
4	01	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Peralatan dan Mesin Komputer	-	-	-	287,712,784	245,952,734	-41,760,050
4	01	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	765,147,780	234,089,080	-531,058,700
4	01	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				549,853,200	80,671,500	-469,181,700
4	01	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	215,294,580	153,417,580	-61,877,000
4	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	1,238,628,610	1,236,134,470	-2,494,140
4	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				44,128,060	44,128,060	0
4	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				29,151,560	29,151,560	0
4	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	14,976,500	14,976,500	0
						45,415,000	0	-45,415,000
4	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (%)	100	100			
4	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				45,415,000	0	-45,415,000
						217,502,280	176,198,280	-41,304,000
4	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal (%)	100	100			

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
4	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2,499,200	2,499,200	0	
					45,000,000	45,000,000	0	
4	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)	100	100			
					8,742,360	8,742,360	0	
4	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (%)	100	100			
					44,996,720	44,996,720	0	
4	1	Penyediaan Bahan/Material	Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%)	100	100			
4	1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	74,960,000	74,960,000	0
					41,304,000	0	-41,304,000	
4	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
					135,762,000	27,716,000	-108,046,000	
4	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-			
4	1	Pengadaan Mebel				76,300,000	0	-76,300,000
		Peralatan dan Mesin						
					59,462,000	27,716,000	-31,746,000	
4	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Tersedianya mebeleur (%)	100	100			
					698,513,030	904,319,990	205,806,960	
4	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya peralatan gedung kantor (%)	100	100			
4	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3,994,200	3,994,200	0
					483,551,000	483,551,000	0	
4	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa surat menyurat (%)	100	100			
					9,999,270	9,999,270	0	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
4	01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100			
						200,968,560	406,775,520	205,806,960
4	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa jaminan sosial (%)	100	100			
						97,308,240	83,772,140	-13,536,100
4	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			
4	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				77,380,640	77,380,640	0
						19,927,600	6,391,500	-13,536,100
4	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (%)	100	100			
						8,769,025,604	8,591,640,714	-177,384,890
Jumlah Belanja			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (%)	100	100			
Biro Administrasi Pimpinan								
4	1	SEKRETARIAT DAERAH				5,099,928,660	4,419,513,700	-680,414,960
4	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5,099,928,660	4,419,513,700	-680,414,960
4	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12,979,650	12,979,650	0
4	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2,440,000	2,440,000	0
4	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10,539,650	10,539,650	0
4	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				219,352,630	46,450,000	-172,902,630

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
4	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			46,450,000	46,450,000	0	
4	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			122,031,000	0	-122,031,000	
4	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			50,871,630	0	-50,871,630	
4	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah			649,495,160	315,675,830	-333,819,330	
4	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			49,673,750	53,144,750	3,471,000	
4	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			48,999,400	27,571,300	-21,428,100	
		Bahan Perpustakaan						
4	1	Penyediaan Bahan/Material			45,749,780	74,178,780	28,429,000	
4	1	Fasilitasi Kunjungan Tamu			119,972,000	160,781,000	40,809,000	
4	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			385,100,230	0	-385,100,230	
4	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			316,362,000	264,330,000	-52,032,000	
4	1	Pengadaan Mebel			31,868,000	31,820,000	-48,000	
4	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			284,494,000	232,510,000	-51,984,000	
		Komputer						
4	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			197,705,800	197,705,800	0	
4	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			11,976,300	11,976,300	0	
4	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100	82,500,000	82,500,000	0
4	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pertimbangan Objektif Lainnya			103,229,500	103,229,500	0	
4	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			220,659,960	212,559,960	-8,100,000	
4	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			74,502,220	74,502,220	0	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
4	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			122,957,740	122,957,740	0	
4	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			23,200,000	15,100,000	-8,100,000	
4	01	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			2,613,917,150	2,500,356,150	-113,561,000	
4	1	Penyiapan Materi Pimpinan			250,417,490	236,923,490	-13,494,000	
4	01	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			1,224,056,040	1,274,056,040	50,000,000	
4	01	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan			1,139,443,620	989,376,620	-150,067,000	
4	1	Fasilitasi Keprotokolan			869,456,310	869,456,310	0	
4	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Dinas			565,238,220	565,238,220	0	
4	01	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			13,500,000	13,500,000	0	
4	01	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			290,718,090	290,718,090	0	
Jumlah Belanja					5,099,928,660	4,419,513,700	-680,414,960	
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah								
4	2	SEKRETARIAT DPRD			142,469,094,857	135,016,624,167	-7,452,470,690	
4	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			61,663,308,580	56,933,578,110	-4,729,730,470	
4	02	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			3,370,736,940	4,055,295,440	684,558,500	
4	02	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100	100	1,527,133,800	2,622,091,800	1,094,958,000
4	2	Pembahasan Rancangan Perda	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100	100	525,953,200	449,439,200	-76,514,000
4	02	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100	100	498,831,000	261,111,000	-237,720,000
4	02	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100	100	560,000,000	560,000,000	0
4	2	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100	100	258,818,940	162,653,440	-96,165,500
4	02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			2,083,407,000	1,288,032,000	-795,375,000	
4	2	Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	100	34,490,000	34,490,000	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
4	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	100	21,400,000	0	-21,400,000
4	2	Pembahasan APBD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	100	603,693,000	22,650,000	-581,043,000
4	2	Pembahasan Perubahan APBD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	100	594,987,000	591,687,000	-3,300,000
4	2	Pembahasan Laporan Semester	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	100	14,638,000	7,925,000	-6,713,000
4	02	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	100	814,199,000	631,280,000	-182,919,000
4	02	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				22,484,526,000	19,598,317,000	-2,886,209,000
4	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	3,979,548,000	3,240,639,000	-738,909,000
4	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	4,897,192,000	3,850,018,000	-1,047,174,000
4	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	4,995,582,000	3,937,190,000	-1,058,392,000
4	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	2,190,880,000	2,911,519,000	720,639,000
4	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	2,219,884,000	1,852,155,000	-367,729,000
4	02	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	2,180,449,000	2,098,140,000	-82,309,000
4	02	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	2,020,991,000	1,708,656,000	-312,335,000
4	2	Peningkatan Kapasitas DPRD				2,467,479,550	1,401,749,350	-1,065,730,200
4	2	Bimbingan Teknis DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	100	100	171,112,000	0	-171,112,000
4	02	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Peningkatan Kapasitas DPRD	100	100	766,011,200	245,794,000	-520,217,200
4	02	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Peningkatan Kapasitas DPRD	100	100	610,935,000	460,374,000	-150,561,000
4	2	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Peningkatan Kapasitas DPRD	100	100	540,000,000	540,000,000	0
4	02	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas DPRD	100	100	324,160,000	100,320,000	-223,840,000
4	02	Penyusunan Program Kerja DPRD		100	100	55,261,350	55,261,350	0
4	02	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				25,900,072,320	27,565,208,320	1,665,136,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
4	2	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	100	2,524,324,000	3,312,460,000	788,136,000
4	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	100	60,522,320	60,522,320	0
4	2	Pelaksanaan Reses	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	100	23,315,226,000	24,192,226,000	877,000,000
4	02	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				202,489,000	133,242,000	-69,247,000
4	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	100	202,489,000	133,242,000	-69,247,000
4	2	Pembahasan Kerja Sama Daerah				135,208,020	0	-135,208,020
4	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Pembahasan Kerja Sama Daerah	100	100	135,208,020	0	-135,208,020
4	2	Fasilitasi Tugas DPRD				5,019,389,750	2,891,734,000	-2,127,655,750
4	02	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	100	100	1,082,400,000	866,732,000	-215,668,000
4	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	100	100	450,444,750	207,490,000	-242,954,750
4	02	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musvawarah				3,486,545,000	1,817,512,000	-1,669,033,000
4	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				80,805,786,277	78,083,046,057	-2,722,740,220
4	02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				105,466,250	48,813,000	-56,653,250
4	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12,280,000	12,280,000	0
4	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,127,120,699	9,278,314,459	151,193,760
4	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9,108,760,949	9,260,257,709	151,496,760
4	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18,359,750	18,056,750	-303,000
4	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				9,620,000	9,620,000	0
4	02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				58,636,000	0	-58,636,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	02	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,417,775,992	713,084,752	-704,691,240
4	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			86,620,650	61,278,090	-25,342,560
4	02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			59,929,612	55,855,012	-4,074,600
4	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			20,995,200	0	-20,995,200
4	02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			170,833,750	98,750,000	-72,083,750
4	02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			536,803,000	293,718,000	-243,085,000
4	2	Penyediaan Bahan/Material			297,984,780	92,681,650	-205,303,130
4	2	Fasilitasi Kunjungan Tamu			151,362,000	110,802,000	-40,560,000
4	02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			93,247,000	0	-93,247,000
4	02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			727,001,000	300,020,000	-426,981,000
4	2	Pengadaan Mebel			727,001,000	300,020,000	-426,981,000
4	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif Lainnya ASN			1,700,000	1,700,000	0
4	02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,508,204,360	2,950,738,120	-557,466,240
4	2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			16,145,440	6,300,000	-9,845,440
4	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1,116,598,920	817,722,120	-298,876,800
4	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2,375,460,000	2,126,716,000	-248,744,000
4	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif Lainnya ASN			184,740,000	184,740,000	0
4	02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,071,445,941	2,666,421,211	594,975,270
4	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			95,575,600	333,810,000	238,234,400
4	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			169,590,000	263,760,400	94,170,400
4	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			323,137,334	334,135,414	10,998,080

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
4	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif Lainnya ASN			0	1,700,000	1,700,000	
4	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1,032,713,684	1,284,286,074	251,572,390	
4	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif Lainnya ASN			1,700,000	1,700,000	0	
4	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Layanan Administrasi DPRD	100	100	450,429,323	450,429,323	0
4	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif Lainnya ASN			37,615,323	37,615,323	0	
4	02	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			58,260,116,865	57,337,943,585	-922,173,280	
4	2	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD	100	100	56,891,195,615	56,099,022,335	-792,173,280
4	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	100	1,007,700,000	877,700,000	-130,000,000
4	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif Lainnya ASN			1,700,000	1,700,000	0	
4	02	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	100	361,221,250	361,221,250	0
4	2	Layanan Adminstrasi DPRD			5,520,399,170	4,778,090,930	-742,308,240	
4	02	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			9,669,290	11,084,790	1,415,500	
4	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	100	100	447,434,880	261,162,240	-186,272,640
4	02	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Layanan Adminitrasi DPRD	100	100	825,405,000	454,455,000	-370,950,000
4	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Layanan Administrasi DPRD	100	100	4,237,890,000	4,051,388,900	-186,501,100
Jumlah Belanja						142,469,094,857	135,016,624,167	-7,452,470,690
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah								
5	1	PERENCANAAN			30,279,883,150	29,947,154,179	-332,728,971	
5	01	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			2,797,134,990	8,051,622,245	5,254,487,255	
5	01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1,045,995,888	864,471,688	-181,524,200	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5	01	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			106,214,720	106,214,720	0
5	01	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			98,708,370	75,608,370	-23,100,000
5	01	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi			143,013,563	138,008,563	-5,005,000
5	01	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi			698,059,235	544,640,035	-153,419,200
5	01	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1,146,105,302	7,112,327,757	5,966,222,455
5	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			25,019,130	6,543,622,560	6,518,603,430
		Pertimbangan					
5	01	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD			835,256,022	519,549,047	-315,706,975
5	01	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			285,830,150	49,156,150	-236,674,000
5	01	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			605,033,800	74,822,800	-530,211,000
5	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi			216,590,720	2,289,720	-214,301,000
5	01	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			355,900,780	39,990,780	-315,910,000
		Dinas					
5	01	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			32,542,300	32,542,300	0
5	01	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			6,821,180,800	4,746,161,280	-2,075,019,520
5	01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			3,025,216,870	1,690,528,350	-1,334,688,520

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Politik dengan pusat dan Kab/kota, 1 Paket	1	1	512,901,520	0	-512,901,520
5	01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik di 8 OPD	8	8	101,658,680	101,658,680	0
5	01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Politik di 6 OPD	6	6	715,622,820	83,532,820	-632,090,000
5	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Implementasi RAD SDGs Provinsi NTT tahun 2019-2023 dan Road Map SDGs Provinsi NTT 2023-2030, 1 dokumen	1	1	211,362,050	193,196,050	-18,166,000
5	01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di 7 OPD	7	7	59,720,000	59,720,000	0
5	01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di 7 OPD	7	7	808,801,580	808,801,580	0
5	01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				615,150,220	443,619,220	-171,531,000
5	01	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				1,623,156,580	770,830,580	-852,326,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pariwisata, keuangan dan jasa dengan pusat dan kabupaten/kota, 1 paket	1	1	391,476,300	259,028,300	-132,448,000
5	01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pariwisata, Keuangan dan Jasa di 6 OPD	6	6	34,889,360	34,889,360	0
5	01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pariwisata, Keuangan dan Jasa di 6 OPD	6	6	366,906,380	98,347,380	-268,559,000
5	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan sektor pertanian dan SDA dengan pusat dan Kab/kota, 1 Paket	1	1	728,745,640	290,926,640	-437,819,000
5	01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pertanian dan SDA di 6 OPD	6	6	59,377,320	59,377,320	0
5	01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Penyusunan RAD Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon	1	1	41,761,580	28,261,580	-13,500,000
5	01	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				2,172,807,350	2,284,802,350	111,995,000
5	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan pusat dan kabupaten/kota, 1 paket	1	1	1,681,062,370	2,025,028,370	343,966,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5	01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di 6 OPD	6	6	110,615,320	28,868,320	-81,747,000
5	01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 6 OPD	6	6	381,129,660	230,905,660	-150,224,000
5	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				20,661,567,360	17,149,370,654	-3,512,196,706
5	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,040,919,920	1,242,636,770	201,716,850
5	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah				139,333,700	189,669,700	50,336,000
5	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				137,188,950	137,188,950	0
5	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				192,604,550	248,572,550	55,968,000
5	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3,127,160	0	-3,127,160
5	01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				3,160,910	0	-3,160,910
5	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				108,045,970	108,045,970	0
5	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				457,458,680	559,159,600	101,700,920
5	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17,028,182,760	14,038,100,674	-2,990,082,086
5	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				790,253,760	818,692,860	28,439,100
5	01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				260,462,000	260,462,000	0
5	01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				232,937,760	232,937,760	0
5	01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				27,524,240	27,524,240	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				244,740,800	248,916,360	4,175,560
5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				30,773,920	30,773,920	0
5	01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				80,194,880	199,083,440	118,888,560
5	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				133,772,000	19,059,000	-114,713,000
5	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah				610,644,300	321,678,300	-288,966,000
5	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18,555,200	18,555,200	0
5	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				19,573,300	19,573,300	0
5	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				17,596,800	17,596,800	0
5	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				554,919,000	265,953,000	-288,966,000
5	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				223,660,000	0	-223,660,000
5	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peralatan dan Mesin,Komputer				223,660,000	0	-223,660,000
5	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				809,606,910	650,939,630	-158,667,280
5	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				14,680,000	14,680,000	0
5	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				626,091,330	464,824,050	-161,267,280
5	01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65,350,720	65,350,720	0
5	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				103,484,860	106,084,860	2,600,000
5	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				443,350,670	386,636,920	-56,713,750
5	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				291,533,670	251,519,920	-40,013,750
5	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				90,817,000	90,817,000	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN				
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
5	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			61,000,000	44,300,000	-16,700,000		
5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2,947,362,916	1,654,581,091	-1,292,781,825		
5	05	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			2,947,362,916	1,654,581,091	-1,292,781,825		
5	05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			496,219,840	238,839,840	-257,380,000		
5	05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Kelitbangan Penelitian / Pengembangan / Pengkajian 2 dokumen	5	5	496,219,840	238,839,840	-257,380,000	
5	05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			524,999,870	285,114,150	-239,885,720		
5	05	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Kelitbangan Penelitian / Pengembangan / Pengkajian 2 dokumen	2	2	524,999,870	285,114,150	-239,885,720	
5	05	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			1,926,143,206	1,130,627,101	-795,516,105		
5	05	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Inkubator Inovasi Daerah, 1 laporan	1	1	753,175,506	333,312,201	-419,863,305	
		Peralatan dan Mesin							
		Instalasi							
5	05	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Pembuatan media untuk research inventory terintegrasi dalam portal NTT satu data, 1 dokumen	1	1	353,719,950	309,619,950	-44,100,000	
5	05	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terlaksananya Penyusunan Buku Ilmiah. 5 judul buku	5	5	560,523,880	298,169,880	-262,354,000	
		Peralatan dan Mesin							
5	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			258,723,870	189,525,070	-69,198,800		
Jumlah Belanja							33,227,246,066	31,601,735,270	-1,625,510,796
Badan Keuangan Daerah									
5	2	KEUANGAN			949,580,517,170	972,165,901,929	22,585,384,759		
5	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			867,108,947,099	919,033,568,239	51,924,621,140		

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5	02	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				15,495,713,020	13,779,829,760	-1,715,883,260
5	02	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				839,098,250	508,208,220	-330,890,030
5	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				931,850,890	688,335,390	-243,515,500
5	02	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				228,990,320	86,240,890	-142,749,430
5	02	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				572,702,180	193,750,490	-378,951,690
5	02	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD				448,595,870	335,168,340	-113,427,530
5	02	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				551,488,800	573,981,680	22,492,880
5	02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				3,659,676,010	3,629,956,210	-29,719,800
5	02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				3,526,038,030	3,639,114,060	113,076,030
5	02	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2,947,150,100	3,426,975,910	479,825,810
5	02	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				476,525,630	72,985,630	-403,540,000
5	02	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				579,108,680	209,252,680	-369,856,000
5	02	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				734,488,260	415,860,260	-318,628,000
5	02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				4,002,068,060	3,265,388,060	-736,680,000
5	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				687,708,180	661,341,180	-26,367,000
5	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				528,076,760	528,076,760	0
5	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				494,796,720	494,496,720	-300,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			528,319,280	527,859,280	-460,000
5	02	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota			324,561,540	223,283,540	-101,278,000
5	02	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah			557,281,000	184,891,000	-372,390,000
5	02	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			72,316,840	71,396,840	-920,000
5	02	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			56,843,280	56,643,280	-200,000
5	02	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			46,936,400	46,736,400	-200,000
5	02	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			47,889,600	47,779,600	-110,000
5	02	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			388,494,300	190,371,300	-198,123,000
5	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			268,844,160	232,512,160	-36,332,000
5	02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			4,064,865,980	3,014,136,500	-1,050,729,480

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5	02	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			1,116,423,860	1,097,735,880	-18,687,980
5	02	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			268,408,500	351,331,500	82,923,000
5	02	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			770,537,140	623,573,760	-146,963,380
5	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			462,440,660	287,196,860	-175,243,800
5	02	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			625,969,500	654,298,500	28,329,000
5	02	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			821,086,320	0	-821,086,320
5	02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			4,975,864,140	4,684,727,220	-291,136,920
5	02	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			76,171,840	76,171,840	0
5	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			1,161,661,960	1,088,786,980	-72,874,980
5	02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			1,432,471,810	1,417,404,810	-15,067,000
5	02	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			1,795,943,160	1,592,750,320	-203,192,840

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5	02	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			151,259,700	151,257,600	-2,100	
5	02	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			223,263,900	223,263,900	0	
5	02	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi			135,091,770	135,091,770	0	
5	02	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			838,570,435,899	894,289,486,699	55,719,050,800	
5	02	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			39,307,557,170	64,502,620,245	25,195,063,075	
5	02	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			109,910,372,509	81,383,681,800	-28,526,690,709	
5	02	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			78,123,915,460	211,095,309,592	132,971,394,132	
5	02	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi			611,228,590,760	537,307,875,062	-73,920,715,698	
5	02	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1,521,863,170	823,078,080	-698,785,090	
5	02	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1,521,863,170	823,078,080	-698,785,090	
5	2	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi NTT, Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi NTT dan Standar Biaya Kegiatan Provinsi NTT (paket)	1	1	1,521,863,170	823,078,080	-698,785,090
5	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			80,949,706,901	52,309,255,610	-28,640,451,291	
5	02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			941,125,260	379,668,240	-561,457,020	
5	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			253,907,040	230,610,640	-23,296,400	
5	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			164,162,000	149,057,600	-15,104,400	
5	02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			113,275,840	0	-113,275,840	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	293,038,280	0	-293,038,280
5	02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				116,742,100	0	-116,742,100
5	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				71,468,540,453	45,701,244,140	-25,767,296,313
5	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				25,320,779,299	18,194,568,060	-7,126,211,239
5	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2,476,535,000	2,251,119,100	-225,415,900
5	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				42,745,494,580	24,999,884,560	-17,745,610,020
5	02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				355,719,830	255,672,420	-100,047,410
5	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				189,162,144	0	-189,162,144
5	02	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				34,999,910	0	-34,999,910
5	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				196,999,790	0	-196,999,790
5	02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				148,849,900	0	-148,849,900
5	02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				181,255,930	160,536,930	-20,719,000
5	02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				49,999,716	46,320,716	-3,679,000
5	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				81,256,340	64,216,340	-17,040,000
5	02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				49,999,874	49,999,874	0
5	02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				449,788,700	127,832,160	-321,956,540
5	02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				99,832,160	99,832,160	0
5	02	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				67,959,860	0	-67,959,860
5	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				226,645,000	28,000,000	-198,645,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5	02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			55,351,680	0	-55,351,680	
5	02	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,881,325,358	1,594,933,740	-1,286,391,618	
5	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			39,494,750	39,494,750	0	
5	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa jaminan sosial	100	100	19,808,160	2,004,000	-17,804,160
		Komputer						
5	02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			25,106,248	0	-25,106,248	
5	02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			499,950,000	100,625,000	-399,325,000	
5	02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	100	99,949,200	86,132,800	-13,816,400
5	2	Penyediaan Bahan/Material			351,189,400	504,537,190	153,347,790	
5	2	Fasilitasi Kunjungan Tamu			593,680,000	593,680,000	0	
5	02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1,152,481,000	268,460,000	-884,021,000	
5	02	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			99,666,600	0	-99,666,600	
5	02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,094,878,000	481,380,700	-613,497,300	
5	2	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan mebeleur	100	100	260,500,000	481,380,700	220,880,700
5	02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			834,378,000	0	-834,378,000	
		Komputer						
5	02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,802,768,800	3,075,120,980	272,352,180	
5	2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			68,773,200	68,773,200	0	
5	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	100	1,022,400,000	1,022,400,000	0
		Komputer						
5	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1,711,595,600	1,983,947,780	272,352,180	
5	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif Lainnya ASN			647,810,000	615,210,000	-32,600,000	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5	02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,130,024,400	788,538,720	-341,485,680
5	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			385,664,400	469,766,640	84,102,240
5	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Komputer			430,410,000	0	-430,410,000
5	02	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			274,950,000	279,772,080	4,822,080
5	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			39,000,000	39,000,000	0
Jumlah Belanja					949,580,517,170	972,165,901,929	22,585,384,759
Badan Pendapatan dan Aset Daerah							
5	2	KEUANGAN			158,364,909,210	121,194,759,314	-37,170,149,896
5	02	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			6,795,330,950	5,043,121,250	-1,752,209,700
5	02	Pengelolaan Barang Milik Daerah			6,795,330,950	5,043,121,250	-1,752,209,700
5	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			401,233,730	364,901,730	-36,332,000
					450,436,080	423,008,080	-27,428,000
5	02	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi NTT, Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi NTT dan Standar Biaya Kegiatan Provinsi NTT (paket)	1	1		
					185,974,140	184,924,140	-1,050,000
5	02	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (%)	100	100		
					1,325,714,000	1,238,830,000	-86,884,000
5	02	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100	100		
					2,418,361,740	1,288,907,740	-1,129,454,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5	02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah (%)	100	100			
						82,450,000	82,450,000	0
5	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah (%)	100	100			
5	2	Penilaian Barang Milik Daerah				156,762,940	137,798,940	-18,964,000
						737,346,600	463,552,600	-273,794,000
5	02	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah (%)	100	100			
						628,846,100	452,486,400	-176,359,700
5	02	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						
						171,439,800	169,939,800	-1,500,000
5	02	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (%)	100	100			
						183,799,820	183,549,820	-250,000
5	02	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (%)	100	100			
						135,416,000	135,222,000	-194,000
5	02	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD (%)	100	100			

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
					20,884,927,050	19,998,045,050	-886,882,000	
5	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	100	100			
5	02	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				20,884,927,050	19,998,045,050	-886,882,000
5	02	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				116,220,000	116,220,000	0
						62,912,020	82,473,020	19,561,000
5	02	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (%)	100	100			
						152,657,580	144,027,580	-8,630,000
5	02	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Penyusunan Kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah (%)	100	100			
						203,122,850	190,819,850	-12,303,000
5	02	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi (%)	100	100			
5	2	Penagihan Pajak Daerah				18,667,315,690	17,889,358,690	-777,957,000
						373,965,780	275,412,780	-98,553,000
5	02	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-			
						1,308,733,130	1,299,733,130	-9,000,000
5	02	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pemeriksaan Pajak Daerah (%)	100	100			
						130,684,651,210	96,153,593,014	-34,531,058,196
5	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%)	100	100			
5	02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				874,773,270	482,260,250	-392,513,020

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			74,994,500	74,994,500	0
5	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	7,057,250	7,057,250	0
5	02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	24,994,940	244,500	-24,750,440
5	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	28,834,580	0	-28,834,580
					738,892,000	399,964,000	-338,928,000
5	02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (%)	100	100		
					50,707,013,696	49,979,360,161	-727,653,535
5	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			
5	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			50,589,508,246	49,871,854,211	-717,654,035
					29,331,750	29,331,750	0
5	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-			
					18,279,750	18,279,750	0
5	02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-			
					24,474,800	24,474,800	0
5	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
					6,919,900	6,919,900	0
5	02	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-			
					28,499,750	28,499,750	0
5	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-			
					9,999,500	0	-9,999,500
5	02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-			
					2,031,388,720	1,997,295,920	-34,092,800
5	02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5	02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			10,226,000	4,876,000	-5,350,000
					1,981,476,000	1,981,476,000	0
5	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-			
					14,834,500	6,311,700	-8,522,800
5	02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-			
					24,852,220	4,632,220	-20,220,000
5	02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-			
					96,287,620	23,109,860	-73,177,760
5	02	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			
5	02	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			72,677,760	0	-72,677,760
					23,609,860	23,109,860	-500,000
5	02	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-			
5	02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	113,510,930	53,429,930	-60,081,000
5	02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			19,999,930	53,429,930	33,430,000
5	2	Pemindahan Tugas ASN	-	-	48,096,000	0	-48,096,000
5	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			45,415,000	0	-45,415,000
5	02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4,067,946,040	3,759,732,440	-308,213,600
5	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			91,980,800	91,980,800	0
					1,443,939,300	1,448,433,300	4,494,000
5	02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)	100	100		
					47,486,400	47,486,400	0
5	02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediannya barang cetak dan penggandaan (%)	100	100		
					1,404,385,540	1,404,928,940	543.4

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5	2	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%)	100	100			
						594,160,000	599,132,000	4,972,000
5	2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jasa pengangkutan beras dan barang dinas (%)	100	100			
						485,994,000	167,771,000	-318,223,000
5	02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-			
						26,504,527,834	25,671,856,218	-832,671,616
5	02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-			
5	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4,039,659,000	2,267,179,475	-1,772,479,525
						493,700,000	200,310,000	-293,390,000
5	2	Pengadaan Mebel	Pengadaan kendaraan dinas/operasional (%)	100	100			
5	02	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19,183,882,200	6,850,773,200	-12,333,109,000
						1,234,013,054	1,110,829,054	-123,184,000
5	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-			
						1,553,273,580	15,242,764,489	13,689,490,909
5	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan perlengkapan gedung kantor (%)	100	100			
						43,233,116,240	10,723,483,800	-32,509,632,440
5	02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan peralatan gedung kantor (%)	100	100			
5	2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				64,782,560	161,230,260	96,447,700
						41,814,741,220	9,252,817,920	-32,561,923,300
5	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa surat menyurat (%)	100	100			
						1,353,592,460	1,309,435,620	-44,156,840

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100			
						3,056,086,860	3,463,064,435	406,977,575
5	02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa jaminan sosial (%)	100	100			
5	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1,409,331,360	1,452,432,360	43,101,000
						199,000,000	94,500,000	-104,500,000
5	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (%)	100	100			
						1,260,416,500	1,628,793,075	368,376,575
5	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-			
						187,339,000	287,339,000	100,000,000
5	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kanto (%)	100	100			
Jumlah Belanja						158,364,909,210	121,194,759,314	-37,170,149,896
Badan Kepegawaian Daerah								
5	3	KEPEGAWAIAN				21,683,106,789	19,883,384,339	-1,799,722,450
5	03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				9,308,867,429	6,958,491,089	-2,350,376,340
5	03	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				3,635,271,389	2,842,079,729	-793,191,660
5	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				175,550,960	175,550,960	0
5	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				316,958,700	0	-316,958,700
5	03	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN				2,340,662,219	1,970,961,979	-369,700,240
5	03	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				215,658,260	211,449,240	-4,209,020

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5	3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			385,451,420	357,002,720	-28,448,700
5	03	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			138,868,960	64,993,960	-73,875,000
5	03	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			62,120,870	62,120,870	0
5	3	Mutasi dan Promosi ASN			1,470,659,070	1,331,594,030	-139,065,040
5	3	Pengelolaan Mutasi ASN			219,228,980	198,052,320	-21,176,660
5	03	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			311,362,270	300,857,090	-10,505,180
5	3	Pengelolaan Promosi ASN			940,067,820	832,684,620	-107,383,200
5	03	Pengembangan Kompetensi ASN			3,512,667,840	2,183,117,200	-1,329,550,640
5	03	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			1,192,854,520	466,204,340	-726,650,180
5	03	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			1,769,180,840	1,709,180,840	-60,000,000
5	03	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			196,495,620	7,732,020	-188,763,600
5	03	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			354,136,860	0	-354,136,860
5	03	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			690,269,130	601,700,130	-88,569,000
5	03	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			366,679,500	278,110,500	-88,569,000
5	3	Pembinaan Disiplin ASN			211,192,400	211,192,400	0
5	03	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			78,360,800	78,360,800	0
5	3	Evaluasi Disiplin ASN			34,036,430	34,036,430	0
5	03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			12,374,239,360	12,924,893,250	550,653,890
5	03	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32,865,260	91,046,260	58,181,000
5	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			31,433,360	89,614,360	58,181,000
5	03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,431,900	1,431,900	0
5	03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,314,298,440	9,185,051,189	-129,247,251
5	03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9,230,693,440	9,101,446,189	-129,247,251
5	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			83,605,000	83,605,000	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5	03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				93,428,400	93,428,400	0
5	03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				93,428,400	93,428,400	0
5	03	Administrasi Umum Perangkat Daerah				495,860,250	445,675,130	-50,185,120
5	03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	100	4,125,400	4,125,400	0
5	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6,205,000	6,205,000	0
5	03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100	100	38,485,750	38,485,750	0
5	03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	100	8,450,400	14,916,800	6,466,400
5	3	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya jasa pengangkutan beras dan barang dinas	100	100	62,724,880	57,677,680	-5,047,200
5	3	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman	100	100	30,397,000	30,397,000	0
5	03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				345,471,820	293,867,500	-51,604,320
5	03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,893,774,860	2,558,203,721	664,428,861
5	3	Pengadaan Mebel				251,596,400	244,416,400	-7,180,000
5	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1,641,118,460	2,312,727,321	671,608,861
5	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1,060,000	1,060,000	0
5	03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				424,992,900	449,119,300	24,126,400
5	3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100	100	19,972,800	16,470,000	-3,502,800
5	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	100	384,447,000	413,679,000	29,232,000
5	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				20,573,100	18,970,300	-1,602,800
5	03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				119,019,250	102,369,250	-16,650,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN				
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
5	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lanjangan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	100	80,237,250	80,237,250	0	
5	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1,182,000	1,182,000	0	
5	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	100	37,600,000	20,950,000	-16,650,000	
Jumlah Belanja							21,683,106,789	19,883,384,339	-1,799,722,450
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah									
5	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					60,156,509,065	59,530,833,628	-625,675,437
5	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					46,963,342,321	45,774,849,068	-1,188,493,253
5	04	Pengembangan Kompetensi Teknis					2,286,718,180	68,765,000	-2,217,953,180
5	04	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	293,235,800	68,765,000	-224,470,800	
5	04	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	242,345,460	0	-242,345,460	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5	04	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	1,693,544,020	0	-1,693,544,020
5	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	57,592,900	0	-57,592,900
5	04	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				44,676,624,141	45,706,084,068	1,029,459,927
5	04	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	100	100	134,222,360	0	-134,222,360
5	04	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	100	100	183,728,730	0	-183,728,730

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5	04	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	100	276,336,080	0	-276,336,080
5	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	100	100	644,034,748	436,187,068	-207,847,680
5	04	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	100	100	79,489,960	0	-79,489,960
5	04	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	100	100	71,042,220	0	-71,042,220
5	04	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100	100	42,996,308,143	45,269,897,000	2,273,588,857
5	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100	100	291,461,900	0	-291,461,900

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5	04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13,193,166,744	13,755,984,560	562,817,816
5	04	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				37,443,580	28,270,960	-9,172,620
5	04	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5,915,800	8,457,100	2,541,300
5	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5,975,360	5,975,360	0
5	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5,680,780	5,422,080	-258,700
5	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5,781,460	0	-5,781,460
5	04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				5,673,760	0	-5,673,760
5	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan-laporan	100	100	8,416,420	8,416,420	0
5	04	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10,726,015,020	10,303,884,696	-422,130,324
5	04	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10,715,044,000	10,303,884,696	-411,159,304
5	04	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				5,126,360	0	-5,126,360
5	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5,844,660	0	-5,844,660
5	04	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8,839,260	0	-8,839,260
5	04	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4,290,320	0	-4,290,320
5	04	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4,548,940	0	-4,548,940
5	04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17,000,000	0	-17,000,000
5	04	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				17,000,000	0	-17,000,000
5	04	Administrasi Umum Perangkat Daerah				354,340,000	159,607,020	-194,732,980
5	04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				31,172,000	31,172,000	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			19,982,000	0	-19,982,000	
5	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			34,880,000	34,880,000	0	
5	04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			69,271,300	5,812,800	-63,458,500	
5	4	Penyediaan Bahan/Material			69,630,700	43,390,220	-26,240,480	
5	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu			60,512,000	44,352,000	-16,160,000	
5	04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			68,892,000	0	-68,892,000	
5	04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			373,580,000	399,872,000	26,292,000	
5	04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			306,440,000	309,872,000	3,432,000	
5	4	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			67,140,000	90,000,000	22,860,000	
5	04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,454,496,384	1,869,672,584	415,176,200	
5	4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100	100	12,549,600	7,560,000	-4,989,600
5	04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	100	343,712,544	648,018,744	304,306,200
5	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1,098,234,240	1,214,093,840	115,859,600	
5	04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			221,452,500	994,677,300	773,224,800	
5	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lanjutan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100	100	60,000,000	90,000,000	30,000,000
5	04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			161,452,500	904,677,300	743,224,800	
Jumlah Belanja					60,156,509,065	59,530,833,628	-625,675,437	
Badan Pengelola Perbatasan Daerah								
Jumlah Pendapatan					0	0	0	
5	6	PENGELOLAAN PERBATASAN			8,350,025,410	6,230,660,132	-2,119,365,278	
5	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			1,928,067,780	615,358,510	-1,312,709,270	
5	06	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			1,344,721,130	588,374,110	-756,347,020	
5	06	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan			449,794,980	335,367,130	-114,427,850	

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5	06	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan			84,643,240	84,643,240	0	
5	06	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara			429,185,330	69,116,600	-360,068,730	
5	06	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan			381,097,580	99,247,140	-281,850,440	
5	6	Monitoring dan Evaluasi			583,346,650	26,984,400	-556,362,250	
5	06	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			486,074,480	0	-486,074,480	
5	06	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			97,272,170	26,984,400	-70,287,770	
5	06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6,421,957,630	5,615,301,622	-806,656,008	
5	06	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19,451,000	19,451,000	0	
5	06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			10,021,250	10,021,250	0	
5	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	9,429,750	9,429,750	0
5	06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,105,852,000	4,751,893,502	-353,958,498	
5	06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			16,200,000	16,200,000	0	
5	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			16,200,000	16,200,000	0	
5	06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			33,332,250	7,384,000	-25,948,250	
5	06	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			7,384,000	7,384,000	0	
5	06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			25,948,250	0	-25,948,250	
5	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			326,803,880	155,904,200	-170,899,680	
5	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	100	9,860,800	9,860,800	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5	06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa pengangkutan beras dan barang dinas	100	100	9,499,200	0	-9,499,200
5	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100	100	13,104,000	11,832,000	-1,272,000
5	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	100	26,083,200	10,483,200	-15,600,000
5	6	Penyediaan Bahan/Material				97,795,680	75,130,200	-22,665,480
5	6	Fasilitas Kuniungan Tamu				30,804,000	29,244,000	-1,560,000
5	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				139,657,000	19,354,000	-120,303,000
5	06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				347,837,380	119,087,300	-228,750,080
5	6	Pengadaan Mebel				103,328,400	17,940,000	-85,388,400
5	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				244,508,980	101,147,300	-143,361,680
		Peralatan dan Mesin						
5	06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				427,452,120	408,412,620	-19,039,500
5	06	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100	100	5,683,120	5,683,120	0
5	06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	100	90,312,000	90,312,000	0
5	06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				331,457,000	312,417,500	-19,039,500
5	06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				145,029,000	136,969,000	-8,060,000
5	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				101,416,000	106,016,000	4,600,000
5	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	100	12,513,000	12,513,000	0
		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
5	7	PENGELOLAAN PENGHUBUNG				176,063,360	0	-176,063,360
5	07	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				176,063,360	0	-176,063,360
5	07	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama				176,063,360	0	-176,063,360
Jumlah Belanja						8,526,088,770	6,230,660,132	-2,295,428,638

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta								
5	6	PENGELOLAAN PERBATASAN			4,295,791,500	2,380,642,300	-1,915,149,200	
5	06	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			3,075,578,600	871,769,400	-2,203,809,200	
5	06	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			3,075,578,600	871,769,400	-2,203,809,200	
5	06	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat			199,720,000	0	-199,720,000	
5	06	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			779,912,000	416,363,800	-363,548,200	
5	06	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			2,095,946,600	455,405,600	-1,640,541,000	
5	06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1,220,212,900	1,508,872,900	288,660,000	
5	06	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15,800,900	15,800,900	0	
5	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	15,800,900	15,800,900	0
5	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			299,476,000	495,024,000	195,548,000	
5	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			299,476,000	495,024,000	195,548,000	
5	06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			904,936,000	998,048,000	93,112,000	
5	06	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			61,600,000	82,600,000	21,000,000	
5	06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pertimbangan			843,336,000	915,448,000	72,112,000	
5	7	PENGELOLAAN PENGHUBUNG			2,734,032,034	3,362,941,080	628,909,046	
5	07	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			793,229,700	1,021,303,980	228,074,280	
5	07	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			793,229,700	1,021,303,980	228,074,280	
5	07	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya			290,975,700	526,117,980	235,142,280	
5	07	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya urusan pemerintah daerah di tingkat pusat	100	100	502,254,000	495,186,000	-7,068,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5	07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,940,802,334	2,341,637,100	400,834,766
5	07	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				37,000,000	45,000,000	8,000,000
5	07	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				37,000,000	45,000,000	8,000,000
5	07	Administrasi Umum Perangkat Daerah				285,321,334	441,950,700	156,629,366
5	07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				53,143,994	58,323,500	5,179,506
5	07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				16,480,000	22,358,000	5,878,000
5	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	100	5,928,000	1,560,000	-4,368,000
5	7	Penyediaan Bahan/Material				71,169,340	135,309,200	64,139,860
5	7	Fasilitasi Kunjungan Tamu				138,600,000	224,400,000	85,800,000
5	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				234,840,000	234,840,000	0
5	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				234,840,000	234,840,000	0
5	07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				202,790,400	202,790,400	0
5	07	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				202,790,400	202,790,400	0
5	07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,180,850,600	1,417,056,000	236,205,400
5	07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	100	1,043,102,600	1,107,356,000	64,253,400
5	07	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				67,280,000	64,400,000	-2,880,000
5	07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100	100	70,468,000	245,300,000	174,832,000
Jumlah Belanja						7,029,823,534	5,743,583,380	-1,286,240,154
Inspektorat Daerah Provinsi NTT								
6	1	INSPEKTORAT DAERAH				33,875,307,639	25,200,494,168	-8,674,813,471
6	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				12,459,903,180	8,629,222,836	-3,830,680,344

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
6	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				11,264,817,970	7,568,105,626	-3,696,712,344
6	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				8,774,161,910	6,376,720,816	-2,397,441,094
6	01	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Audit Kinerja dan Keuangan (%)	100	100	546,627,530	540,359,530	-6,268,000
6	1	Reviu Laporan Kinerja				222,509,780	195,309,780	-27,200,000
6	1	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Kinerja dan Anggaran	100	100	85,680,000	85,680,000	0
6	01	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				1,635,838,750	370,035,500	-1,265,803,250
6	01	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1,195,085,210	1,061,117,210	-133,968,000
6	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				104,040,000	104,040,000	0
6	1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1,091,045,210	957,077,210	-133,968,000
6	01	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				3,771,498,790	2,878,107,550	-893,391,240
6	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				2,825,323,220	2,036,433,980	-788,889,240
6	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100	100	966,179,240	226,790,000	-739,389,240
6	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pengawasan	100	100	1,859,143,980	1,809,643,980	-49,500,000
6	1	Belana Perjalanan Dinas				307,163,000	307,163,000	0
6	1	Pendampingan dan Asistensi				946,175,570	841,673,570	-104,502,000
6	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				93,593,000	85,093,000	-8,500,000
6	1	Belana Perjalanan Dinas				87,550,000	79,050,000	-8,500,000
6	01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				732,000,820	732,000,820	0
6	1	Belana Perjalanan Dinas				623,752,000	623,752,000	0
6	01	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				120,581,750	24,579,750	-96,002,000
6	1	Belana Perjalanan Dinas				92,050,000	0	-92,050,000
6	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				17,643,905,669	13,693,163,782	-3,950,741,887

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
6	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				146,859,750	130,920,750	-15,939,000
6	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				39,996,550	34,056,550	-5,940,000
6	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				24,995,500	24,995,500	0
6	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				71,868,700	71,868,700	0
6	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9,999,000	0	-9,999,000
6	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11,641,136,129	9,263,606,150	-2,377,529,979
6	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11,606,136,629	9,228,606,650	-2,377,529,979
6	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				34,999,500	34,999,500	0
6	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1,538,516,020	104,967,900	-1,433,548,120
6	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				104,967,900	104,967,900	0
6	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1,306,598,270	0	-1,306,598,270
6	01	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				126,949,850	0	-126,949,850
6	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				210,700,690	185,866,690	-24,834,000
6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19,999,000	19,999,000	0
6	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				24,999,000	24,999,000	0
6	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3,868,800	3,868,800	0
6	1	Penyediaan Bahan/Material				59,999,890	59,999,890	0
6	1	Fasilitasi Kunjungan Tamu				101,834,000	77,000,000	-24,834,000
6	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,944,742,440	2,902,905,452	-41,836,988
6	1	Pengadaan Mebel				1,994,786,919	1,952,949,930	-41,836,989
6	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				949,955,521	949,955,522	1
6	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				845,004,390	814,310,590	-30,693,800
6	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10,995,400	7,360,600	-3,634,800
6	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				345,980,000	333,500,000	-12,480,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
6	01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5,998,500	5,998,500	0
6	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			482,030,490	467,451,490	-14,579,000
6	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			316,946,250	290,586,250	-26,360,000
6	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			141,951,250	141,951,250	0
6	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			144,995,000	118,635,000	-26,360,000
6	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			30,000,000	30,000,000	0
Jumlah Belanja					33,875,307,639	25,200,494,168	-8,674,813,471
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
8	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			8,158,761,492	7,387,316,370	-771,445,122
8	01	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			340,866,630	87,242,740	-253,623,890
8	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			340,866,630	87,242,740	-253,623,890
8	01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan			340,866,630	87,242,740	-253,623,890
					504,612,980	238,811,180	-265,801,800
8	01	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	100		

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
8	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			504,612,980	238,811,180	-265,801,800
8	01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			504,612,980	238,811,180	-265,801,800
					123,199,840	121,297,040	-1,902,800
			Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (%)	100	100		
8	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
8	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			123,199,840	121,297,040	-1,902,800
8	01	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			39,470,600	38,095,600	-1,375,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
					83,729,240	83,201,440	-527,800	
8	01	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksana Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (%)	100	100			
					137,208,240	112,276,500	-24,931,740	
8	01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah (%)	100	100			
8	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				137,208,240	112,276,500	-24,931,740
8	01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				137,208,240	112,276,500	-24,931,740
					453,110,300	453,938,950	828,650	
8	01	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (%)	100	100			

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN		
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
8	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			453,110,300	453,938,950	828,650
8	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			51,050,000	0	-51,050,000
					245,012,300	215,688,950	-29,323,350
8	01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (%)	100	100		
					157,048,000	238,250,000	81,202,000
8	01	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (%)	100	100		
					6,599,763,502	6,373,749,960	-226,013,542

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
8	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (%)	100	100			
8	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				41,233,000	26,790,500	-14,442,500
8	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3,956,750	1,901,750	-2,055,000
8	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	4,156,750	56,750	-4,100,000
8	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	5,836,750	0	-5,836,750
8	01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	5,286,750	0	-5,286,750
8	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	21,996,000	24,832,000	2,836,000
8	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	5,455,488,390	5,315,575,718	-139,912,672
8	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	5,950,000	5,950,000	0
8	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5,950,000	5,950,000	0
8	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	246,256,512	167,824,192	-78,432,320
8	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5,494,300	5,494,300	0
						9,221,422	9,221,422	0

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN			
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
8	01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)	100	100			
		Peralatan dan Mesin						
						22,023,250	22,023,250	0
8	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya peralatan rumah tangga (%)	100	100			
						13,379,600	13,379,600	0
8	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (%)	100	100			
8	1	Penyediaan Bahan/Material				43,659,940	48,072,620	4,412,680
8	1	Fasilitasi Kunjungan Tamu				15,744,000	22,424,000	6,680,000
						121,764,000	32,239,000	-89,525,000
8	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%)	100	100			
						14,970,000	14,970,000	0
8	01	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah (%)	100	100			
			-	-	-	193,008,966	181,340,166	-11,668,800
8	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
8	1	Pengadaan Mebel				11,668,800	0	-11,668,800
						73,363,166	73,363,166	0
8	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya mebeleur (%)	100	100			
						107,977,000	107,977,000	0
8	01	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor (%)	100	100			
8	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				377,014,720	375,524,720	-1,490,000

Kode Rekening	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN				
		INDIKATOR	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1,260,000	1,260,000	0		
					140,496,000	140,176,000	-320,000		
8	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa surat menyurat (%)	100	100				
					7,900,000	6,850,000	-1,050,000		
8	01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	100				
					227,358,720	227,238,720	-120,000		
8	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa jaminan sosial (%)	100	100				
			-	-	-				
					280,811,914	300,744,664	19,932,750		
8	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
8	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35,335,680	39,144,630	3,808,950	
			-	-	-	20,994,490	16,811,190	-4,183,300	
8	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			-	-	-	224,481,744	244,788,844	20,307,100	
8	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor (%)	100	100				
Jumlah Belanja							8,158,761,492	7,387,316,370	-771,445,122